BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN



grobogan
gumregol gumregah gumregul

GROBOGAN

2025

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan S. Parman Nomor 38B, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon (0292) 421190, Faksimile (0292) 421190,
Laman inspektorat.grobogan.go.id, Pos-el inspektorat.grobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal–hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 25 Maret 2026
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NUR NAWANTA, A.P
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 197308031993111001

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang di dalamnya melaporkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas segala macam dukungan dan kontribusi terhadap keberhasilan dan ketercapaian kinerja selama tahun 2025. Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik.

LKjIP 2025 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil yang berdampak

pada pembangunan daerah khususnya peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang semakin membaik di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami agar cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga semua upaya yang telah dilakukan bersama mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 25 Maret 2026

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

IKHTISAR EKSKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disusun dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja secara teknis dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) tujuan dengan 17 (tujuh belas) sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. **Tingkat kinerja Tujuan**

   Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

   a. Capaian kinerja dari 5 (lima) tujuan, semuanya 5 (lima) tujuan **TERCAPAI (100,00%).**

b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%).**

c. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 7 (tujuh) indikator tujuan **TERCAPAI (70,00%)** dan sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (30,00%)**. Tiga indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar 79,89%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 90,08%, dan Angka Kemiskinan sebesar 96,19%.

d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indiaktor berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (satu) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar (79,89%).

e. Capaian Kinerja di level Tujuan Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.**				**100,58**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
1	Indeks Pembanguna Manusia (IPM)	Indeks	72,27	72,94	100,93	Tercapai	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,45	86,65	100,23	Tercapai	Sangat Tinggi
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.**				**107,70**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
3	Tingkat Pembangunan Insfrastruktur Daerah	%	82,97	66,2852	79,89%	Tidak Tercapai	Tinggi
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55	71,66	90,08%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140,00)	Sedang (65,59)	153,15%	Tercapai	Sangat Tinggi
III.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**				**102,99**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
6	**Pertumbuhan Ekonomi**	%	5±1	5,49	109,80	Tercapai	Sangat Tinggi
7	**Angka Kemiskinan**	%	9,76–10,24	10,63	96,19	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**				**104,84**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	A (83,35)	A (87,38)	104,84	Tercapai	Sangat Tinggi
V.	**Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**				**102,45**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
9	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	64,92	68,1	104,90	Tercapai	Sangat Tinggi
10	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan					**103,71**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
Rata-rata Capaian Kinerja Per Indikator Tujuan					**104,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2025 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir							

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, 15 (Lima belas) sasaran **TERCAPAI (88,23%),** Dua sasaran yang tidak tercapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah (78,18%), dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan (95,58%) **dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,11%.**

b. Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator **TERCAPAI** (70,96%) dan sebayak 9 (Sembilan) indikator **TIDAK TERCAPAI** (29,04%). Sembilan indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Persentase Infrastruktur Jalan, Drainase, dan Sumber Daya Air Kondisi Baik (89,46%), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang (99,76%), Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni (99,73%), Indeks Kualitas Udara (80,29%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (88,55), Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-16,62%), Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD (75,08%), Nilai SAKIP (92,33%), dan Level Maturitas SPIP (94,41%)

c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, 26 Indikator dengan capaian kinerja **SANGAT TINGGI**

(83,87%), Tiga indikator sasaran dengan capaian **Tinggi (6,68%),** Satu indikator sasaran dengan capain **Cukup (3,22%),** dan Satu indikator sasaran dengan capaian **Sangat Rendah (3,22%),** dengan **rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran sebesar 100,11%**.

3. **Tingkat Efisiensi Tujuan dan Sasaran**

   a. Tingkat efisiensi dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN,** dengan **tingkat efisiensi sebesar 8,83% atau senilai Rp.193.643.075.197,-** (Seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)

   b. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, terdiri dari 15 sasaran **EFISIEN,** dengan **tingkat efisiensi sebesar 10,71%**. Dan 2 sasaran **TIDAK EFISIEN** yaitu Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah dengan tingkat efisiensi –17,45%, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan dengan tingkat efisiensi 9,06%.

Purwodadi, 25 Maret 2026

BUPATI GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

DAFTAR ISI

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN I
INSPEKTORAT I
PERNYATAAN TELAH DIREVIU I
KATA PENGANTAR II
IKHTISAR EKSKUTIF IV
DAFTAR ISI VIII
DAFTAR TABEL X
DAFTAR GAMBAR XIII
DAFTAR GRAFIK XIV
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan 4
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan 10
E. Perangkat Daerah 11
F. Sumber Daya Aparatur 17
G. Sumber Daya Anggaran 19
H. Isu-isu Strategis (Strategic Issued) 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021□2026 23
B. Tujuan Pembangunan Daerah 24
C. Program Pembangunan Daerah 25
D. Indikator Kinerja Utama 30
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 49
A. Pengukuran Kinerja 50
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan 52
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 61
1. Misi 1 61
2. Misi 2 77
3. Misi 3 95

4. Misi 4 127
5. Misi 5 144
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 154
E. Inovasi Kabupaten Grobogan 158
BAB IV PENUTUP 169
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan 5
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 6
Tabel 1. 3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025 7
Tabel 1. 4 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan 8
Tabel 1. 5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan 10
Tabel 1. 6 Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 17
Tabel 1. 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 19

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026 31
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 45

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja 51
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2025 52
Tabel 3. 3 Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 57
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 57
Tabel 3. 5 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2025 58
Tabel 3. 6 Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2025 58
Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022—2025 59
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Tujuan 1 62
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Sasaran 1 66
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 66

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Sasaran 2 71
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2 71
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Sasaran 3 74
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 74
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi Tujuan 2 78
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi Sasaran 4 80
Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4 81
Tabel 3. 18 Target dan Realisasi Sasaran 5 90
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5 90
Tabel 3. 20 Target dan Realisasi Sasaran 6 92
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6 93
Tabel 3. 22 Target dan Realisasi Tujuan 3 96
Tabel 3. 23 Target dan Realisasi Sasaran 7 99
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7 100
Tabel 3. 25 Target dan Realisasi Sasaran 8 111
Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8 111
Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Sasaran 9 114
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9 114
Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Sasaran 10 118
Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10 118
Tabel 3. 31 Target dan Realisasi Sasaran 11 122
Tabel 3. 32 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11 122
Tabel 3. 33 Target dan Realisasi Tujuan 4 127
Tabel 3. 34 Target dan Realisasi Sasaran 12 130
Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12 130
Tabel 3. 36 Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2025 134
Tabel 3. 37 Target dan Realisasi Sasaran 13 137
Tabel 3. 38 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13 137
Tabel 3. 39 Target dan Realisasi Sasaran 14 139
Tabel 3. 40 Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan 140
Tabel 3. 41 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14 140

Tabel 3. 42 Target dan Realisasi Sasaran 15 142
Tabel 3. 43 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15 142
Tabel 3. 44 Target dan Realisasi Tujuan 5 145
Tabel 3. 45 Target dan Realisasi Sasaran 16 146
Tabel 3. 46 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16 146
Tabel 3. 47 Target dan Realisasi Sasaran 17 149
Tabel 3. 48 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17 149
Tabel 3. 49 Analisis Efisiensi pada Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2025..... 154
Tabel 3. 50 Realisasi Anggaran Perubahan per Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2025..... 158
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja di level Tujuan Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025..... 169
Tabel 4. 2 Capaian Kinerja di level Sasaran Perjanjian Kinerja 171
Tabel 4. 3 Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tujuan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025..... 175
Tabel 4. 4 Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Sasaran pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025..... 176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Grobogan 4
Gambar 1. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025 9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan kabupaten sekitar 63
Grafik 3. 2 Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 63
Grafik 3. 3 Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah 64
Grafik 3. 4 Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya 65
Grafik 3. 5 Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Provinsi Tahun 2025 79
Grafik 3. 6 Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025 79
Grafik 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 96
Grafik 3. 8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2025 97
Grafik 3. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025 97
Grafik 3. 10 Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Provinsi dan Nasional 98
Grafik 3. 11 Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025 98
Grafik 3. 12 Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2026 129
Grafik 3. 13 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kabupaten sekitar Tahun 2021-2025 129

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja dipertegas pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja yang dimaksud yakni Laporan Kinerja Interm dan Laporan Kinerja Tahunan. Dalam Teknis penyusunannya, juga diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja yakni maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kabupaten Grobogan sendiri juga mempertegas hal tersebut melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi enam tahapan yang dilalui. Di antaranya penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Satu di antara upaya implementasi SAKIP, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025; dan

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025. Dilakukan perubahan pertama Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2025 pada tanggal 20 Februari 2025 dikarenakan adanya pergantian jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan dilakukan pada tanggal 1 September 2025 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian pula pada penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah yang di dalamnya melakukan pengukuran capaian kinerja terhadap target PK Bupati Grobogan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memenuhi sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110º15' BT—111º25' BT dan 7º LS—7º30' LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	:	Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	:	Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	:	Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Gambar 1. 1
Peta Kabupaten Grobogan



b. Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 135.2/314/I/2021 perihal Edaran Luas Wilayah Kabupaten Grobogan, terjadi penambahan dari ±1.975,86 km^2 menjadi ±2.022,849 km^2, membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273

desa, 7 kelurahan dan 1.463 dusun/lingkungan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Luas Wilayah (Km^2)
1	Kedungjati	12	62	145,288
2	Karangrayung	19	99	144,272
3	Penawangan	20	74	75,230
4	Toroh	16	120	126,716
5	Geyer	13	102	205,141
6	Pulokulon	13	115	136,948
7	Kradenan	14	77	111,663
8	Gabus	14	93	163,930
9	Ngaringan	12	86	119,154
10	Wirosari	14	93	151,026
11	Tawangharjo	10	59	93,066
12	Grobogan	12	52	101,490
13	Purwodadi	17	108	78,177
14	Brati	9	53	56,561
15	Klambu	9	45	52,349
16	Godong	28	87	92,934
17	Gubug	21	57	65,518
18	Tegowanu	18	50	54,260
19	Tanggungharjo	9	31	50,126
Jumlah		**280**	**1.463**	**2.023,849**

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda

c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan ±2.022,25 Km^2 terdiri dari lahan pertanian sawah 41,31% dan 44,23% merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 85,54% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian

tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 0—8º. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50—100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 8—15º dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100—500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15º, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio*

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 1.523.521 jiwa terdiri dari 766.393 jiwa (50,30%) penduduk laki-laki dan sebanyak 757.128 jiwa (49,69%) penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk sebesar 101,22%. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 2.547 jiwa atau naik 0.16%.

Jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	*Sex Ratio*
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.839	22.776	45.615	100.28
2	Karangrayung	53.670	52.525	106.195	102.18
3	Penawangan	34.353	33.771	68.124	101.72
4	Toroh	60.840	60.923	121.763	99.86

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	*Sex Ratio*
		Laki-laki	Perempuan		
5	Geyer	34.400	34.179	68.579	100.65
6	Pulokulon	57.799	56.786	114.585	101.78
7	Kradenan	43.575	43.149	86.724	100.99
8	Gabus	38.393	38.059	76.452	100.88
9	Ngaringan	36.783	35.632	72.415	103.23
10	Wirosari	49.215	48.579	97.794	101.31
11	Tawangharjo	31.062	30.202	61.264	102.85
12	Grobogan	41.730	40.869	82.599	102.11
13	Purwodadi	72.266	72.568	144.834	99.58
14	Brati	26.905	26.304	53.209	102.28
15	Klambu	20.326	19.915	40.241	102.06
16	Godong	45.390	45.061	90.451	100.73
17	Gubug	44.583	44.307	88.890	100.62
18	Tegowanu	30.652	30.371	61.023	101.93
19	Tanggungharjo	22.368	22.089	44.457	101.26
	Jumlah	767.149	758.065	1.525.214	101.20

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 144.834 jiwa/km^2, dengan wilayah terpadat di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.853 jiwa/km^2 dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 314 jiwa/km^2. Adapun dilihat dari banyaknya jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 144.834 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 40.241 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km²
1	Kedungjati	145,29	45.615	314
2	Karangrayung	144,27	106.195	736
3	Penawangan	75,23	68.124	906

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km²
4	Toroh	126,72	121.763	961
5	Geyer	205,14	68.579	334
6	Pulokulon	136,95	114.585	837
7	Kradenan	111,66	86.724	777
8	Gabus	163,93	76.452	467
9	Ngaringan	119,15	72.415	608
10	Wirosari	151,03	97.794	645
11	Tawangharjo	93,07	61.264	658
12	Grobogan	101,49	82.599	814
13	Purwodadi	78,18	144.834	1.853
14	Brati	56,56	53.209	941
15	Klambu	52,35	40.241	769
16	Godong	92,93	90.451	973
17	Gubug	65,52	88.890	1.357
18	Tegowanu	54,26	61.023	1.125
19	Tanggungharjo	50,13	44.457	887
Jumlah		**2.023,85**	**1.525.214**	**754**

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

c. Struktur Umur dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14) tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	49.263	49.386	95.649
2	5-9	59.758	56.168	115.926
3	10-14	60.139	56.754	116.893
4	15-19	59.464	55.877	115.431
5	20-24	56.878	54.225	111.103
6	25-29	61.583	58.176	119.759
7	30-34	58.630	54.985	113.615
8	35-39	57.473	54.956	112.429
9	40-44	56.155	54.227	111.382
10	45-49	51.755	51.891	103.646
11	50-54	46.589	48.123	94.712
12	55-59	43.158	46.475	89.633
13	60-64	38.383	41.896	80.279

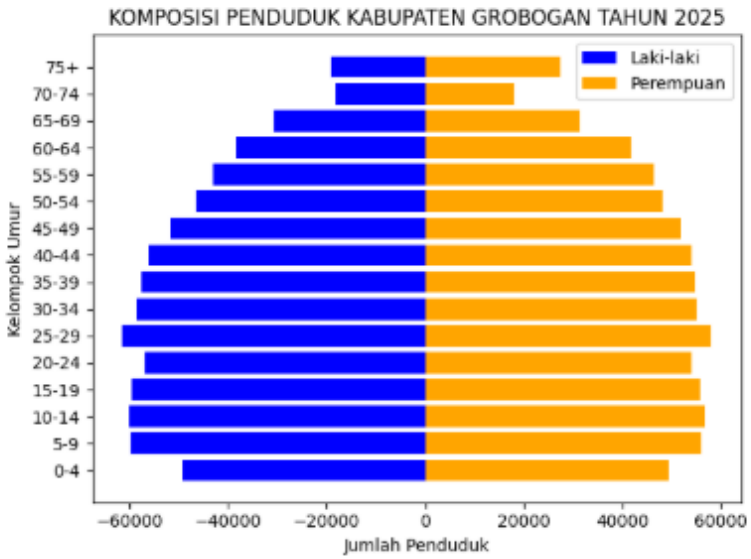
No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
14	65-69	30.823	31.450	62.273
15	70-74	18.044	18.105	36.149
16	75+	19.054	27.371	46.425
Jumlah		**767.149**	**758.065**	**1.525.214**

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2025 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.051.899 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) mencapai 473.315 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 45%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 45 orang yang non produktif.

Berdasarkan data di atas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1. 2
Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025



d. Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4.240 jiwa atau naik 0.28%.

Data pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2025

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0.89%
2	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0.39%
3	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0.69%
4	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0.94%
5	2020	745.244	738.142	1.483.386	9.955	0.68%
6	2021	748.531	740.416	1.488.947	5.561	0.37%
7	2022	754.396	746.749	1.501.145	12.198	0.82%
8	2023	761.591	752.710	1.514.301	13.156	0.88%
9	2024	765.275	755.699	1.520.974	6.673	0.44%
10	2025	767.149	758.065	1.525.214	4.240	0,28%

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
   a. tenaga kerja;
   b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. pangan;
   d. pertanahan;
   e. lingkungan hidup;
   f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   i. perhubungan;
   j. komunikasi dan informatika;
   k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
   l. penanaman modal;
   m. kepemudaan dan olahraga;
   n. statistik;
   o. persandian;
   p. perpustakaan; dan
   q. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;
   c. pertanian;
   d. kehutanan;
   e. energi dan sumber daya mineral;
   f. perdagangan;
   g. perindustrian; dan
   h. transmigrasi.

E. Perangkat Daerah

Perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
    a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
    e. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g. Dinas Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
q. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan peternakan, dan bidang kelautan dan perikanan;

s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan

u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah, terdiri atas :

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tesebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,

7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggungharjo.

Sedangkan pada beberapa wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan pada Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan pada Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari pada Kecamatan Wirosari.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2025 sebanyak 36 UPTD, yaitu:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD Laboraturiun Konstruksi Kelas A,
8. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,
9. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),
10. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),

11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),
12. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggungharjo),
18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
19. UPTD Techno Park Pangan,
20. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
21. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
23. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
24. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
26. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
27. UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A,
28. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
29. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
30. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,
31. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
32. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,
33. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat,
35. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), dan

36. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu:

37. RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi,
38. RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan
39. RSUD Ki Ageng Selo.

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan didukung pegawai yang berstatus ASN sebanyak 15.987 orang, yang tersebar di 48 Perangkat Daerah dan tiga Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan RSUD Ki Ageng Selo.

Data ASN per 31 Desember 2025 sebanyak 15.987 orang, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2024 sebanyak 3.679 orang (29.8%), demikian juga dengan jumlah pejabat fungsional meningkat dari 10.873 orang menjadi 11.888 orang (9.3%).

Secara rinci jumlah ASN pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, termasuk pejabat fungsional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
1	Sekretariat Daerah	10	98	13	184	46
2	Sekretariat DPRD	1	25	7	111	9
3	Inspektorat Daerah	9	41	2	55	37
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	38	6	48	17
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	19	3	30	8
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	20	5	61	3

NO	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	54	9	130	18
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5	25	7	49	18
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakan Daerah	3	23	6	42	17
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	41	16	114	35
11	Dinas Kesehatan	33	1.243	1.313	3.021	2.487
12	Dinas Pangan	2	21	8	46	14
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	23	3	42	16
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	15	9	30	13
15	Dinas Lingkungan Hidup	2	32	10	133	18
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	107	26	240	42
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	31	7	54	13
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	3	20	5	71	12
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	3	25	4	68	10
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	22	2	42	11
21	Dinas Pendidikan	3	3.072	4.657	9.172	8.222
22	Dinas Perhubungan	7	35	8	71	10
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	42	13	196	20
24	Dinas Pertanian	2	45	82	165	111
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	20	11	47	18
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	2	38	31	104	41
27	Dinas Sosial	4	14	5	44	10
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	22	9	57	21
29	Satuan Polisi Pamong Praja	6	26	36	224	30
30	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	14	309	191	795	546
31	Kecamatan Brati	-	12	2	21	1
32	Kecamatan Gabus	-	11	2	28	1
33	Kecamatan Geyer	-	17	2	25	1

NO	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
34	Kecamatan Godong	-	16	2	26	1
35	Kecamatan Grobogan	-	17	2	33	1
36	Kecamatan Gubug	-	15	2	24	1
37	Kecamatan Karangrayung	-	14	2	25	-
38	Kecamatan Kedungjati	-	15	2	23	-
39	Kecamatan Klambu	-	15	2	33	1
40	Kecamatan Kradenan	-	12	2	25	-
41	Kecamatan Ngaringan	-	11	2	22	1
42	Kecamatan Penawangan	-	14	2	25	1
43	Kecamatan Pulokulon	-	10	2	19	1
44	Kecamatan Purwodadi	-	41	2	82	1
45	Kecamatan Tanggungharjo	-	12	1	15	-
46	Kecamatan Tawangharjo	-	16	2	24	1
47	Kecamatan Tegowanu	-	19	2	27	1
48	Kecamatan Toroh	-	14	2	23	1
49	Kecamatan Wirosari	1	27	1	41	1
	JUMLAH	**147**	**5.854**	**6.540**	**15.987**	**11.888**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Grobogan 2025.

Dari jumlah PNS dan PPPK Kabupaten Grobogan sebanyak 15.987 orang sebagaimana tabel di atas, proporsi terbanyak yakni Dinas Pendidikan dengan jumlah ASN sebanyak 9.172 orang yang mana terdiri dari fungsional sebanyak 8.222 orang. Selanjutnya diikuti dari Dinas Kesehatan yakni sebanyak 3.021 orang yang mana terdiri dari 2.487 Pejabat fungsional.

G. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	**Pendapatan Daerah**	**3.025.797.908.584,00**	**3.005.749.682.541,00**
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.817.722.504,00	623.224.234.468,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.440.980.186.080,00	2.382.525.448.073,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
2.	**Belanja Daerah**	**3.035.847.908.584,00**	**3.116.483.113.255,00**
2.1	Belanja Operasi	2.148.870.739.167,00	2.223.876.661.965,00
2.2	Belanja Modal	404.886.998.617,00	412.312.584.275,00

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
2.3	Belanja Tidak Terduga	14.420.527.800,00	12.201.148.015,00
2.4	Belanja Transfer	467.669.643.000,00	468.092.719.000,00
	Surplus/Defisit	(-10.050.000.000,00)	(-110.733.430.714,00)
3.	**Pembiayaan Daerah**	**12.305.200.000,00**	**109.126.029.021,00**
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	15.000.000.000,00	115.683.430.714,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.000.000.000,00	115.683.430.714,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00
	Pembiayaan Neto	**10.050.000.000,00**	**110.733.430.714,00**

Sumber: 1. Perda Kab. Grobogan Nomor 6 Tahun 2025
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2025

H. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 dirumuskan mendasarkan pada visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 yang ingin diwujudkan yaitu "Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya". Berdasarkan pentahapan arah kebijakan tahunan RPJMD pada tahun 2025, maka RKPD Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 mengambil tema: "Pemantapan Daya Saing SDM dan Penguatan Reformasi Birokrasi serta Kemajuan nilai- nilai budaya", dengan prioritas pada: (1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; (2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat; (3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (*primary health care*); dan(4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang.

Pembangunan di Kabupaten Grobogan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2025 dengan arah kebijakan pemantaban daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi. Pembangunan tahun 2025 masih di titikberatkan pada pemantapan kondisi perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan

dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan.

Dalam upaya meningkatkan Pemantaban daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Upaya pengiatan reformasi birokrasi yang mulai dijalankan pada tahun sebelumnya,kembali menjadi focus pembangunan pada tahun 2025. Perbedananya adalah pada tahun 2025 merupakan tindaklajut dari peletakan pondasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun keempat ini meliputi:

1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer *(primary health care)*
4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
7) Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan
8) Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelompok makro isu strategis Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal,
2) Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri,
3) Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan,
4) Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, dan
5) Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2021–2026) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sehjahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu ***Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman*** dan ***Berbudaya.*** Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana,
3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing,
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka

mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dan
5. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan. Pada tahun 2023 Kabupaten Grobogan telah mengimplementasikan SIPD beserta perubahannya sesuai SK Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program sesuai SIPD tersebut terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu *"*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing*",* program pembangunan yang mendukung misi pertama sebanyak 21 program sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan,
2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
3) Program Pembinaan Perpustakaan,
4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,
7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
8) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

9) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
10) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan,
11) Program Pengendalian Penduduk,
12) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
13) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS),
14) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,
15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
16) Program Penanganan Kerawanan Pangan,
17) Program Pengawasan Keamanan Pangan,
18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga,
20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dan
21) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu *"Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana"*, program pembangunan yang mendukung misi kedua sebanyak 23 program sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
5) Program Penataan Bangunan Gedung,
6) Program Penyelenggaraan Jalan,
7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi,
8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,
9) Program Penatagunaan Tanah,
10) Program Pengembangan Perumahan,
11) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,
12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU),
13) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
14) Program Perencanaan Lingkungan Hidup,

15) Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
16) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati),
17) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
18) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
19) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,
20) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup,
21) Program Pengelolaan Persampahan,
22) Program Penanggulangan Bencana, dan
23) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi ketiga sebanyak 42 program sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
4) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
6) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
7) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
8) Program Penyuluhan Pertanian,
9) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,
10) Program Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
11) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,
12) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
13) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,

14) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
15) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
16) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
17) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
18) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
19) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
20) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM),
21) Program Pengembangan UMKM,
22) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
23) Program Promosi Penanaman Modal,
24) Program Pelayanan Penanaman Modal,
25) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
26) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
27) Program Penataan Desa,
28) Program Peningkatan Kerja Sama Desa,
29) Program Administrasi Pemerintahan Desa,
30) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat,
31) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
32) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
33) Program Pemberdayaan Sosial,
34) Program Rehabilitasi Sosial,
35) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
36) Program Penanganan Bencana,
37) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,
38) Program Perencanaan Tenaga Kerja,
39) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
40) Program Penempatan Tenaga Kerja,
41) Program Hubungan Industrial, dan
42) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi,

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu *"Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik"*, program pembangunan yang mendukung misi keempat sebanyak 26 program sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
3) Program Perekonomian dan Pembangunan,
4) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,
5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
6) Program Pendaftaran Penduduk,
7) Program Pencatatan Sipil,
8) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
9) Program Pengelolaan Profil Kependudukan,
10) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,
11) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
12) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
13) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
14) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,
15) Program Pengelolaan Arsip,
16) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip,
17) Program Perizinan Penggunaan Arsip,
18) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
19) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
20) Program Penyelenggaraan Pengawasan,
21) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,
22) Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
23) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,
24) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
25) Program Kepegawaian Daerah, dan
26) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu "Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat", program pembangunan yang mendukung misi kelima sebanyak 10 program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kebudayaan
2) Program Pengelolaan Permuseuman
3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
4) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,
5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik,
6) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
8) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial,
9) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan
10) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022—2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	Indeks	**Dimensi Kesehatan:** $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ **Dimensi Pendidikan:** $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ **Dimensi Pengeluaran:** $I_{Pengeluaran} = \frac{In - In_{(min)}}{In_{maks} - In_{min}}$ **IPM:** $IPM = \sqrt[2]{I_{Kes} x I_{Pddk} x I_{Peng}} x 100$	BPS	Disdik Dinkes
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki} - \text{laki}}$	BPS	DP3AKB
		1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	BPS	Disdik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	BPS	Disdik
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS	Dinkes
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Pemenuhan atas Indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) = Kelembagaan PUG (7 Prasyarat) + *Outcome*/hasil pelaksanaan PUG	Kemen PPPA	DP3AKB

Misi 2 : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah**	**Persen**	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik+ Cakupan pelayanan Sistem Drainase +Persentase Irigasi kondisi baik+Persentase sarana perhubungan kondisi baik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni+Persentase Kesesuaian tata ruang +Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman+Cakupan pelayanan air limbah domestik) dibagi 8	BAPPERIDA dan DPUPR	DPUPR Disperakim Dishub
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	**Indeks**	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	Kementerian Lingkungan Hidup dan	DLH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					Kehutanan	
		5. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	{(Nilai Indeks BahayaxNilai Indeks Kerentanan) dibagi Nilai Ketahanan)} x 100%	BNPB	BPBD
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen		DPUPR	DPUPR
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	$\% = \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} x100\%$	DPUPR	DPUPR
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	(Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman + Cakupan pelayanan air limbah domestik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni) dibagi 3	Disperakim	Disperakim
		8. Kinerja lalu lintas (*V/C ratio*)	Kategori	$VCR = \frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas ruas jalan}} \text{ x } 100\%$	Dishub	Dishub
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air	Indeks	$Ind = \frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \text{ x } 100\%$	Kementerian Lingkungan Hidup dan	DLH
		10. Indeks kualitas udara	Indeks	$Ind = \frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \text{ x } 100\%$		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		11. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	$\text{Ind} = \frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \text{ x } 100\%$	Kehutanan	
		12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	Nilai Pengurangan Sampah Plastik + Nilai Kinerja Fasilitas Pengelolaan sampah sebelum ke TPA dibagi 2		
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penaggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	Nilai indeks kelembagaan + nilai indeks peringatan dini + nilai indeks Pendidikan + nilai indeks mitigasi + nilai indeks kesiapsiagaan	BNPB	BPBD

Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
III.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	**6. Pertumbuhan ekonomi**	**Persen**	PDRB tahun (n)-PDRB tahun (n-1)/PDRB Tahun (n-1) x 100%	BPS	Disperindag Dinkop UKM
		7. Angka Kemiskinan	**Persen**	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Keterangan: α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	BPS	Dinsos Bappeda

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n – kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 dikali 100	BPS	Dispertan Disnakkan
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n – kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n – kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	Jumlah pendapatan sub sektor usaha pariwisata dibagi nilai PAD x 100%	Disporabudpar	Disporabud-par BPPKAD
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	Jumlah nilai investasi pada tahun n	DPMPTSP	DPMPTSP
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	$\text{IDM} = \frac{1}{3}(\text{ISxIExIL})$ Dimana: IS = Indeks Sosial IE = Indeks Ekonomi	Kemendes PDT	Dispermasdes Pemerintah Desa

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				IL = Indeks Lingkungan		
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	Persentase PPKS tahun n dikurangi persentase PPKS tahun n-1	Dinsos	Dinsos
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} x100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ∑Pengangguran (orang) ∑Angkatan Kerja (orang)	BPS	Disnakertrans

Misi 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**8. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	Mulai Tahun 2023, telah dilakukan penajaman hubungan sebab akibat danpenyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansiterkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan MenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan	Kemen PANRB	Setda ITDA Seluruh PD

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, bahwa terdapat dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dikenal dengan 'double track', terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General bertujuan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk RB Tematik bertujuan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Untuk RB Tematik terdapat 5 (lima) tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari penjumlahan darii hasil Evaluasi RB General dan RB Tematik. Evaluasi RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategi reformasi birokrasi, sedangkan RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.		

<table>
<tr><th>NO.</th><th>TUJUAN/SASARAN</th><th>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</th><th>SATUAN</th><th>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</th><th>SUMBER DATA</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th></tr>
<tr><td></td><td>11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni</td><td>22. Rata-rata nilai IKM</td><td>Mutu Pelayanan /Nilai</td><td>Jumlah nilai IKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik dikali 100</td><td>Setda</td><td>Seluruh Perangkat Daerah</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>23. Indeks Inovasi Daerah</td><td>Predikat</td><td>Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri</td><td>Kemendagri</td><td>BAPPERIDA</td></tr>
<tr><td></td><td>12. Meningkatnya e-government yang terintegrasi</td><td>24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td><td>Indeks</td><td>Tingkat kematangan (maturity level) pada domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.</td><td>Kemen PANRB</td><td>Diskominfo</td></tr>
<tr><td></td><td>13. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan</td><td>25. Nilai SAKIP</td><td>Predikat /Nilai</td><td>Perhitungan nilai dari komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun kriteria sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah.
Adapun Predikat dan Nilai AKIP ditetapkan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Predikat/ Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>AA
>90–100</td><td>Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr>
</table></td><td>Kemen PANRB</td><td>Setda
BAPPERIDA
ITDA
BPPKAD
Diskominfo
Seluruh PD</td></tr>
</table>

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				A > 80 – 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.		
				BB > 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.		
				B > 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.		
				CC > 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.		
				C > 30 – 50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.		

<table>
<tr><th>NO.</th><th>TUJUAN/SASARAN</th><th>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</th><th>SATUAN</th><th>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</th><th>SUMBER DATA</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>D
> 0 – 30</td><td>Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>26. Level Maturitas SPIP</td><td>Level</td><td>Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh BPKP. Adapun level maturitas sesuai ketentuan berikut:
<table>
<tr><th>Level</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Belum Ada</td><td>0,0<skor<1,0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rintisan</td><td>1,0≤skor≤2,0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Berkembang</td><td>2,0≤skor≤3.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0≤skor≤4,0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4,0≤skor≤4,5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Optimum</td><td>4,5≤skor≤5,0</td></tr>
</table>
</td><td>BPKP</td><td>ITDA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>27. Opini BPK</td><td>Opini</td><td>Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n</td><td>BPK</td><td>BPPKAD</td></tr>
<tr><td></td><td>14. Meningkatnya kualitas manajemen ASN</td><td>28. Indeks sistem merit</td><td>Indeks</td><td>Nilai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin,</td><td>BKN</td><td>BKPSDM</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>TUJUAN/SASARAN</th><th>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</th><th>SATUAN</th><th>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</th><th>SUMBER DATA</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>pelindungan dan pelayanan, serta sistem informasi yang dikategorikan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Kategori/ Nilai</th><th>Indeks</th><th>Sebutan</th></tr>
<tr><td>IV/325-400</td><td>0,81-1,00</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>III/250-324</td><td>0,61-0,80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>II/175-249</td><td>0,41-0,60</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>I/100-174</td><td>0,20-0,40</td><td>Buruk</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Visi 5 : Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
V.	**Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**	**9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**%**	**Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan**	Dispora-budpar	Disporabudpar
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	**%**	**Persentase penurunan konflik sosial + persentase penurunan pelanggaran trantibum dibagi 2**	Bakes-bangpol Satpol PP	Bakesbangpol Satpol PP
	15. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabudpar

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	menjadi haluan pembangunan daerah	budaya dan Kesenian yang dilestarikan				
	16. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran konflik SARA yang terjadi dikali 100	Bakes-bangpol Setda	Bakesbangpol Setda
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	Jumlah pelanggaran Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Trantibum yang terjadi dikali 100	Satpol PP	Satpol PP

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2025 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2025.

Pada tahun 2025 terjadi penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2025 dilakukan pada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kemudian ditandatangani pada 10 Januari 2025. Selanjutnya dilaksanakan Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2025 berdasarkan pelantikan Bupati Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025, pada perubahan pertama ini hanya terjadi peralihan kepemimpinan serta tidak merubah target kinerja dan anggaran. Kemudian Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 1 September 2025. Hakekatnya Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan: (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, valuasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2025 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72,27**	**72,27**
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**87,01**	**87,01**
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,49	12,49
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,30	7,30
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,39	75,39
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4) Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375–0,7724)	Madya (0,6375–0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah**	**Persen**	**82,97**	**82,97**
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	**Indeks**	**79,55**	**79,55**
		5. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	Sedang (140,00)	Sedang (140,00)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5) Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	88,31	88,31
		6) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,62	92,62
		7) Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	78	78

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
		8) Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9) Indeks kualitas air	Indeks	54	54
		10) Indeks kualitas udara	Indeks	91	91
		11) Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	63,20	63,20
		12) Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	53	53
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penaggulangan bencana	13) Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,88	0,88
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
III.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	**6. Pertumbuhan ekonomi**	**Persen**	**5±1**	**5±1**
		7. Angka Kemiskinan	**Persen**	**9,76–10,24**	**9,76–10,24**
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	3,31	3,31
		15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	4,72	4,72
		16) Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	5,55	5,55
		17) Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	3,07	3,07
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18) Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	2.643	2.643
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19) Indeks desa	Indeks	0,71	0,71
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan	20) Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,23	3,23
Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**8. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori /Nilai**	**A (83,35)**	**A (83,35)**
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22) Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (86)	B (86)
		23) Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (65,48)	Sangat Inovatif (65,48)
	13. Meningkatnya *e-government* yang terintegrasi	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,57	3,57
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25) Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)	BB (72)
		26) Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,150)
		27) Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28) Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (273)	Kategori III (273)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	**Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**Persen**	**93,23**	**93,23**
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	**Persen**	**100,00**	**100,00**
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29) Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian	Persen	93,23	93,23

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
		Tradisional yang dilestarikan			
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30) Persentase toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31) Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Terdapat beberapa perubahan pada target pada indikator sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran ke-4, target Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2025 lebih rendah dari target RPJMD dikarenakan adanya revitalisasi pengarusutamaan gender dari Kementerian PPA dimana capaian Indeks IPG, IDG dan IKG menjadi faktor pengungkit dalam penilaian APE, sedangkan capaian IPG dan IDG Kabupaten Grobogan selama 3 tahun terakhir kenaikannya rata - rata hanya ± 0,06 – 0,2 sehingga untuk target RPJMD yang semula Predikat Utama, dirasionalisasikan menjadi Madya.
2. Indikator Sasaran ke-9, target Indeks kualitas air tahun 2025 lebih rendah dari target RPJMD dikarenakan capaian kinerja fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 dari 51,05 menjadi 52,58 atau naik 1,53 sehingga target RPJMD tahun 2025 sebesar 80,51, dirasionalisasi menjadi 54
3. Indikator Sasaran ke-19, Indeks Desa Membangun (IDM) diubah menjadi Indeks Desa (ID). Hal ini mendasari ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa untuk mengukur sasaran "Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa", dengan formulasi ID dihasilkan dari total indeks Dimensi Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada tanggal 10 Januari 2025. Selanjutnya dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 20 Februari 2025 karena ada pergantian pejabat Bupati dan Wakil Bupati, dan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja pada tanggal 1 September 2025.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja

Bupati Grobogan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pelantikan Bupati Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 yang mana hanya peralihan kepemimpinan, tidak mengubah anggaran dan taakarget kinerja. Sedangkan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang di tandatangani pada 1 September 2025. Perubahan kedua ini hanya menyesuaikan dengan alokasi perubahan anggaran, maka target kinerja tujuan dan sasaran masih sama.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, serta kabupaten sekitar. Selanjutnya, dilaksanakan iventarisasi program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persen, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Target}—(\text{Realisasi}—\text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Pengukuran ketercapaian kinerja melalui perbandingan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dengan satuan persen. Kategori ketercapaian kinerja ditetapkan sebagai berikut:

1. **Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar ≥100%, dan
2. **Tidak Tercapai,** apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar <100%.

Sesuai ketentuan ketercapaian kinerja di atas, pengkategorian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel berikut:

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	≥ 91%	Kinerja Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Kinerja Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Kinerja Cukup
4.	51% ≤ 65%	Kinerja Rendah
5.	< 50%	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan persentase capaian kinerja atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika target kinerja tercapai atau capaian kinerja sebesar ≥ 100%, dan persentase capaian atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran lebih besar dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan

2. **Tidak efisien**, jika target kinerja tidak tercapai atau persentase capaian atau rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100%.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 10 (sepuluh) indikator dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2021—2026. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
MISI I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing									
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72,27**	**72,94**	**100,93**	**Sangat Tinggi**	**73,55**	**99,17**
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**86,45**	**86,65)***	**100,2**	**Sangat Tinggi**	**87,19**	**99,38**
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,49	12,58	100,72	**Sangat Tinggi**	12,36	101,78
		2. Rata-rata lama Sekolah	%	7,3	7,51	103,55	**Sangat Tinggi**	7,10	105,77
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan hidup	%	75,14	75,57	100,24	**Sangat Tinggi**	75,30	100,36
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Madya (0,6375 – 0,7724)	**Utama (0,947)**	122,60	**Sangat Tinggi**	Utama (0,7725 – 0,9074)	104,36

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%	Kategori		
	perempuan dan anak									
Misi II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana										
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.**	3.	**Tingkat Pembangunan Insfrastruktur Daerah**	**%**	**82,97**	**66,29**	**79,89**	**Tinggi**	**82,30**	**80,54**
		4.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**79,55**	**71,66**	**90.08**	**Tinggi**	**79,95**	**89,63**
		5.	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**Sedang (140,00)**	**Sedang (65,59)**	**153,15**	**Sangat Tinggi**	**Sedang (140,00)**	**153,15**
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5.	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	88,31	79	89,46	**Tinggi**	89,22	88,55
		6.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,62	92,40	99,76	**Sangat Tinggi**	92,90	99,46
		7.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	78	77,79	99,73	**Sangat Tinggi**	76,28	101,98
		8.	Kinerja Lalu Lintas (V/C *ratio*)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,332)	124,55	**Sangat Tinggi**	B (0,20-0,44)	124,55
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	9.	Indeks Kualitas Air	Indeks	54	72,28	133,85	**Sangat Tinggi**	80,95	89,29
		10.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91	73,52	80,79	**Tinggi**	87,88	83,66
		11.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	63,2	67,14	106,23	**Sangat Tinggi**	63,55	105,65
		12.	Indeks Kinerja Pengelolaa	Indeks	53,00	46,93	88,55	**Tinggi**	50,00	93.86

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
		n Sampah							
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88	0,88	100	**Sangat Tinggi**	0,72	122,22
Misi III:	**Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing**								
III.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	6. **Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5±1**	**5,49**	**109,80**	**Sangat Tinggi**	**6±1**	**90,17**
		7. **Angka Kemiskinan**	**%**	**9,76–10,24**	**10,63**	**92,19**	**Sangat Tinggi**	**9,23 – 9,81**	**91,64**
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	3,31	-0,55	-16,62	**Sangat Rendah**	1,23	-44,72
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	4,72	5,52	116,95	**Sangat Tinggi**	1,48	372,97
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	5,55	7,62	137,30	**Sangat Tinggi**	2,63	289,73
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	3,01	2,26	75,08	**Cukup**	1,53	147,71
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	2643	3740	141,51	**Sangat Tinggi**	4.391,539	85,16
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial	19. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71	0,77	108,45	**Sangat Tinggi**	0,72	104,17

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
	ekonomi dari tingkat desa								
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	20. Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,40	1,40	100,00	**Sangat Tinggi**	1,40	100,00
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,23	3,12	103,41	**Sangat Tingg**	4,00	122,00
Misi IV: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	8. **Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori /Indeks**	**A (83,35)**	**A (87,38)**	**104,84**	**Sangat Tinggi**	**BB (75,00)**	**116,51**
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Kategori/Nilai	B (86,00)	B (86,77)	100,90	**Sangat Tinggi**	B (79,70)	108,87
		23. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (65,48)	Sangat Inovatif (74,76)	114,17	**Sangat Tinggi**	Sangat Inovatif	114,17
13.	Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,57	3,57)*	100,00	**Sangat Tinggi**	3,50	102,00
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat/Nilai	BB (72)	B (66,48)	92,33	**Sangat Tinggi**	BB (73,50)	90,45
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,150)	Level 3 (2,974)	94,41	**Sangat Tinggi**	Level 3 (3,15)	94,41
		27. Opini BPK	Opini	WTP	WTP)**	100,00	**Sangat Tinggi**	WTP	100,00
15.	Meningkatnya kualitas	28. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori III (255)	Kategori III (273))***	100 %	**Sangat Tinggi**	Kategori III (260)	105,00

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
	manajemen ASN								
Misi V: Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat									
V.	**Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**	9. **Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**%**	**66,49**	**68,1**	**104,90**	**Sangat Tinggi**	**82,94**	**82,11**
		10. **Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Sangat Tinggi**	**100,00**	**100,00**
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	66,49	68,1	104,90	Sangat Tinggi	82,94	82,11
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100,00	100,00	**Sangat Tinggi**	100,00	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100,00	100,00	**Sangat Tinggi**	100,00	100,00

*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2024 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir
**) Capaian tahun 2024 dikarenakan hingga laporan disusun belum disampaikan nilainya.
***) Capaian tahun 2023, dikarenakan hingga tahun 2025 belum dilaksanakan kembali penilaian.

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai ketercapaian dan skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	2	100,58	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3	107,77	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	2	103,00	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	104,84	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	2	102,24	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Tujuan		**10**	**104,00**	**Sangat Tinggi**
Rata-rata capaian kinerja per Tujuan		**5**	**103,71**	**Sangat Tinggi**

Tabel 3. 4
Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Tujuan	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	5	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
Jumlah		5	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 dari lima tujuan yang ditetapkan, semuanya tercapai (≥100,00%) dan berkinerja sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja antara 100,58% sampai 107,77%.

Tabel 3. 5
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	2	101,80	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,24	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	1	122,60	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	4	103,37	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	4	102,36	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	1	100	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	4	78,18	Tinggi
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	1	141,51	Sangat Tinggi
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	1	108,45	Sangat Tinggi
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	100,00	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	1	103,41	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	2	107,53	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi	1	100	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	3	95,58	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	100	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	1	104,90	Sangat Tinggi
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	2	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Sasaran		**31**	**100,71**	**Sangat Tinggi**
Rata-rata capaian kinerja Sasaran		**17**	**104,11**	**Sangat Tinggi**

Pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	16	94,00
2.	Kinerja Tinggi	1	6,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00

5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
	Jumlah	17	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari sebanyak 17 sasaran yang ditetapkan, menunjukkan sebanyak 16 sasaran berkinerja sangat tinggi dengan realisasi capaian ≥91% yaitu antara 98,58% sampai dengan 141,51%, dan 1 Sasaran berkinerja tinggi dengan realisasi sebesar 78,18%.

Fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022—2025

No.		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
I.	**1.**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**70,97**	**71,49**	**72,94**	**72,94**
	2.	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Indeks**	**86,18**	**86,23**	**86,4**	**86,65**
	1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	12,46	12,48	12,58
	2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,26	7,28	7,29	7,51
	3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,93	75,04	75,24	75,57
	4.	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya	Madya	Utama	Utama
II.	**3.**	**Tingkat pembangunan infrastruktur daerah**	**%**	**86,07**	**86,46**	**82,97**	**66,2852**
	4.	**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**Indeks**	**69,43**	**67,12**	**69,21**	**71,66**
	5.	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**Sedang (111,59)**	**Sedang (97,03)**	**Sedang (85,91)**	**65,59**
	5.	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	86,07	86,46	79,97	79
	6.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	96,12	91,80	91,8	92,4
	7.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,93	76,14	77,14	77,79
	8.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,27)	B (0,21)	B (0,31)	0,332
	9.	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,26	51,05	52,58	72,28
	10.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,56	86,87	90,8	73,52

No.		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
	11.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	53,09	58,16	57,83	67,14
	12.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	48,09	52,73	52,55	46,93
	13.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,81	0,83	0,87	0,88
III.	**6.**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,98**	**4,89**	**5,41**	**5,49**
	7.	**Angka Kemiskinan**	**%**	**11,80**	**11,72**	**11,43**	**10,63**
	14.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	2,25	0,17	3,31	-0,55
	15.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	3,77	5,10	4,72	5,52
	16.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	5,50	6,88	5,55	7,62
	17.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	6,39	3,09	3,01	2,26
	18.	Nilai investasi di daerah	Milyar Rupiah	8.658.007	2.159.525	2.643.826	3.740.432
	19.	Indeks Desa	Indeks	-	-	0,75	0,77
	20.	Persentase penurunan PPKS	%	1,35	1,40	1,4	1,4
	21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	4,02	3,23	3,12
IV.	**8.**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori /Nilai**	**B 66,25**	**BB 73,86**	**A (82,35)**	**A (87,38)**
	22.	Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (83,08)	B (83,13)	84,5	87,37
	23.	Indeks inovasi daerah	Indeks	Inovatif 56,65	Inovatif 63,85	Sangat Inovatif 65,48	Sangat Inovatif 74,76
	24.	Indeks SPBE	Indeks	3,37	3,37	3,57	3,57)**
	25.	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	B (63,27)	B (64,25)	B (65,93)	B (66,48)
	26.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,201)	Level 3 (3,319)	Level 3 (2,974)
	27.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP)**
	28.	Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (192,5)	Kategori III (273,00)	Kategori III (273,00)	Kategori III (273,00)***
V.	**9.**	**Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**%**	**80,00**	**80,00**	**64,92**	**68,1**
	10.	**Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
29.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	80,00	80,00	64,92	68,1
30.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00

*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2024 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir
**) Capaian tahun 2024 dikarenakan hingga laporan disusun belum disampaikan nilainya.
***) Capaian tahun 2023, dikarenakan hingga tahun 2025 belum dilaksanakan kembali penilaian.

Berdasarkan fluktuasi realisasi indkator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2022-2025, dapat dilihat bahwa rata-rata *trend* capaian indikator tersebut menunjukkan peningkatan dan perbaikan.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam subbab sebelumnya. Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD tahun 2021—2026. Penyajian untuk subbab ini akan jabarkan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

a. Tujuan 1

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan **meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan** diformulasikan dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan realisasi capaian sebesar 100,69% dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan realisasi capaian sebesar 99,36%. Kategori kinerja kedua indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 100,03%. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Target dan Realisasi Tujuan 1

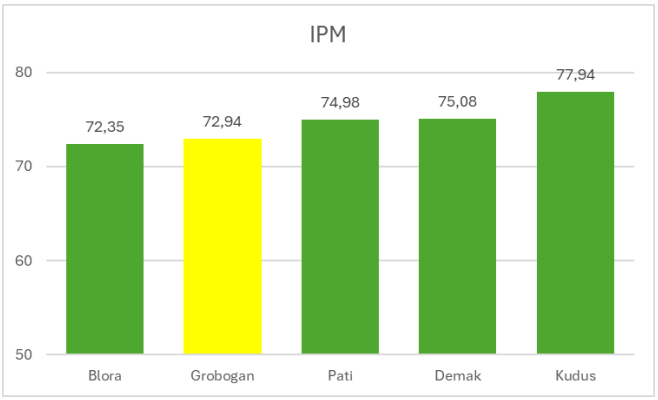
No.	Tujuan		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,27	72,94	100,93	73,55	99,17
		2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,45	86,65	100,23%	87,19	99,38%
	Rata-rata capaian						100,58		99,28

Sumber: BPS dan hasil olah data

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100). Tahun 2025 Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori IPM tinggi, yakni sebesar 72,94 dari yang ditargetkan sebesar 72,27. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, IPM Kabupaten Grobogan masih tertinggal, kecuali dengan Kabupaten Blora. IPM Kabupaten Grobogan apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya adalah sebagai berikut :

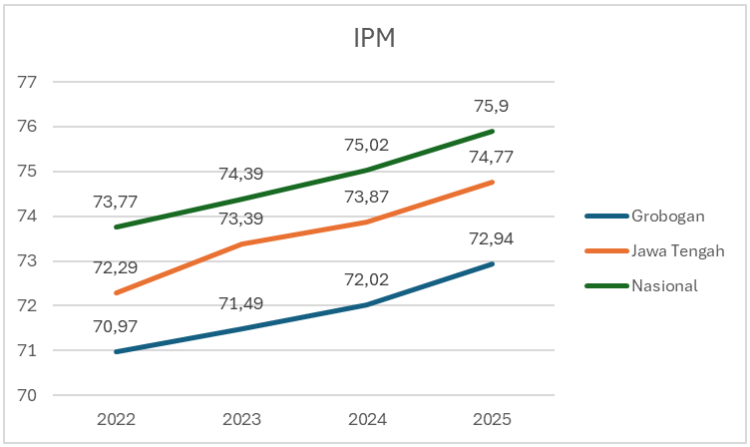
Grafik 3. 1 Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan kabupaten sekitar



Sumber: BPS

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2025 jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional sebagai berikut:

Grafik 3. 2
Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber: BPS

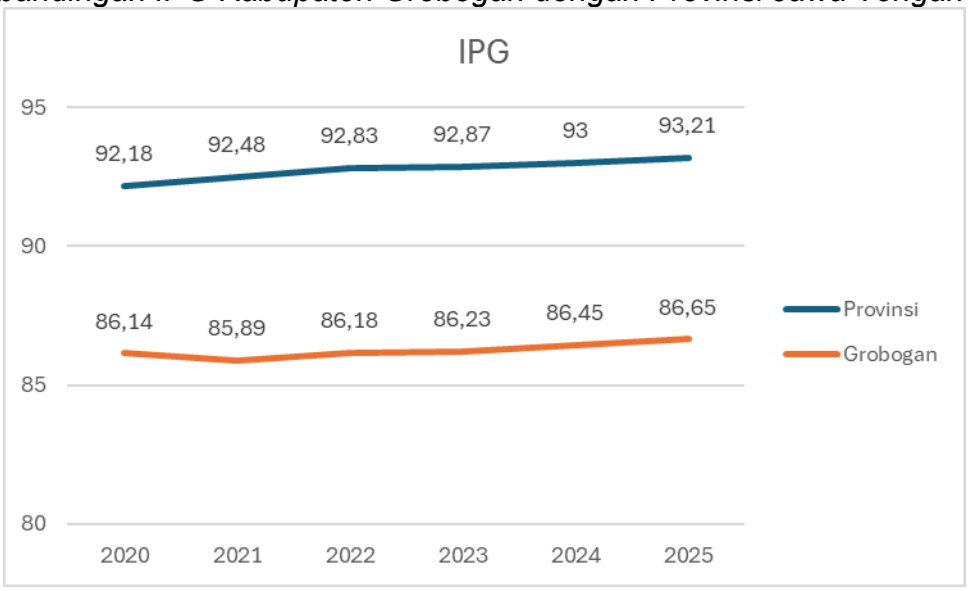
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2022 sampai 2025 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah maupun IPM Nasional.

Adapun IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM,

namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-laki..

Realisasi IPG Kabupaten Grobogan tahun 2025 dari BPS belum dirilis, sehingga data IPG Tahun 2025 dihitung menggunakan proyeksi dari capaian tahun 2022 ke 2024 yaitu selisih kenaikan sebesar 0,20 ditambahkan IPG Tahun 2024 sebesar 86,45, maka dapat diproyeksikan capaian IPG 2025 adalah sebesar 86,65. Capaian IPG Kabupaten Grobogan, dari target yang ditetapkan sebesar 87,01 tercapai 86,65, sehingga persentase capaiannya sebesar 99,36%. Data IPG tahun 2020 sampai tahun 2025 Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut:

Grafik 3. 3
Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah



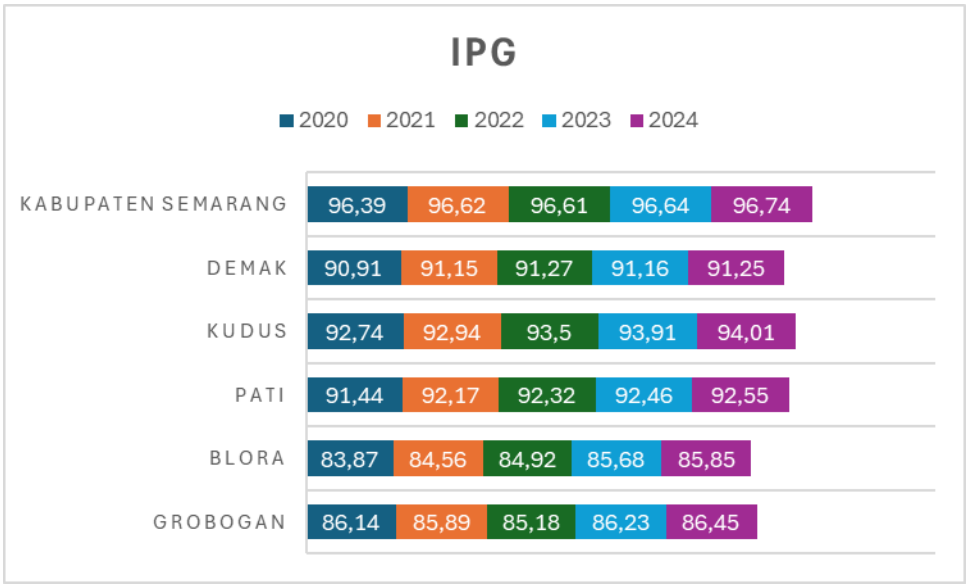
Sumber: BPS
Data Tahun 2025 hasil proyeksi dari data 2022-2025

Berdasarkan grafik 3.3 di atas diketahui bahwa nilai IPG Kabupaten Grobogan lima tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPG Kabupaten Grobogan masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Demikian juga jika dibandingkan dengan IPG pada kabupaten di sekitarnya, IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024 Kabupaten Grobogan juga masih tertinggal kecuali dengan Kabupaten Blora.

Gambaran IPG Tahun 2020-2024 Kabupaten Grobogan dan kabupaten di sekitarnya adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 4
Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya



Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan erat dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, maupun pendapatan perempuan. Untuk meningkatkan indeks tersebut tentunya upaya peningkatan pembangunan manusia berbasis gender harus terus dilakukan.

.

b. Sasaran pada Misi Ke-1

b.1. Sasaran 1

Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, ditentukan 2 (dua) indikator sasaran yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian kinerja sebesar 101,13% dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan capaian kinerja sebesar 103,55%. Kinerja sasaran 1 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja Sasaran 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 9
Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1.	Harapan Lama Sekolah	%	12,49	12,58	100,72	12,36	101,78
		2.	Rata-rata Lama Sekolah	%	7,3	7,51	103,55	7,10	105,77
Rata-rata Capaian							**101,80**		**103,78**

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja Sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data di atas, realisasi capaian sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan dengan rata-rata capaian sebesar 101,80%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian sasaran 1 juga telah mencapai target dengan capaian rata-rata sebesar 103,78%.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	237.027.968.000	171.618.371.595	170.482.828.876	99,34%
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	133.000.000	115.157.535	86,58%
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.235.253.000	974.206.000	935.834.947	96,06%
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	125.000.000	350.400.000	341.467.734	97,45%
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.405.000.000	10.696.000.000	10.580.453.793	98,92%
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00%
Jumlah		**246.093.221.000**	**185.071.977.595**	**183.755.742.885**	**99,29%**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran

tersebut sebesar Rp 183.755.742.885 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran sebesar Rp 185.071.977.595 atau terealisasi sebesar 99,29%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan yang menjadi faktor penghambat/kendala Sasaran 1 adalah sebagai berikut:

a. Harapan Lama Sekolah

Faktor Keberhasilan:

1. **Inventarisasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS)**

   Pendataan menyeluruh terhadap ATS merupakan fondasi krusial dalam memetakan besaran dan detail permasalahan di lapangan. Langkah ini merefleksikan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan isu akses pendidikan.

2. **Sinergi Sektor Swasta melalui Program Beasiswa**

   Kemitraan strategis dengan dunia usaha dalam penyaluran beasiswa berfungsi sebagai solusi finansial konkret bagi ATS. Dukungan ini memangkas hambatan ekonomi, sehingga mereka dapat kembali mengenyam pendidikan formal.

3. **Reintegrasi ATS ke Satuan Pendidikan**

   Program pengembalian anak ke sekolah adalah manifestasi kepedulian terhadap masa depan generasi muda, yang sekaligus berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi pendidikan di tingkat lokal.

4. **Kolaborasi Multisektoral Penanganan ATS**

   Implementasi penanganan ATS di Kabupaten Grobogan sejak 2024 dijalankan melalui proyek percontohan di empat desa. Program ini mengintegrasikan peran Pusdatin Kemendikdasmen, UNICEF, Pemerintah Provinsi Jateng, Pemkab Grobogan, Kemenag, serta PKBM.

Faktor Penghambat/kendala:

1) Angka ATS masih cukup tinggi

Narasi menunjukkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah masih tinggi, yang mencerminkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil belum cukup efektif atau belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran.

2) Kurangnya Akses yang Merata

Tidak semua ATS mungkin memiliki akses terhadap program bantuan, seperti beasiswa atau fasilitas pendukung lainnya, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau wilayah yang kurang terjangkau.

3) Faktor Sosial dan Ekonomi yang Kompleks

Tidak semua permasalahan ATS dapat diselesaikan dengan pemberian beasiswa saja. Faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, atau kebutuhan untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga dapat menghambat upaya ini.

4) Ketidakpastian Keberlanjutan Program

Tidak disebutkan apakah upaya ini bersifat berkelanjutan atau terintegrasi dengan kebijakan pendidikan yang lebih luas. Kedepan mungkin program penanganan ATS tetap berlanjut namun bisa dalam program yang berbeda.

Kesimpulan:

Langkah-langkah seperti pendataan ATS, pelibatan dunia usaha, dan pengembalian ATS ke sekolah merupakan inisiatif positif yang dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Namun demikian, meskipun capaian kinerja tercapai, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti jumlah ATS yang tinggi, kesenjangan akses, dan kompleksitas masalah sosial-ekonomi. Pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang merata dan program yang berkelanjutan, diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah yang melebihi target (103,55%) mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu.

Faktor Keberhasilan:

1. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan
   Pembangunan dan renovasi gedung SD serta SMP menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengurangi angka putus sekolah.
2. Peningkatan Kompetensi Guru
   Pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas pengajaran, yang berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
3. Indikator Kinerja yang Meningkat
   Kenaikan persentase akreditasi satuan pendidikan minimal B menunjukkan bahwa lebih banyak sekolah memenuhi standar kualitas. Penurunan angka putus sekolah juga menjadi salah satu indikator keberhasilan yang signifikan.
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Secara Masif
   Upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara masif memastikan bahwa kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, yang merupakan fondasi penting dalam memperkuat sistem pendidikan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

Meskipun rata-rata lama sekolah mencapai 103,55%, angka ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Fokus pada kuantitas perlu diseimbangkan dengan upaya peningkatan mutu. Adapun yang menjadi faktor penghambat/kendala/tantangan sebagai berikut:

1. **Ketimpangan Sebaran Sarana dan Prasarana**
   Meskipun pengadaan fasilitas dilakukan secara masif, distribusinya belum sepenuhnya merata. Area tertinggal dan pelosok disinyalir masih menghadapi hambatan aksesibilitas akibat keterbatasan infrastruktur pendidikan yang belum standar.
2. **Disparitas Kualitas Tenaga Pendidik**
   Kendati pelatihan guru dilakukan secara rutin, efektivitas implementasi kompetensi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan. Hal ini menciptakan perbedaan kualitas pengajaran yang cukup mencolok antara sekolah di pusat kota dengan daerah pedalaman.
3. **Potensi Reduksi Orientasi pada Standar Akreditasi**
   Fokus yang terlalu besar pada pencapaian akreditasi minimal B berisiko menciptakan formalitas semata. Hal ini dikhawatirkan mengesampingkan aspek krusial lainnya, seperti inovasi kurikulum lokal dan penguasaan soft skills abad 21 bagi siswa.
4. **Residua Angka Putus Sekolah yang Persisten**
   Walaupun tren putus sekolah menurun, belum tercapainya angka nol menunjukkan bahwa faktor sosio-ekonomi dan kendala akses masih menjadi akar permasalahan yang belum sepenuhnya tuntas diatasi.

Kesimpulan

Keberhasilan dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, pengadaan sarana prasarana, dan kompetensi guru telah menunjukkan hasil positif yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan. Namun, beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, dan angka putus sekolah yang belum sepenuhnya nol tetap memerlukan perhatian dan strategi yang lebih komprehensif. Pendekatan yang lebih holistik dapat membantu memperkuat hasil ini di masa mendatang.

b.2. Sasaran 2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator usia harapan hidup. Kinerja sasaran tercapai dengan realisasi sebesar 100,13%, kinerja ini dikategorikan sangat tinggi. Adapun data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11
Target dan Realisasi Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	%	75,39	75,57	100,24%	75,3	100,36%

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja Sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan melalui indikator kinerja usia harapan hidup dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,39 telah tercapai sebesar 75,57, atau persentase sebesar 100,24%. Artinya kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 2 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170.883.209.500	101.805.317.000	95.649.653.255	93,95%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	189.965.500	1.121.099.700	1.112.426.537	99,23%

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	502.131.000	304.967.000	271.766.317	89,11%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.419.180.000	308.966.600	251.366.000	81,36%
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	350.530.000	380.530.000	362.065.300	95,15%
6.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.514.145.100	4.465.169.100	4.394.735.263	98,42%
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	38.002.900	38.002.900	37.308.915	98,17%
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	60.000.000	60.000.000	59.665.370	99,44%
Jumlah		**177.957.164.000**	**108.484.052.300**	**102.138.986.957**	**94,15%**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp **102.138.986.957** dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran sebesar Rp **108.484.052.300** sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 94,15%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Akselerasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tren positif dalam pencapaian rata-rata SPM setiap tahunnya mencerminkan transformasi kualitas layanan kesehatan publik. Keberhasilan ini menjadi salah satu pilar utama yang mendorong peningkatan angka usia harapan hidup di Kabupaten Grobogan.
2. Reduksi Signifikan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) Keberhasilan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi merupakan capaian strategis yang berdampak langsung pada penguatan indikator usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Grobogan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, termasuk penambahan dua RSUD baru, telah memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kuratif dan rujukan, yang meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

4. Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas

   RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi mencapai akreditasi kategori Paripurna, dan semua Puskesmas di Kabupaten Grobogan berhasil mendapatkan akreditasi tertinggi. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat berkontribusi pada usia harapan hidup yang lebih tinggi.

5. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk

   Penurunan angka prevalensi Balita dengan gizi buruk, meskipun fluktuatif, menjadi indikator adanya upaya nyata dalam meningkatkan status gizi anak-anak, yang merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesehatan generasi muda.

Faktor penghambat/kendala/tantangan

1. Fluktuasi dalam Penurunan Gizi Buruk

   Meskipun prevalensi gizi buruk mengalami penurunan, sifatnya yang fluktuatif menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya konsisten atau efektif di seluruh wilayah.

2. Kesenjangan Akses Layanan

   Meskipun pembangunan fasilitas kesehatan bertambah, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil, yang dapat memengaruhi peningkatan usia harapan hidup secara keseluruhan.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengurangan angka kematian ibu dan bayi, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Grobogan. Namun, tantangan seperti

ketidakkonsistenan penanganan gizi buruk dan potensi ketimpangan akses layanan kesehatan perlu di atasi untuk memastikan keberlanjutan tren positif ini.

b.3. Sasaran 3

Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak dipenuhi dengan diperolehnya Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dari target kategori APE madya, terealisasi kategori madya, sehingga capaiannya sebesar 100,00%, artinya sasaran 3 tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Tabel 3. 13
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	Utama 0,947	122,60%	Utama (0,7725 – 0,9074)	104,36%

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran 3 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengendalian Penduduk	504.404.200	622.340.200	544.813.050	87,54%
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.012.055.800	5.851.688.400	5.533.476.315	94,56%
3.	Program Pemberdayaan dan	7.652.055.000	7.841.949.000	7.777.734.400	99,18%

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
	Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	693.405.800	515.653.200	490.222.150	95,07%
5.	Program Perlindungan Perempuan	10.200.000	10.200.000	9.505.600	93,19%
6.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	63.713.400	100.513.400	97.663.400	97,16%
7.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	46.685.000	40.052.000	37.278.500	93,08%
8.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	373.771.400	291.788.500	276.626.404	94,80%
	Jumlah	**15.356.290.600**	**15.274.184.700**	**14.767.319.819**	**96,68%**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 14.767.319.819 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 15.274.184.700, sehingga terealisasi sebesar 96,68%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Penilaian Mandiri APE

   Pencapaian target APE menunjukkan atas komitmen dan upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Ini mencerminkan adanya dedikasi untuk mewujudkan keadilan sosial.

2. Pengoptimalan Peran Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG)

   FKKG berhasil menjadi platform konsultasi dan penganjur dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Peran ini mendukung percepatan pencapaian kesetaraan gender dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan, dan regulasi.

3. Keterlibatan Perangkat Daerah dalam PUG

   Komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung PUG dan meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, dan sosial memperlihatkan langkah nyata untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Peningkatan Kapasitas melalui Komponen Penilaian APE

   Komponen penilaian APE seperti komitmen, kebijakan, kelembagaan, serta penyediaan data dan alat analisis gender berhasil mendorong tata kelola yang lebih berorientasi pada kesetaraan dan hak perempuan serta anak.

5. Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

   Inisiatif pembentukan desa yang ramah perempuan dan peduli anak menjadi langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak perempuan dan anak di tingkat komunitas.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan

1) Keterbatasan Partisipasi Masyarakat Secara Menyeluruh

   Meskipun partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penilaian APE, belum tentu semua lapisan masyarakat terlibat secara aktif. Ketimpangan dalam kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap isu gender bisa menjadi penghambat.

2) Konsistensi Implementasi PUG di Semua Wilayah

   Tidak semua perangkat daerah mungkin menerapkan PUG dengan tingkat konsistensi yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan disparitas dalam pencapaian kesetaraan gender di berbagai wilayah.

3) Tantangan dalam Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

   Meski pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak adalah langkah yang positif, tantangan dalam mengintegrasikan inisiatif ini dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kekurangan sumber daya bisa menghambat keberlanjutan.

4) Masih Terbatasnya Partisipasi Perempuan di Tingkat Tinggi

Upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, dan sosial masih menghadapi hambatan, seperti stereotip budaya dan kurangnya representasi perempuan di posisi pengambilan keputusan.

5) Penguatan Data dan Alat Analisis Gender

Meski data gender dan alat analisis sudah menjadi bagian dari penilaian APE, tantangan dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, dan terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah, yang penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam mendapatkan penghargaan APE, pembentukan FKKG, dan pengembangan desa ramah perempuan serta peduli anak mencerminkan kemajuan nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan serta anak. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, perlu ditangani tantangan seperti kesenjangan partisipasi masyarakat, konsistensi implementasi PUG, dan penguatan data gender. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kesetaraan gender dapat terus diperjuangkan secara berkelanjutan.

2. Misi 2

Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

a. Tujuan 2

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator tujuan yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan realisasi capaian sebesar 79,89%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi capaian sebesar 90,08%, dan Indeks Risiko Bencana dengan realisasi capaian sebesar 153,15%. Kinerja capaian ketiga indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi

dengan rata-rata capaian sebesar 107,71%. Data capaian kinerja tujuan 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 15
Target dan Realisasi Tujuan 2

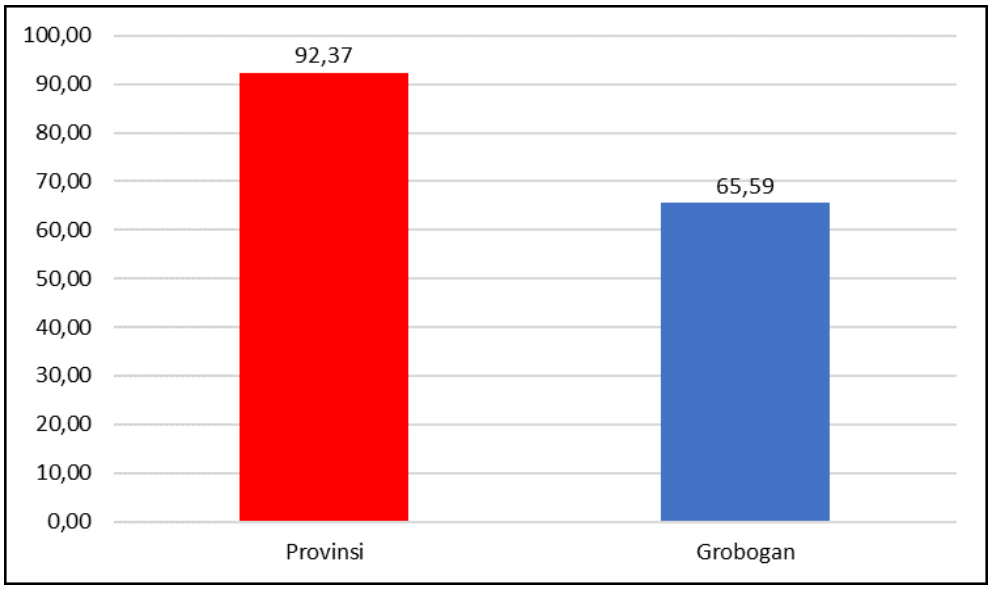
No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	82,97	66,2852	79,89	82,30	80,54
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55	71,66	90,08	79,95	89,63
		3. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140,00)	Sedang (65,59)	153,15	Sedang (140,00)	153,15
		Rata-rata capaian				107,71		107,77

Sumber: DPUPR, Disperakim, DLH dan BPBD

Meskipun kinerja tujuan 2 terealisasi dengan rata-rata capaian sebesar 107,71%, namun demikian masih ditemukan indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai (<100%) yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan target persentase 82,97% hanya tercapai 66,2852% dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup dengan target indeks 79,16 hanya tercapai 69,21. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, rata-rata realisasi telah mencapai target dengan capaian sebesar 107,77%.

Indeks Risiko Bencana Tahun 2025, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah. Semakin rendah indeks risiko bencana, semakin tinggi upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, sebagaimana data di bawah ini:

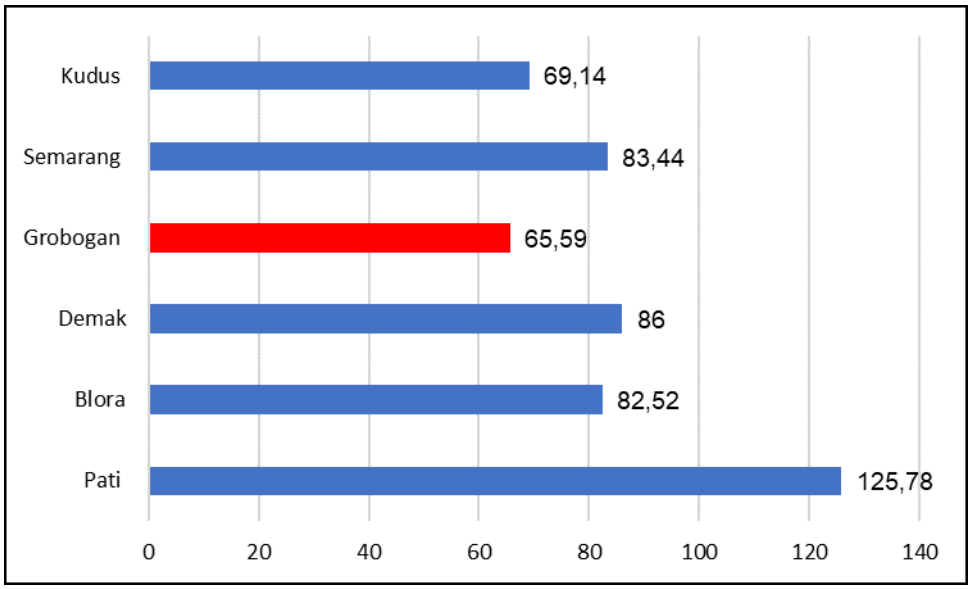
Grafik 3. 5 Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Provinsi Tahun 2025



Sumber: BPS

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Grobogan masih termasuk baik dalam upaya penanggulangan bencana dibanding dengan Kabupaten Demak, Blora dan Pati, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 6 Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025



Sumber: BPS

b. Sasaran pada Misi Ke-2

b.1. Sasaran 4

Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengukuran kinerja sasaran kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni, dan knerja lalu lintas (V/C *ratio*) yang secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 16
Target dan Realisasi Sasaran 4

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	2.	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	88,31	79,00	89,46	89,22	88,55
		3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,62	92,40	99,76	92,90	99,46
		4.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	78,00	77,79	99,73	76,28	101,98
		5.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,332)	124,55	B (0,20-0,44)	124,55
Rata-rata Capaian							**103,37**		**103,63**

Sumber: DPUPR, Disperakim, dan Dishub

Pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian sasaran 4 yang terdiri dari 4 (empat) indikator mempunyai rata-rata capaian kinerja sebesar 103,37%. Dari 4 (empat) indikator

tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target (capaian <100,00%), yaitu Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 89,46%, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan capaian kinerja sebesar 99,76% dan Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni dengan capaian kinerja sebesar 99,73%.

Capaian kinerja indikator persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik diperoleh melalui persentase jalan kondisi mantap dan irigasi kondisi mantap. Dari target yang ditetapkan sebesar 88,31% terealisasi sebesar 79,00%, sehingga persentase capaiannya sebesar 89,46%. Capaian kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dihitung melalui perbandingan realisasi RTRW terhadap rencana peruntukannya. Target yang ditetapkan sebesar 92,62% dan terealisasi sebesar 92,40%, sehingga capaiannya sebesar 99,76%. Untuk indikator persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni ditetapkan target sebesar 78,00% dan terealisasi sebesar 77,79% dengan persentase capaian sebesar 99,73%. Sedangkan indikator kinerja lalu lintas (V/C *ratio*) ditetapkan pada kategori B dengan skor 0,20-0,44 dan tercapai kategori B skor 0,332, sehingga persentase capaiannya sebesar 124,55%.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 17
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	43.827.580.451	8.798.401.331	8.612.447.315	97,89%
2.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.012.960.250	571.152.000	554.256.950	97,04%
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.064.516.000	2.981.329.000	2.788.901.750	93,55%
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.685.179.000	11.160.280.678	11.017.365.607	98,72%

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.829.981.580	2.244.299.440	2.175.082.500	96,92%
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.400.393.050	2.099.393.050	2.017.122.800	96,08%
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	74.429.033.559	10.903.009.110	10.440.226.310	95,76%
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	498.510.000	246.827.000	232.852.150	94,34%
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.200.689.000	973.320.000	945.935.000	97,19%
10.	Program Penatagunaan Tanah	447.552.000	546.552.000	506.259.185	92,63%
11.	Program Pengembangan Perumahan	278.208.000	664.808.000	648.939.970	97,61%
12.	Program Kawasan Permukiman	1.900.000.000	241.200.000	170.347.800	70,63%
13.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.077.478.400	9.785.790.400	9.747.077.531	99,60%
14.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.594.939.000	750.749.000	736.407.400	98,09%
15.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.104.232.200	15.033.860.307	14.229.031.329	94,65%
Jumlah		**177.351.252.490**	**67.000.971.316**	**64.822.253.597**	**96,75%**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebesar Rp 64.822.253.597,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran Rp 67.000.971.316,00 atau realisasi sebesar 94,65%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

a. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Dampak Cuaca Ekstrem dan Banjir

Curah hujan ekstrem di Kabupaten Grobogan pada akhir Desember 2024 hingga awal Maret 2025, yang mencapai 400-500 mm di atas normal, memicu banjir besar dan arus deras akibat tanggul jebol yang berdampak signifikan pada

penurunan kemantapan jalan daerah. Tingginya intensitas genangan menyebabkan air meresap ke dalam tanah dasar (*subgrade*) bersifat ekspansif, sehingga tanah menjadi lunak, berlumpur, dan kehilangan daya dukung stabilitas pondasinya, terutama pada perkerasan beton setapak yang tidak kedap air. Akibatnya, kerusakan jalan diproyeksikan mencapai panjang kurang lebih 33 km, yang setara dengan penurunan kondisi kemantapan jalan sebesar 3,5% dari total panjang jaringan jalan milik Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2) Kendala Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran menjadi tantangan utama yang memengaruhi kecepatan dan cakupan proyek perbaikan jalan. Dari Ketiga komponen yaitu Tingkat Kemantapan Jalan, Drainase dan Sumber Daya Air, Tingkat Kemantapan Drainase menperoleh persentase paling rendah. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia pada tahun 2025 ternyata tidak mencukupi untuk menangani kerusakan drainase. Hal ini mengindikasikan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih optimal di masa mendatang.

Rekomendasi untuk mengatasi kendala

1) Penentuan Skala Prioritas Proyek

Langkah strategis dalam menentukan prioritas proyek pembangunan dan perbaikan jalan sangat penting untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia dan memastikan pengerjaan yang efisien.

2) Mitigasi Risiko Bencana Alam

Mitigasi risiko cuaca ekstrem, seperti penerapan teknologi konstruksi tahan banjir dan peningkatan sistem drainase, harus menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur untuk mengurangi dampak kerusakan di masa depan.

3) Optimalisasi Efisiensi Anggaran

Perencanaan anggaran yang lebih detail dan penggunaan sumber daya secara efisien dapat mendukung percepatan proyek dan memperluas cakupan perbaikan jalan.

4) Pemanfaatan Teknologi dan Data

Menggunakan teknologi terkini dan analisis data dapat membantu dalam memetakan area prioritas dan mengelola proyek secara lebih efektif.

Kesimpulan:

Perlunya evaluasi mendalam terhadap capaian yang belum mencapai target akibat cuaca ekstrem dan keterbatasan anggaran. Dengan langkah antisipatif seperti prioritasisasi proyek, mitigasi risiko bencana, dan efisiensi anggaran, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai target yang lebih optimal di masa depan.

b. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketidaksesuaian Pelaksanaan Program dengan RTRW

Banyaknya program yang tidak dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang direncanakan dalam RTRW menjadi kendala utama, yang menyebabkan penurunan efektivitas dalam optimalisasi tata ruang. Ketidaksesuaian ini mengurangi dampak positif dari program yang direncanakan.

2) Keterbatasan Informasi dari Instansi terkait

Kendala dalam memperoleh informasi program dari instansi pusat, provinsi, dan non-pemerintah menghambat proses evaluasi yang komprehensif. Ketergantungan pada informasi dari OPD tingkat provinsi dan beberapa instansi pusat menciptakan celah besar dalam identifikasi program.

3) Koordinasi Antarinstansi yang Kurang Optimal

Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tata ruang menyebabkan kurangnya sinkronisasi dan

harmonisasi antara pelaksanaan program dan perencanaan tata ruang yang telah dirumuskan.

4) Evaluasi yang Tidak Menyeluruh

Keterbatasan data dan informasi menyebabkan evaluasi tata ruang tidak mencakup semua program yang relevan. Hal ini mengakibatkan potensi keberhasilan dari program yang sejalan dengan RTRW tidak dapat diukur secara penuh.

Rekomendasi:

1) Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

Membentuk mekanisme koordinasi yang lebih kuat di antara instansi pusat, provinsi, dan non-pemerintah untuk menyelaraskan program dengan rencana tata ruang.

2) Integrasi Sistem Informasi

Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap dan akurat terkait program, sehingga mempermudah proses evaluasi.

3) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Penguatan pengawasan berbasis geospasial, percepatan integrasi RDTR ke OSS, penertiban pelanggaran, serta peningkatan koordinasi dan sosialisasi tata ruang perlu dilakukan secara konsisten agar target tahun 2026 dapat tercapai.

4) Peningkatan Kapasitas Evaluasi

Melengkapi alat evaluasi dan data yang diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program secara lebih menyeluruh dan tepat waktu.

Kesimpulan:

Pencapaian target kesesuaian pemanfaatan ruang memerlukan evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi hambatan struktural yang ada. Fokus perbaikan perlu diarahkan pada sinkronisasi pelaksanaan program dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penguatan koordinasi lintas instansi yang selama ini dinilai belum optimal.

c. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketergantungan pada Sumber Dana Tambahan

Meskipun pendanaan tambahan mendukung realisasi proyek, ketergantungan yang tinggi pada APBN, CSR, dan lembaga donor dapat menjadi risiko jika sumber pendanaan ini tidak konsisten atau berubah di masa depan.

2) Kesenjangan dalam Pemerataan Infrastruktur

Keberhasilan mungkin belum dirasakan secara merata di semua wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dasar.

3) Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Lokal

Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan atau berkolaborasi dengan pihak swasta, sehingga potensi pembangunan infrastruktur bisa menjadi tidak optimal di beberapa wilayah.

4) Ketahanan Infrastruktur terhadap Tantangan Eksternal

Infrastruktur yang dibangun mungkin menghadapi tantangan seperti perubahan iklim atau bencana alam, yang dapat merusak hasil pembangunan jika tidak ada langkah mitigasi risiko yang memadai.

5) Monitoring dan Evaluasi Proyek

Tidak disebutkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Tanpa pengawasan yang ketat, proyek pembangunan berisiko tidak berjalan sesuai rencana atau gagal mencapai target yang diharapkan.

Rekomendasi:

1) Peningkatan Kemandirian Daerah

Mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proyek infrastruktur.

2) Pemerataan Pembangunan

Memastikan akses terhadap infrastruktur dasar merata, terutama untuk daerah terpencil, melalui kebijakan yang lebih inklusif.

3) Mitigasi Risiko Bencana

Meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap tantangan seperti banjir atau perubahan iklim dengan menggunakan teknologi dan material yang lebih adaptif.

4) Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Menerapkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal.

Kesimpulan:

Akselerasi pemenuhan akses air minum, sanitasi, dan rumah layak huni masih terkendala oleh struktur pendanaan yang belum mandiri dan distribusi pembangunan yang belum merata. Kurangnya kompetensi teknis di tingkat lokal serta infrastruktur yang belum tangguh terhadap gangguan eksternal mengakibatkan capaian realisasi berada di bawah target nasional. Diperlukan transformasi strategi yang berfokus pada penguatan kapasitas daerah dan diversifikasi sumber pendanaan untuk memitigasi hambatan tersebut.

d. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)

Faktor Keberhasilan:

1) Adanya Pemetaan Lalu Lintas

Adanya pemetaan lalu lintas melalui volume kendaraan dan kapasitas jalan yang survei yang memungkinkan kebijakan lebih tepat sasaran.

2) Lebar Jalan yang Memadai

Infrastruktur jalan dengan lebar yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung arus lalu lintas yang lancar, terutama pada jalur yang memiliki aktivitas tinggi.

3) Pengaturan Jalur Satu Arah

Pengaturan jalur satu arah pada area padat telah terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.

4) Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas

Kesadaran pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, serta keterlibatan stakeholder yang berhubungan dengan transportasi dalam sosialisasi keselamatan.

5) Aset Perlengkapan Jalan yang Memadai

Ketersediaan perlengkapan jalan yang cukup banyak, dengan sebagian besar dalam kondisi baik, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan aset untuk mendukung lalu lintas yang aman dan teratur.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

Meskipun lebar jalan memadai, kualitas infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dalam jangka panjang.

2) Perbaikan Perlengkapan Jalan yang Belum Maksimal

Walaupun kondisi perlengkapan jalan cukup baik, peningkatan kualitas perlengkapan ini diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas lalu lintas di masa mendatang.

3) Potensi Lonjakan Lalu Lintas di Masa Depan

Pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas jalan.

4) Kurangnya Inovasi dalam Manajemen Lalu Lintas

Minimnya moda transportasi alternatif membuat masyarakat tetap bergantung pada kendaraan pribadi.

Rekomendasi

1) Peningkatan Infrastruktur Jalan

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan harus menjadi prioritas untuk mendukung arus lalu lintas yang lebih baik, terutama menjelang potensi pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

2) Inovasi dalam Manajemen Lalu Lintas
   Mengadopsi teknologi cerdas untuk manajemen lalu lintas, seperti sistem pemantauan otomatis dan pengaturan sinyal lalu lintas berbasis data, akan membantu menjaga efisiensi dan kelancaran.
3) Investasi dalam Perlengkapan Jalan Berkualitas Tinggi
   Menggunakan material dan desain berkualitas tinggi untuk perlengkapan jalan agar lebih tahan lama dan fungsional, mengurangi kebutuhan perbaikan berkala.
4) Rencana Jangka Panjang untuk Pertumbuhan Lalu Lintas
   Menyusun rencana strategis untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas dengan memperluas kapasitas jalan dan pengelolaan transportasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Keberhasilan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai, pengaturan jalur satu arah, dan penanganan kerusakan perlengkapan jalan yang cepat. Namun, tantangan seperti peningkatan kualitas jalan, pengelolaan perlengkapan, dan antisipasi pertumbuhan lalu lintas perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lalu lintas yang efektif di masa depan.

b.2. Sasaran 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3

Pengukuran kinerja sasaran kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Rata-rata capaian dari keempat indikator tersebut sebesar 102,38% dan dikategorikan sangat tinggi. Indeks kualitas air mencapai 133,85%, indikator indeks kualitas udara hanya sebesar 80,79%, indikator indeks kualitas tutupan lahan sebesar 106,23%,

dan indikator indeks kinerja pengelolaan sampah tercapai dengan persentase capaian hanya sebesar 88,55%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 5 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 18
Target dan Realisasi Sasaran 5

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	6.	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,00	72,28	133,85	80,95	89,29
		7.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,00	73,52	80,79	87,88	83,66
		8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,20	67,14	106,23	63,55	105,65
		9.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	53,00	46,93	88,55	50,00	93,86
Rata-rata Capaian							**102,38**		**93,14**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup atau https://sitala.kemenlh.go.id/

Capaian sasaran 5 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 19
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000	143.082.000	136.797.619	95,61%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	840.000.000	689.344.100	674.313.620	97,82%
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.000.000.000	2.603.990.000	2.485.247.763	95,44%
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	75.000.000	63.750.000	59.882.000	93,93%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	75.000.000	72.956.000	62.047.379	85,05%
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	340.000.000	324.542.000	302.118.440	93,09%
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	27.446.500	91,49%
8.	Program Pengelolaan Persampahan	7.815.000.000	7.729.346.000	7.485.698.753	96,85%
Jumlah		**11.325.000.000**	**11.657.010.100**	**11.233.552.074**	**96,37%**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.233.552.074,00 dari anggaran Rp 11.657.010.100,00 atau realisasi sebesar 96,37%.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pengukuran Indeks Kualitas Air

   Peningkatan indeks Kualitas Air dikarenakan adanya upaya ketat dalam menjaga kualitas air melalui pengawasan terhadap IPAL baik di kawasan Industri maupun Rumah Sakit.

2. Kesadaran Akan Sumber Masalah

   Meningkatnya indeks tutupan lahan memperlihatkan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya tumbuhan hijau.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketidakcapaiannya Target Indeks Kualitas Udara

   Tidak tercapainya target indeks kualitas air udara, disebabkan oleh debu di atas atmosfir grobogan terlihat banyak dan berkumpul di sentra sentra industri keramik dan kawasan pabrik disumbang juga lalu lintas yang mulai padat sehingga capaian kinerja sangat menurun karena dalam penghitungan komponen debu di masukan.

2. Kurang Optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga

   Belum terkelolanya sampah rumah tangga dengan baik, sehingga masih banyak masyarakat yang memilih untuk membakar sampah sendiri atau bahkan membuangnya ke sungai.

Kesimpulan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah dan limbah B3 menunjukkan capaian yang kontras, di mana keberhasilan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan didorong oleh pengawasan ketat terhadap IPAL di kawasan industri dan rumah sakit serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan penghijauan, namun di sisi lain target Indeks Kualitas Udara (IKU) gagal tercapai akibat tingginya akumulasi debu atmosfer di sentra

industri keramik dan kepadatan lalu lintas yang menurunkan skor komponen penghitungan udara. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga yang memicu perilaku masyarakat untuk membakar sampah atau membuangnya ke sungai, sehingga diperlukan sinkronisasi antara keberhasilan teknis di sektor limbah cair dengan pembenahan manajemen polusi udara dan sistem tata kelola sampah domestik yang lebih terintegrasi.

b.3. Sasaran 6

Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 6 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 20
Target dan Realisasi Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	6. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88	0,88	100,00	0,72	122,22

Sumber: BPBD (Surat BNPB No. B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2025, hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah atau https://inarisk.bnpb.go.id/adminlogin)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%. Hal tersebut diperhitungkan dari target 0,88 yang ditetapkan terealisasi

sebesar 0,88. Capaian kinerja sasaran sebesar 122,22% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 6 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 21
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penanggulangan Bencana	8.526.024.600	10.586.712.600	10.312.628.741	97,41%
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.044.100.000	1.920.030.000	1.797.382.731	93,61%
Jumlah		**10.570.124.600**	**12.506.742.600**	**12.110.011.472**	**96,83%**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 12.110.011.472,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 12.506.742.600,00 atau sebesar 96,83%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pencapaian Indeks Ketahanan yang Tinggi:
   Tingginya indeks ketahanan daerah mencerminkan keberhasilan upaya penanggulangan bencana yang strategis dan efektif.
2. Pemenuhan Tujuh Komponen Utama:
   BPBD Kabupaten Grobogan telah berhasil memenuhi tujuh komponen utama indeks ketahanan, meliputi:
   - Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
   - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
   - Pengembangan sistem informasi.
   - Pelatihan dan logistik yang memadai.
   - Penanganan kawasan rawan bencana secara tematik.
   - Peningkatan pencegahan dan mitigasi yang efektif.
   - Perkuatan kesiapsiagaan dan pemulihan bencana.

3. Efisiensi dalam Penanganan Korban Bencana:
   Berhasil mengevakuasi 1979 korban bencana selama 2025 dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat yang memadai.
4. Kolaborasi *Pentahelix* yang Efektif:
   Pelibatan lima unsur utama (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media) menciptakan sinergi yang signifikan dalam penanganan bencana.
5. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA):
   Terbentuknya 73 Desa Tangguh Bencana (DESTANA) pada akhir tahun 2025 menunjukkan pendekatan berkelanjutan dalam memperkuat kesiapsiagaan desa-desa rawan bencana.
6. Kolaborasi antara BPBD dan pemerintah desa, didukung pembagian anggaran APBDes dan APBD Provinsi, memberikan dampak nyata terhadap kesiapan masyarakat
7. Komitmen Pelayanan kepada Masyarakat:
   Tingginya komitmen BPBD untuk melayani masyarakat terdampak bencana menjadi elemen penting dalam menciptakan ketahanan daerah yang solid.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan:
   Belum disebutkan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur untuk memastikan keberlanjutan indeks ketahanan daerah di masa depan.
2. Kapasitas Desa yang Masih Beragam:
   Meskipun telah terbentuk 73 DESTANA, masih ada desa rawan bencana lain yang memerlukan perhatian dan penguatan kapasitas.
3. Pengembangan Sistem Informasi yang Lebih Canggih:
   Sistem peringatan dini banjir dan kekeringan belum menjangkau seluruh wilayah rawan.
4. Pelibatan Masyarakat yang Lebih Luas:

Partisipasi aktif masyarakat di semua tingkat perlu terus didorong, terutama di wilayah-wilayah yang belum menjadi prioritas.

5. Ketahanan Logistik dan Sumber Daya:
   Pemenuhan sarana dan prasarana tanggap darurat perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kejadian bencana yang lebih besar atau kompleks.
6. Kesinambungan Pendanaan:
   Keberlanjutan pembiayaan, terutama untuk pembentukan DESTANA dan peningkatan kesiapan infrastruktur, harus dipastikan agar tidak hanya bergantung pada APBD.

Kesimpulan:

Tingginya indeks ketahanan daerah Kabupaten Grobogan menandakan keberhasilan dalam berbagai aspek penanggulangan bencana. Namun, tantangan ke depan meliputi penguatan monitoring, peningkatan kapasitas desa yang belum tertangani, dan pengembangan teknologi serta pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program.

3. Misi 3

Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

a. Tujuan 3

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan **meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah,** dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan realisasi capaian sebesar 107,40% dan Angka Kemiskinan dengan realisasi capaian sebesar 96,19%. Kinerja capaian kedua indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 101,79%. Data capaian kinerja tujuan ke-3 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 22
Target dan Realisasi Tujuan 3

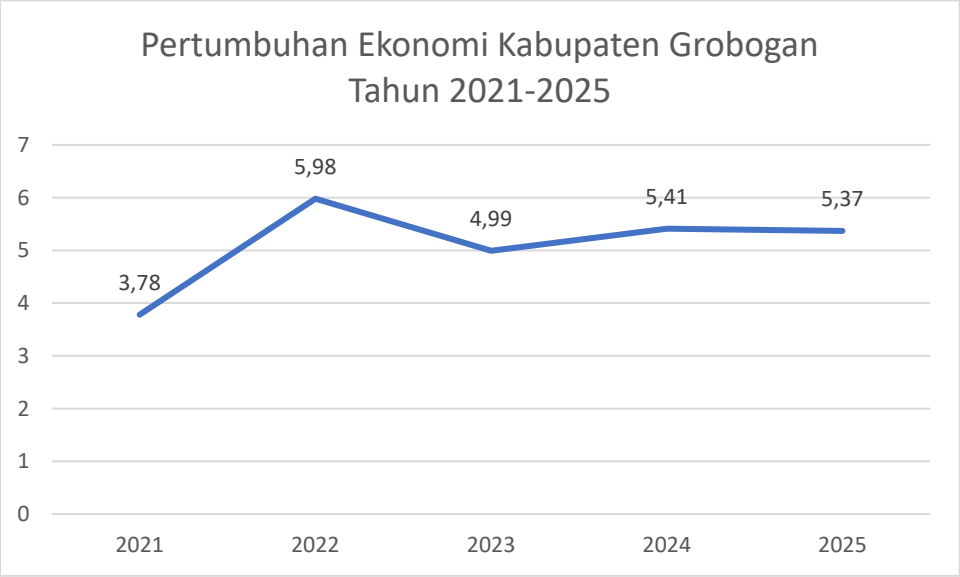
No.	Tujuan		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5±1	5,37	107,40	6±1	110,50
		4.	Angka Kemiskinan	%	9,76–10,24	10,63	96,19	9,23-9,81	91,64
			Rata-rata capaian				101,79		91,64

Sumber: BPS

Meskipun kinerja tujuan ke 3 terealisasi dengan rata-rata **capaian** sebesar 101,79%, namun demikian masih ditemukan indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai (<100%) yaitu Angka Kemiskinan dengan target 10,25 hanya tercapai 10,63, sehingga capaiannya hanya sebesar 96,19%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, rata-rata realisasi telah mencapai target dengan capaian sebesar 91,64%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2021-2025 fluktuatif dari 3,78% pada tahun 2021 menjadi 5,98% pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 4,99%, meningkat menjadi 5,41% pada Tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 5,37% di tahun 2025 sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Kabupaten Grobogan lebih baik dibanding dengan capaian Provinsi dan Nasional, sebagaimana data di bawah ini:

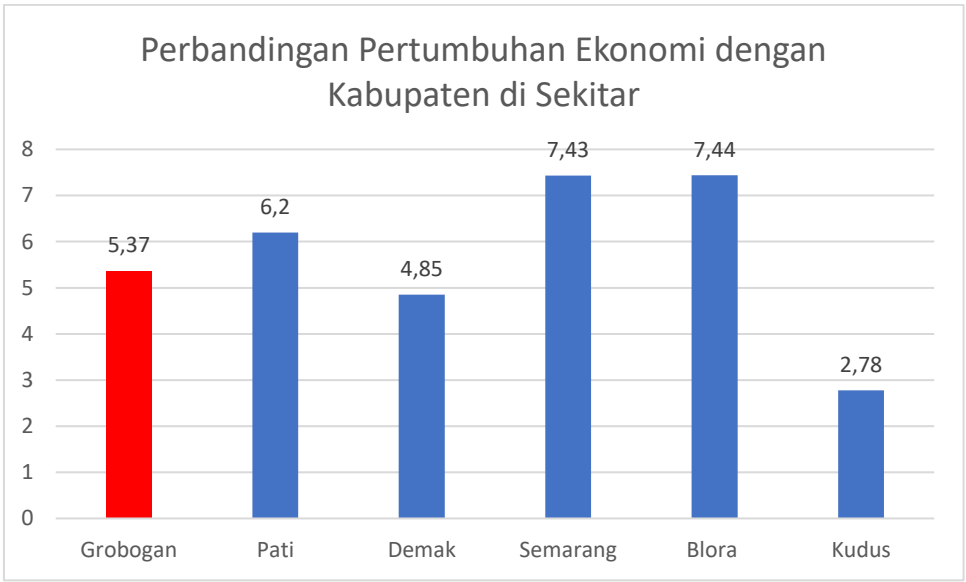
Grafik 3. 8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2025



Sumber: BPS

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar, sebagaimana data di bawah ini:

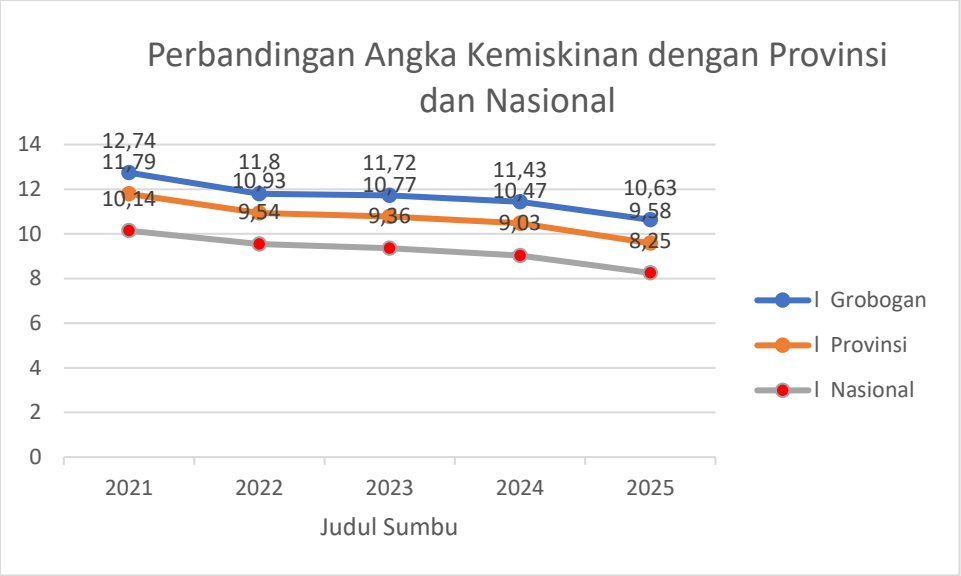
Grafik 3. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025



Sumber: BPS

Angka kemiskinan Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi dan Nasional, masih di bawah capaian Provinsi dan Nasional, sebagaimana data di bawah ini:

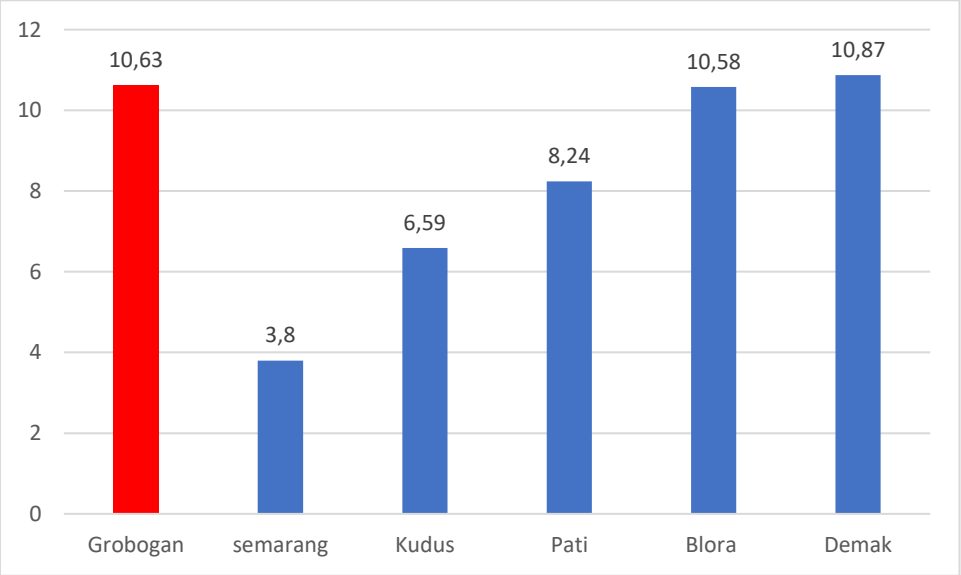
Grafik 3. 10 Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Provinsi dan Nasional



Sumber: BPS

Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan kabupaten sekitar, angka kemiskinan Kabupaten Grobogan masih termasuk tinggi dan lebih rendah dibanding Kabupaten Demak, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 11 Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025



Sumber: BPS

b. Sasaran pada Misi Ke-3

b.1. Sasaran 7

Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya sektor ekonomi unggulan daerah diukur dengan 4 (empat) indikator yang merupakan lapangan usaha komponen pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Grobogan. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 7 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 23
Target dan Realisasi Sasaran 7

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	3,31	-0,55	-16,62	1,23	-44,72
		7.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	4,72	5,52	116,95	1,48	372,97
		8.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	5,55	7,62	137,30	2,63	289,73
		9.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	3,01	2,26	75,08	1,53	147,71
Rata-rata Capaian							**78,18**		**191,42**

Sumber: BPS dan Disporabudpar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja keempat indikator sasaran 7 dapat tercapai dengan capaian kinerja sebesar 78,18%. Capaian kinerja sasaran sebesar 78,18% dikategorikan kinerja tinggi. Demikian pula apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan capaian kinerja sasaran 7 telah tercapai dengan capaian rata-rata sebesar 191,42%.

Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 24
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	89.997.000	89.997.000	88.157.120	97,96
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	140.000.000	335.000.000	332.394.500	99,22
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	175.000.000	275.000.000	263.885.300	95,96
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.601.481.000	12.569.880.000	11.647.704.403	92,66
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	33.855.094.000	18.042.001.500	17.926.064.139	99,36
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.049.613.000	2.647.896.000	2.058.779.808	77,75
7.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.134.296.000	2.847.639.500	2.721.216.515	95,56
8.	Program Penyuluhan Pertanian	5.164.440.000	6.601.835.000	6.013.319.829	91,09
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.795.451.528	482.658.000	475.524.490	98,52
10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	670.000.000	667.000.000	664.743.350	99,66
11.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	25.000.000	22.750.000	21.162.400	93,02
12.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	200.000.000	200.000.000	196.691.328	98,35
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	569.939.000	635.000.000	587.085.073	92,45
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00
15.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	700.000.000	484.861.000	468.627.175	96,65
16.	Program Pemasaran Pariwisata	450.000.000	570.200.000	539.957.340	94,70
17.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	150.000.000	350.000.000	306.227.070	87,49
18.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	200.500.000	95.780.000	91.987.540	96,04

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
19.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	49.500.000	49.500.000	48.364.300	97,71
20.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	150.000.000	500.000.000	453.041.907	90,61
21.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	250.000.000	214.314.000	201.997.401	94,25
Jumlah		**74.463.311.528**	**48.806.312.000**	**46.219.591.062**	**94,70**

Berdasarkan tabel di atas, sasaran 7 diselesaikan dengan melaksanakan 21 (dua puluh satu) program. Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 48.806.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 46.219.591.062,00 atau realisasi keuangan sebesar 94,70%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 7 adalah sebagai berikut**:**

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Faktor Iklim Dan Cuaca Ekstrem Yang Tidak Menentu

Grobogan dikenal sebagai wilayah dengan kerentanan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Jika pada 2025 terjadi anomali cuaca (misalnya kemarau lebih panjang atau banjir lebih luas), maka luas panen dan produktivitas bisa turun signifikan. Dampaknya tidak hanya pada tanaman pangan, tetapi juga pada peternakan (ketersediaan pakan) dan perikanan darat.

2) Ketergantungan Tinggi pada Komoditas Primer

Struktur pertanian Grobogan didominasi tanaman pangan seperti padi dan jagung. Ketika terjadi penurunan produksi akibat faktor musim atau harga, dampaknya langsung signifikan terhadap PDRB karena belum terdiversifikasi kuat ke hortikultura bernilai tinggi atau agroindustri.

Ketergantungan pada komoditas utama membuat sektor ini kurang resilien terhadap guncangan.

3) Akses Permodalan dan Regenerasi Petani

Jika akses kredit pertanian terbatas atau petani menghadapi tekanan likuiditas, maka kemampuan bertahan terhadap risiko gagal panen menurun. Selain itu, masalah regenerasi petani dan produktivitas tenaga kerja juga menjadi faktor struktural jangka panjang.

4) Keterbatasan Hilirisasi dan Nilai Tambah

Selama ini kontribusi sektor pertanian lebih banyak dari produksi bahan mentah. Jika tidak ada peningkatan pengolahan hasil (agroindustri), maka ketika volume produksi turun sedikit saja, nilai PDRB langsung terkontraksi. Minimnya integrasi dengan sektor industri pengolahan membuat sektor ini kurang tahan terhadap fluktuasi.

5) Keterbatasan Teknologi dan Pelatihan

Tidak ada informasi mengenai pengembangan kapasitas petani, nelayan, atau pengelola kehutanan, serta penerapan teknologi modern. Tanpa inovasi dan pelatihan, efektivitas sektor ini mungkin terbatas untuk menghadapi tantangan masa depan.

6) Efek Basis Tinggi (*High Base Effect*)

Karena 2024 menunjukkan capaian yang sangat tinggi, maka basis perhitungan menjadi lebih besar. Pada kondisi basis tinggi, pertumbuhan berikutnya akan lebih sulit dicapai kecuali ada ekspansi produksi yang luar biasa. Jika produksi stagnan atau sedikit turun, pertumbuhan bisa langsung negatif.

Kesimpulan:

Meskipun pertumbuhan sektor mengalami kontraksi pada tahun 2025, ketahanan produksi, keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, serta efektivitas program intervensi pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap terjaga dan mampu menahan tekanan

eksternal secara relatif baik. Selain itu, tingginya capaian pada 2023 dan 2024 menciptakan efek basis tinggi (*high base effect*) yang secara matematis memperberat pencapaian pertumbuhan pada tahun berikutnya. Dalam kondisi struktur produksi yang belum terdiversifikasi dan sistem mitigasi risiko yang belum kuat, tekanan sedikit saja dapat berujung pada pertumbuhan negatif yang dalam. Sektor tersebut memiliki tingkat volatilitas tinggi dan ketahanan yang terbatas terhadap guncangan. Ke depan, penguatan struktur melalui diversifikasi komoditas, peningkatan produktivitas berbasis teknologi, perbaikan infrastruktur irigasi, serta pengembangan hilirisasi dan stabilisasi harga menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan tidak sekadar bergantung pada momentum jangka pendek.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Faktor Keberhasilan:

1) Meningkatnya Daya Beli dan Aktivitas Konsumsi Masyarakat

   Peningkatan daya beli masyarakat, yang dipengaruhi oleh stabilitas harga serta membaiknya pendapatan pada beberapa lapangan usaha utama, mendorong peningkatan transaksi baik pada perdagangan besar maupun eceran. Aktivitas pasar tradisional, toko modern, hingga jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan non-pokok menunjukkan perputaran yang lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan

2) Efek Multiplier dari Kinerja Sektor Pertanian

   Sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang masih ditopang oleh sektor pertanian, pertumbuhan perdagangan di Grobogan juga sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor primer tersebut. Ketika produksi dan nilai tambah pertanian berada dalam kondisi yang stabil atau meningkat, pendapatan masyarakat perdesaan ikut terdorong. Kondisi ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*), dimana peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian berdampak langsung pada

meningkatnya permintaan barang konsumsi, sarana produksi, serta jasa lainnya yang disalurkan melalui sektor perdagangan.

3) Membaiknya Sistem Distribusi dan Konektivitas Wilayah
   Infrastruktur jalan yang memadai dan akses distribusi yang lebih efisien menekan biaya logistik serta mempercepat arus barang, sehingga volume perdagangan besar dapat meningkat. Efisiensi distribusi ini berkontribusi pada stabilitas pasokan barang di pasar serta menjaga daya saing harga di tingkat konsumen.
4) Pertumbuhan Subsektor Reparasi Kendaraan Bermotor
   Meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor mendorong kebutuhan jasa servis dan suku cadang. Perkembangan usaha bengkel dan layanan perawatan kendaraan mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis jasa yang mendukung sektor perdagangan secara keseluruhan.
5) Perkembangan UMKM dan Adaptasi Digitalisasi Perdagangan
   Di sisi lain, adaptasi pelaku usaha terhadap perkembangan teknologi turut memperkuat kinerja sektor ini. Pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana pemasaran memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi transaksi, khususnya bagi pelaku UMKM. Transformasi ini membantu mempercepat perputaran barang dan memperluas akses konsumen terhadap berbagai produk.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Masih Terbatasnya Daya Beli Sebagian Masyarakat
   Salah satu faktor penghambat utama adalah masih terbatasnya daya beli sebagian masyarakat, khususnya pada kelompok pendapatan menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok. Meskipun kondisi konsumsi masyarakat relatif membaik, fluktuasi harga pangan dan kebutuhan dasar tetap memengaruhi pola belanja masyarakat.

2) Struktur Ekonomi Daerah Yang Masih Sangat Bergantung Pada Sektor Pertanian

   Ketika terjadi penurunan hasil panen akibat cuaca ekstrem, serangan hama, atau perubahan harga komoditas, pendapatan masyarakat perdesaan ikut menurun dan secara langsung berdampak pada aktivitas perdagangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap siklus pertanian menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan belum sepenuhnya stabil sepanjang tahun.

3) Sistem Distribusi Dan Logistik Yang Belum Sepenuhnya Efisien

   Meskipun konektivitas wilayah terus membaik, masih terdapat beberapa ruas jalan dengan kondisi terbatas serta biaya transportasi yang relatif tinggi bagi pelaku usaha kecil. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi barang, terutama bagi pelaku perdagangan skala mikro dan kecil, sehingga margin usaha menjadi lebih sempit dan kemampuan ekspansi usaha menjadi terbatas.

4) Tantangan Kapasitas Dan Daya Saing UMKM

   kapasitas dan daya saing UMKM perdagangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek manajemen usaha, akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi digital. Tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perubahan pola perdagangan berbasis digital, sehingga sebagian masih bergantung pada metode penjualan konvensional dengan jangkauan pasar yang terbatas. Kesenjangan literasi digital ini menjadi salah satu faktor yang menahan percepatan pertumbuhan sektor perdagangan secara lebih luas.

5) Dinamika Ekonomi Regional dan Nasional

   Selain faktor internal daerah, dinamika ekonomi regional dan nasional turut memberikan tekanan terhadap sektor perdagangan. Perubahan harga bahan bakar, inflasi nasional, serta ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi biaya

distribusi dan pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam menambah stok atau melakukan ekspansi usaha

Kesimpulan:

Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan dari sisi kinerja pertumbuhan dan pencapaian target, namun sekaligus menjadi catatan evaluasi bahwa penguatan fondasi sektor perdagangan masih diperlukan agar pertumbuhan di masa mendatang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan daya saing pelaku usaha, penguatan jaringan distribusi, serta akselerasi digitalisasi perdagangan menjadi langkah strategis yang perlu terus didorong agar sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dapat mempertahankan perannya sebagai penggerak ekonomi daerah secara konsisten.

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Faktor Keberhasilan:

1) Pertumbuhan PDRB yang Signifikan

   Pertumbuhan PDRB mencapai 137,30% merupakan indikator yang sangat positif, menunjukkan kemajuan pesat sektor industri pengolahan dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

2) Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah

   Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi perizinan, pembinaan UMKM industri, serta kemudahan akses terhadap program pengembangan usaha.

3) Penyerapan Tenaga Kerja Informal

   Banyaknya tenaga kerja informal yang terserap menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tidak hanya mendukung perekonomian daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.

4) Perbaikan infrastruktur distribusi

Perbaikan infrastruktur distribusi dan konektivitas antar wilayah yang semakin mempermudah proses pemasaran dan pengiriman barang.

5) Efek Multiplier pada Ekonomi Lokal

Aktivitas UMKM dalam sektor industri pengolahan turut mendorong peningkatan konsumsi dan pertumbuhan sektor pendukung lainnya, seperti perdagangan dan jasa logistik, yang memberikan dampak berantai pada ekonomi lokal.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketimpangan Pertumbuhan

Tingginya angka pertumbuhan PDRB tidak selalu mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi. Ada kemungkinan bahwa wilayah tertentu masih belum menikmati dampak positif dari pertumbuhan sektor industri pengolahan ini.

2) Keterbatasan Teknologi Produksi

Keterbatasan teknologi produksi pada sebagian pelaku industri yang masih bersifat tradisional sehingga produktivitas belum optimal.

3) Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Yang Belum Merata

Kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang belum merata, sehingga belum seluruh industri mampu meningkatkan efisiensi produksi.

4) Ketidakseimbangan Pengelolaan Sumber Daya

Pengembangan potensi daerah dapat menimbulkan risiko eksploitasi sumber daya lokal jika tidak dikelola secara berkelanjutan, yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang.

5) Tantangan Persaingan Pasar

Tantangan persaingan dengan produk dari luar daerah yang memiliki skala produksi lebih besar dan harga lebih kompetitif.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan capaian sebesar 137,30% dari target, sektor industri pengolahan di Kabupaten Grobogan menunjukkan arah perkembangan yang baik. Dengan demikian, meskipun capaian tahun 2025 sangat menggembirakan, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing industri pengolahan agar pertumbuhan yang tinggi ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

d. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Faktor Keberhasilan:

1) Penyelenggaraan Event dan Kegiatan

   Berbagai event daerah, festival budaya, dan kegiatan promosi wisata yang diselenggarakan secara berkala mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Penyelenggaraan event tersebut tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar seperti UMKM, kuliner, dan jasa lainnya.

2) Potensi Wisata Berbasis Budaya dan Alam

   Upaya pengembangan wisata berbasis budaya dan alam memberikan arah yang strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan. Wisata jenis ini memiliki daya tarik yang unik dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta pelestarian budaya lokal.

3) Pelatihan Usaha Pariwisata

   Adanya pelatihan untuk usaha pariwisata menunjukkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memberikan layanan yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik wisata.

4) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha Pariwisata

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, seperti pengelola objek wisata, pelaku usaha kuliner, penginapan, serta pelaku UMKM. Kolaborasi ini membantu meningkatkan kualitas layanan pariwisata dan menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih berkembang sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyaraka.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Pariwisata

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah keterbatasan infrastruktur pendukung di sejumlah destinasi wisata. Akses jalan menuju beberapa lokasi wisata masih belum memadai, fasilitas umum seperti area parkir, sanitasi, tempat istirahat, serta sarana penunjang lainnya juga belum sepenuhnya tersedia secara optimal. Kondisi ini dapat mengurangi kenyamanan wisatawan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan di daerah tersebut.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Belum Merata

Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata masih belum merata, baik pada pengelola destinasi wisata, pelaku usaha, maupun masyarakat sekitar kawasan wisata. Kurangnya kemampuan dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, serta pengembangan produk wisata yang inovatif menyebabkan potensi wisata yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berdampak pada terbatasnya daya tarik destinasi dan kurang optimalnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan.

3) Kurangnya Upaya Promosi pada Destinasi Sepi

Goa Lawa dan Goa Macan yang kurang diminati mengindikasikan adanya kekurangan dalam strategi pemasaran atau promosi. Hal ini berpotensi menghambat pemerataan kontribusi destinasi wisata terhadap PAD.

4) Ketergantungan pada Musim atau Event Tertentu

Aktivitas pariwisata di Kabupaten Grobogan masih cenderung bergantung pada momen tertentu seperti musim liburan, hari besar, atau penyelenggaraan event daerah. Di luar periode tersebut, jumlah kunjungan wisatawan relatif menurun sehingga aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata tidak berlangsung secara konsisten sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata belum dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, belum tercapainya target kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Grobogan tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan infrastruktur pendukung, kualitas SDM pariwisata yang belum merata, daya saing destinasi yang masih perlu ditingkatkan, serta tingginya ketergantungan pada musim atau event tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dalam pengembangan destinasi, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta strategi promosi yang berkelanjutan agar sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD di masa mendatan.

b.2. Sasaran 8

Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional yang diukur dengan indikator nilai investasi di daerah menunjukkan capaian kinerjanya sebesar 141,51% dengan membandingkan target nilai investasi sebesar 2.643 milyar rupiah terealisasi sebesar 3.740

milyar rupiah (3,7 trilyun rupiah). Kinerja sasaran 8 dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Tabel 3. 25
Target dan Realisasi Sasaran 8

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	6. Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	2.643	3.740	141,51	4.391,539	85,16

Sumber: DPMPTSP

Capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional didukung program-program:

Tabel 3. 26
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117.500.000	142.500.000	136.594.800	95,86
2.	Program Promosi Penanaman Modal	273.500.000	257.500.000	256.147.700	99,47
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	136.400.000	99.000.000	91.440.000	92,36
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	195.380.000	149.800.000	139.418.000	93,07
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.000.000	22.000.000	21.100.000	95,91
	Jumlah	**752.780.000**	**670.800.000**	**644.700.500**	**96,11%**

Sumber: DPMPTSP

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 8 sebesar Rp 670.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 644.700.500,00 atau realisasi sebesar 96,11%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Nilai Investasi Melampaui Target Kinerja

   Nilai realisasi investasi mencapai 141,51% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya

kepercayaan investor terhadap stabilitas daerah, potensi sektor unggulan, serta kepastian regulasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh ekspansi usaha eksisting dan masuknya investasi baru pada sektor prioritas daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

   Optimalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk ketersediaan data pendukung perizinan yang telah mencapai 100%, memberikan kepastian dan percepatan proses usaha. Penyederhanaan prosedur serta kepastian waktu layanan menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

   Pelaksanaan monitoring dan pembinaan secara berkala terhadap pelaku usaha menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlanjutan investasi. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal, tetapi juga membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi investor sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

4. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik

   Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat integrasi layanan perizinan dan administrasi usaha memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kepastian waktu bagi investor. Integrasi layanan dalam satu lokasi memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan kualitas pengalaman berusaha di daerah.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung

   Belum meratanya kualitas infrastruktur jalan, konektivitas kawasan industri, serta keterbatasan pasokan energi dan air bersih di beberapa wilayah menjadi kendala dalam menarik investasi berskala besar. Kondisi ini meningkatkan biaya logistik

dan operasional bagi investor sehingga mempengaruhi daya saing daerah dibandingkan wilayah lain.

2. Ketersediaan dan Kepastian Lahan

   Permasalahan status lahan, keterbatasan lahan siap bangun (clean and clear), serta proses pembebasan lahan yang memerlukan waktu relatif lama menjadi salah satu hambatan utama realisasi investasi. Ketidakpastian tata ruang dan penyesuaian dokumen perencanaan wilayah juga dapat memperlambat proses investasi.

3. Dinamika Regulasi Nasional dan Global

   Kebijakan sektoral serta dinamika ekonomi global turut mempengaruhi realisasi investasi daerah. Perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan perdagangan internasional berdampak pada keputusan ekspansi usaha. Selain itu, kebijakan investasi nasional yang dikoordinasikan melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga mempengaruhi distribusi investasi antar daerah.

4. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Investasi

   Sebagian pelaku usaha masih belum optimal dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu dan lengkap. Hal ini berdampak pada akurasi data realisasi investasi yang dilaporkan serta menghambat proses monitoring dan evaluasi.

Kesimpulan:

Pencapaian Sasaran 8 menunjukkan kinerja yang sangat optimal, ditandai dengan nilai investasi yang melampaui target. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan perizinan, digitalisasi layanan, serta monitoring dan pembinaan investasi yang konsisten sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kepastian lahan, kesesuaian kompetensi tenaga kerja, serta dinamika kebijakan nasional dan global. Tantangan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi, percepatan

penyediaan infrastruktur, dan peningkatan daya saing daerah guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan investasi.

b.3. Sasaran 9

Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa.

Pengukuran kinerja sasaran menguatnya pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 9 disajikan pada tabel 3.30 berikut:

Tabel 3. 27
Target dan Realisasi Sasaran 9

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	6.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71	0,77	108,45	0,72	106,94

Sumber: Data Dispermades 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 9 menunjukkan bahwa indeks IDM yang ditargetkan sebesar 0,71, tercapai sebesar 0,77, sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,45%. Capaian kinerja sasaran ini dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 9 didukung program-program:

Tabel 3. 28
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penataan Desa	40.000.000	40.000.000	34.296.500	85,74%

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	4.150.000.000	5.244.650.000	5.078.447.468	96,83%
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.069.420.000	4.227.131.200	4.115.777.749	97,37%
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.385.656.000	1.787.217.000	1.696.100.946	94,90%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	511.439.000	1.471.531.000	1.358.451.040	92,32%
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.386.618.000	844.823.800	831.370.330	98,41%
Jumlah		**1.309.999.000**	**8.584.649.000**	**8.537.453.719**	**99,45%**

Sumber: Dispermades

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sembilan sebesar Rp 8.584.649.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.537.453.719,00 atau realisasi sebesar 99,45%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Peningkatan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Melampaui Target

   Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang melampaui target menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi desa. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan upaya dalam mewujudkan kondisi desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

2. Kenaikan Status Desa

   Sebanyak 79 desa mengalami peningkatan status, dengan 39 desa naik dari status maju ke mandiri dan 40 desa dari berkembang ke maju. Ini menunjukkan progres nyata dalam pengelolaan pembangunan desa secara bertahap.

3. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Desa

   Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Kondisi

tersebut mendorong terwujudnya desa yang lebih mandiri melalui keterlibatan masyarakat secara optimal dalam setiap proses pembangunan.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa

   Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikelola secara tertib, profesional, dan berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik (good governance) mampu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap penguatan dan pengembangan potensi sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.

5. Pengembangan Potensi Lokal Desa

   Fokus pada pengembangan potensi desa merupakan langkah strategis dalam menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pendekatan tersebut sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan dan penguatan sumber daya serta kearifan lokal sebagai modal utama pembangunan desa.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

   Pelatihan serta peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Melalui penguatan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan aparatur, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketimpangan Status antar Desa

   Meskipun ada 79 desa yang naik status, banyak desa lainnya mungkin belum mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah desa.

2. Keberlanjutan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa perlu terus ditingkatkan dan dijaga agar kesadaran ini tidak bersifat sementara. Tantangan sosial atau ekonomi bisa memengaruhi konsistensi keterlibatan masyarakat.

3. Tantangan Pengelolaan Potensi Lokal

   Pengembangan potensi lokal mungkin menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pasar, pendanaan, atau sumber daya manusia yang memadai.

4. Aparatur Pemerintah Desa yang Belum Merata Kompetensinya

   Tidak seluruh aparatur pemerintah desa memiliki tingkat kompetensi yang setara, khususnya pada desa-desa yang masih tertinggal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola desa, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan secara optimal dan akuntabel.

5. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

   Belum terdapat penegasan mengenai pemanfaatan teknologi maupun inovasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Padahal, pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempercepat proses tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi lokal secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Risiko Ketergantungan pada Bantuan Eksternal

   Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan, ada kemungkinan beberapa desa masih bergantung pada bantuan eksternal atau program pemerintah pusat, yang bisa menghambat kemandirian desa dalam jangka panjang.

Kesimpulan:

Belum terdapat penegasan mengenai pemanfaatan teknologi maupun inovasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Padahal, pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempercepat proses tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan efisiensi pelayanan publik,

serta mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi lokal secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

b.4. Sasaran 10

Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran kinerja sasaran 10 dilakukan dengan indikator persentase penurunan PPKS dalam satuan persen per tahun dengan ditetapkan target sebesar 1,4%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 10 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 29
Target dan Realisasi Sasaran 10

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	6.	Persentase penurunan PPKS	%	1,40	1,40	100,00	1,40	100,00

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori PPKS dengan capaian kinerja 100,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari target yang ditetapkan sebesar 1,40% terealisasi sebesar 1,40%. Capaian kinerja sebesar 100,00% dikategorikan tercapai dan bekinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 10 didukung program-program:

Tabel 3. 30
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pemberdayaan Sosial	205.000.000	230.000.000	226.400.000	98,43
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.841.000	4.841.000	4.727.500	97,66
3.	Program Rehabilitasi Sosial	354.587.000	604.237.000	595.439.503	98,54

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	594.000.000	7.244.000.000	7.214.143.731	99,59
5.	Program Penanganan Bencana	130.000.000	330.000.000	325.980.985	98,78
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	21.571.000	171.571.000	170.762.000	99,53
	Jumlah	**1.309.999.000**	**8.584.649.000**	**8.537.453.719**	**99,45**

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sepuluh sebesar Rp 8.584.649.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.537.453.719,00 atau realisasi sebesar 99,79%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 10 diantaranya sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Ketepatan Penetapan Target dan Perencanaan

   Target ditetapkan berdasarkan *baseline* data yang realistis dan mempertimbangkan tren tahun sebelumnya, sehingga target dapat dicapai secara terukur dan rasional.

2. Pembentukan Tim Pendataan PPKS di Kecamatan

   Dibentuknya tim pendataan di seluruh kecamatan berhasil meningkatkan validitas data PPKS secara masif. Data yang lebih akurat membantu merancang dan melaksanakan program yang lebih tepat sasaran.

3. Kontribusi Sektor Terkait dengan Dukungan Anggaran Memadai

   Partisipasi sektor terkait yang didukung dengan anggaran memadai menunjukkan keberhasilan dalam alokasi sumber daya untuk menyelesaikan masalah sosial. Anggaran yang cukup memberikan ruang bagi pelaksanaan program yang lebih efektif.

4. Sinergi Lintas Perangkat Daerah

   Koordinasi antara Dinas Sosial dengan perangkat daerah lain (kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dll.) mendukung penanganan yang lebih komprehensif.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Distribusi Manfaat yang Mungkin Belum Merata

   Meskipun ada keberhasilan, manfaat program mungkin belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat PPKS di berbagai wilayah. Ketimpangan distribusi ini bisa menjadi tantangan dalam memastikan kesejahteraan yang inklusif.

2. Munculnya Kerentanan Sosial Baru

   Perubahan struktur sosial seperti lansia tanpa dukungan keluarga, anak rentan akibat disfungsi keluarga, dan penyandang disabilitas tanpa akses kerja. Menjadi tantangan karena memerlukan pendekatan intervensi yang lebih spesifik dan lintas sektor.

3. Keterbatasan Kapasitas SDM di Tingkat Lokal

   Tidak semua wilayah mungkin memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk menangani PPKS secara efektif, terutama di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap pelatihan atau pendampingan.

4. Tantangan dalam Penanganan Jangka Panjang

   Penurunan jumlah PPKS saat ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan, terutama jika program yang dilaksanakan tidak disertai dengan strategi untuk mencegah munculnya PPKS baru di masa depan.

Rekomendasi:

1. Pemerataan Distribusi Manfaat

   Pastikan bahwa program sosial menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, dengan mengembangkan mekanisme distribusi yang lebih adil.

2. Pemutakhiran Data secara Berkala

   Lakukan pemutakhiran data PPKS secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansi dalam perencanaan dan implementasi program.

3. Pengembangan Kapasitas SDM Lokal

Berikan pelatihan dan pendampingan kepada tim di tingkat kecamatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani PPKS.

4. Pendekatan Preventif Jangka Panjang

   Integrasikan program jangka panjang yang fokus pada pencegahan, seperti pelatihan keterampilan kerja dan penguatan ekonomi, untuk meminimalkan jumlah PPKS di masa mendatang.

5. Penguatan Koordinasi dan Monitoring

   Tingkatkan koordinasi antarinstansi di semua tingkatan, disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk menjaga konsistensi dan efektivitas program.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Grobogan mencerminkan langkah-langkah positif, seperti peningkatan validitas data, koordinasi lintas sektor, dan pencapaian program sosial yang sesuai target. Namun, tantangan seperti pemerataan manfaat, pemutakhiran data, dan pendekatan preventif jangka panjang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai. Dengan strategi yang lebih inklusif dan terintegrasi, penanganan PPKS dapat terus ditingkatkan secara signifikan.

b.5. Sasaran **11**

Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja

Pengukuran kinerja sasaran 11 dilakukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 atau dengan satuan persen. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 11 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 31
Target dan Realisasi Sasaran 11

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya daya Saing dan penyerapan tenaga kerja	6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,23	3,12	103,41	4,00	122,00

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh capaian kinerjanya sebesar 103,41%. Dari target yang ditetapkan sebesar 3,23 terealisasi 3,12. Capaian kinerja sebesar 103,41% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 11 didukung program-program:

Tabel 3. 32
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	809.918.000	1.787.925.000	1.717.300.843	96,05
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	525.640.000	525.640.000	522.579.083	99,42
3.	Program Hubungan Industrial	200.000.400	179.440.400	175.873.825	98,01
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30.466.000	30.466.000	12.762.500	41,89
Jumlah		**1.788.803.810.666**	**1.710.152.324.054**	**1.629.622.680.085**	**95,29**

Program pendukung sasaran 11 sebanyak 4 (empat) program dengan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.710.152.324.054,00 terealisasi sebesar Rp 1.710.152.324.054,00 atau realisasi sebesar 95,29%.

Faktor **yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 11 diantaranya sebagai berikut:**

Faktor Keberhasilan:

1. Peningkatan keterampilan, kompetensi, serta ketepatan penempatan tenaga kerja.

Peningkatan keterampilan, kompetensi, serta ketepatan penempatan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan lebih mudah terserap dalam dunia usaha maupun industri. Selain itu, sistem penempatan tenaga kerja yang efektif dan berbasis pada kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pemberi kerja dapat meminimalkan terjadinya *mismatch* atau ketidaksesuaian kompetensi.

Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diiringi dengan mekanisme penempatan kerja yang tepat tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi secara langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja

   Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan merupakan faktor penting dalam mendukung pengurangan tingkat pengangguran. Hubungan kerja yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang stabil serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan investasi dan perluasan kesempatan kerja, karena dunia usaha memiliki rasa aman dalam mengembangkan kegiatan produksinya. Di sisi lain, jaminan keadilan dan kesejahteraan pekerja turut meningkatkan produktivitas serta loyalitas tenaga kerja, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dan penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Job Fair

Job Fair menjadi wadah yang efektif dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini membantu memastikan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya, sementara perusahaan dapat menemukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan.

4. Pembebasan Biaya Pelatihan dan Uji Kompetensi untuk CPMI

   Inisiatif pembebasan biaya ini memberikan peluang yang lebih besar bagi CPMI untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga lebih banyak tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di luar negeri. Ini juga menjadi langkah inovatif yang menunjukkan perhatian terhadap tenaga kerja sektor informal.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketimpangan Akses Pelatihan

   Meskipun Balai Latihan Kerja (BLK) telah dibangun, terdapat kemungkinan bahwa akses terhadap program pelatihan belum merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kesempatan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga diperlukan upaya perluasan jangkauan layanan serta penguatan strategi pemerataan akses pelatihan secara lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Keterbatasan Lapangan Kerja Lokal

   Meskipun penempatan tenaga kerja memenuhi target, lapangan kerja di tingkat lokal mungkin masih kurang dibandingkan jumlah pencari kerja, yang bisa memaksa mereka mencari pekerjaan di luar daerah atau luar negeri.

3. Kesesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Pasar

   Terdapat kemungkinan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan dinamika pasar tenaga kerja. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi serta daya

saing tenaga kerja, sehingga diperlukan penyesuaian kurikulum dan materi pelatihan agar lebih responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan industri.

4. Tantangan dalam Job Fair

   Tidak semua perusahaan mungkin terlibat dalam Job Fair, sehingga peluang kerja yang tersedia tidak mencakup seluruh sektor. Pencari kerja yang memiliki latar belakang atau kompetensi tertentu mungkin belum mendapatkan peluang yang optimal.

5. Keberlanjutan Pembebasan Biaya CPMI

   Program pembebasan biaya pelatihan dan uji kompetensi bagi CPMI perlu keberlanjutan. Jika anggaran tidak cukup memadai di masa depan, program ini berisiko dihentikan atau dikurangi cakupannya.

Rekomendasi:

1. Pemerataan Akses Pelatihan

   Perlu dilakukan perluasan jangkauan layanan Balai Latihan Kerja (BLK) hingga ke wilayah terpencil melalui pembentukan unit pelatihan baru, pelatihan bergerak (*mobile training unit*), atau kerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga pendidikan setempat. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses bagi seluruh calon tenaga kerja dalam memperoleh pelatihan keterampilan.

2. Peningkatan Kesesuaian Pelatihan

   Program pelatihan BLK perlu diselaraskan secara sistematis dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik saat ini maupun proyeksi kebutuhan di masa mendatang. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan industri, pelibatan pelaku usaha dalam penyusunan kurikulum, serta evaluasi berkala terhadap relevansi materi pelatihan guna meningkatkan efektivitas peningkatan kompetensi tenaga kerja.

3. Diversifikasi Peluang pada *Job Fair*

Penyelenggaraan *Job Fair* perlu dioptimalkan dengan mendorong partisipasi lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor usaha, termasuk sektor industri kreatif, digital, dan UMKM. Upaya ini bertujuan untuk memperluas ragam peluang kerja yang tersedia serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi berbagai latar belakang pencari kerja.

4. Penguatan Penciptaan Lapangan Kerja Lokal

   Pengembangan industri dan usaha lokal perlu diprioritaskan melalui pemberian insentif, kemudahan perizinan, serta dukungan pembiayaan dan pendampingan usaha. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal sehingga tenaga kerja tidak bergantung pada peluang kerja di luar daerah maupun luar negeri.

5. Keberlanjutan Program CPMI

   Pemerintah perlu menjamin ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk program pembebasan biaya bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Selain itu, program serupa dapat diperluas cakupannya untuk segmen tenaga kerja lainnya yang membutuhkan dukungan pembiayaan, guna meningkatkan akses terhadap peluang kerja secara adil dan berkesinambungan.

Kesimpulan:

Keberhasilan program peningkatan daya saing dan penyerapan tenaga kerja tercermin dari pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), capaian target penempatan tenaga kerja, optimalisasi layanan pada Mal Pelayanan Publik, serta penyelenggaraan Job Fair dan program pembebasan biaya bagi CPMI. Namun demikian, tantangan berupa ketimpangan akses, ketidaksesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar, serta keberlanjutan program masih perlu mendapat perhatian. Melalui perencanaan yang lebih terarah dan inklusif, peningkatan daya saing tenaga kerja diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dan berkelanjutan terhadap perekonomian daerah.

4. Misi 4

Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Tujuan 4

Tujuan meningkatkan **tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas** diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan direalisasikan dengan terwujudnya 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, dan meningkatnya kualitas manajemen ASN. Capaian kinerja sebesar 104,84%, dari target nilai yang ditetapkan 83,35 dan nilai hasil evaluasi tahun 2025 sebesar 87,38.

Tabel 3. 33

Target dan Realisasi Tujuan 4

No.	Tujuan		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori Nilai	BB (83,35)	A (87,38)	104,84	BB 75,00	116,51

Sumber: Kementerian PANRB

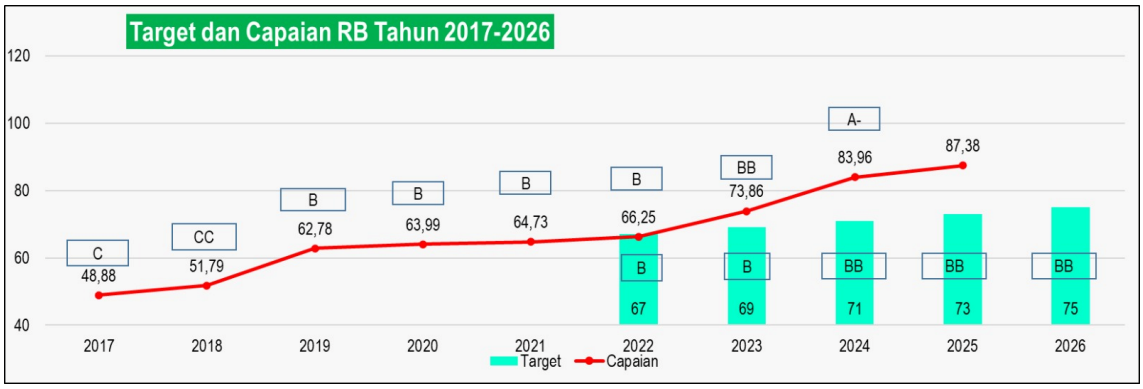
Indeks Reformasi Birokrasi Mulai Tahun 2023, telah dilakukan penajaman hubungan sebab akibat danpenyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansiterkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan MenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2025 tentang pelaksanaan reformasi birokrasi periode transisi tahun 2025, bahwa terdapat dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dikenal dengan 'double track', terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General bertujuan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk RB Tematik bertujuan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Untuk RB Tematik terdapat 5 (lima) tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta ditambah dengan 5 tema baru yakni RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari penjumlahan darii hasil Evaluasi RB General dan RB Tematik. Evaluasi RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategi reformasi birokrasi, sedangkan RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 sampai Tahun 2024 terus meningkat, bahkan target RPJMD Tahun 2026 pada tahun 2023 dan 2024 telah terlampui, sebagaimana data di bawah ini:

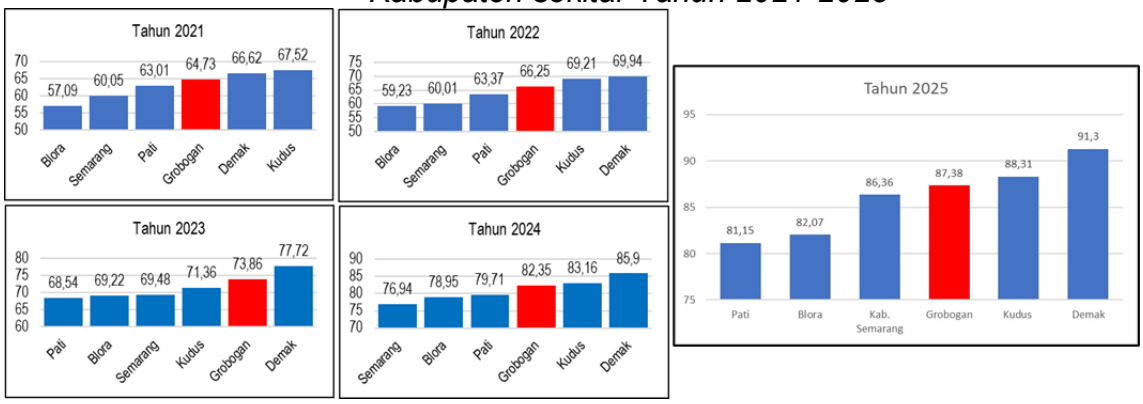
Grafik 3. 12
Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2026



Sumber: BPS

Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten sekitar dari tahun 2021-2025, Kabupaten Grobogan masih diurutan tengah, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 13 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kabupaten sekitar Tahun 2021-2025



Sumber: Kemen PANRB

b. Sasaran

b.1. Sasaran 12

Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni

Sasaran 12 diukur dengan indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 34
Target dan Realisasi Sasaran 12

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	6.	Rata-rata nilai IKM	Kategori Skor	B 86	B 86,77	100,90	B 79,70	106,02
		7.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat inovatif	Sangat Inovatif 65,48	114,17	Sangat inovatif	100,00
Rata-rata Capaian							**107,54**		**111,94**

Sumber: Setda dan Bapperida

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 12 terhadap realisasi kinerja indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 10,54%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran dapat tercapai dan dikategorikan sangat tinggi.

Capaian sasaran 12 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 35
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.759.307.958.666	1.679.922.735.554	1.602.731.635.464	95,41
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.487.043.800	16.855.274.800	16.005.194.504	94,96
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.264.572.500	1.843.460.000	1.599.601.928	86,77
4.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.167.770.700	11.034.715.700	8.850.829.108	80,21
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	158.878.000	129.042.000	120.853.486	93,65
6.	Program Pendaftaran Penduduk	62.275.000	62.275.000	50.744.720	81,48

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
7.	Program Pencatatan Sipil	92.290.000	92.290.000	80.250.500	86,95
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	231.322.000	180.831.000	154.287.125	85,32
9.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	31.700.000	31.700.000	29.283.250	92,38
	Jumlah	**1.788.803.810.666**	**1.710.152.324.054**	**1.629.622.680.085**	**95,29**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 12 sebesar Rp 1.629.622.680.085,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.710.152.324.054,00 atau sebesar 95,29%.

Faktor **yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 12 adalah sebagai berikut:**

a. Rata-rata nilai IKM

Faktor Keberhasilan:

1) Pencapaian Kinerja Melebihi Target

Realisasi skor IKM sebesar 86,77 melebihi target yang ditetapkan 86, dengan capaian kinerja mencapai 108,87%. Kinerja ini dinilai sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2) Kategori "BAIK" pada Skor IKM

Rata-rata nilai IKM yang berada dalam kategori "BAIK" menunjukkan bahwa mayoritas unit kerja telah memenuhi harapan masyarakat dalam hal pelayanan publik, memberikan dampak positif terhadap citra pemerintah.

3) Peningkatan Metode Survei Secara Online

Penerapan metode survei secara online mempermudah responden untuk memberikan masukan tanpa membutuhkan waktu khusus. Selain itu, metode ini juga memudahkan petugas dalam menganalisis hasil survei dengan lebih praktis dan cepat.

4) Kenaikan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei

Pada tahun 2025, sebanyak 52 unit kerja telah melaksanakan survei, menunjukkan komitmen yang meningkat untuk memantau dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

5) Dampak Positif pada Efisiensi dan Validitas Data

Pelaksanaan survei yang lebih luas dan berbasis online membantu meningkatkan efisiensi proses serta validitas data yang dikumpulkan, yang mendukung kebijakan berbasis bukti untuk perbaikan pelayanan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Unit Kerja yang Belum Melaksanakan Survei

Dari total 52 unit kerja, masih ada unit kerja yang belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja.

2) Keterbatasan Responden yang Tidak Akses Digital

Meski metode survei online lebih praktis, tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan platform digital, sehingga dapat mengurangi representasi dari kelompok tertentu dalam hasil survei.

3) Perluasan Kategori dari "BAIK" ke "SANGAT BAIK"

Meskipun skor IKM sudah baik, pencapaian yang lebih ambisius ke kategori "SANGAT BAIK" dapat menjadi tantangan berikutnya untuk meningkatkan kualitas layanan.

4) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Survei

Narasi tidak menyebutkan apakah ada mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut dari hasil survei, yang penting untuk memastikan masukan masyarakat benar-benar diimplementasikan dalam perbaikan pelayanan.

5) Ketergantungan pada Survei sebagai satu-satunya ukuran

Penggunaan survei sebagai indikator utama dapat menjadi tantangan jika tidak dikombinasikan dengan metode lain, seperti audit independen atau wawancara mendalam, untuk

memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap kualitas layanan.

Rekomendasi:

1) Mendorong Pelibatan Unit Kerja yang Belum Aktif
   Pastikan seluruh unit kerja berpartisipasi dalam survei untuk mencakup seluruh aspek pelayanan publik yang relevan.
2) Mengakomodasi Masyarakat Tanpa Akses Digital
   Sediakan alternatif survei manual atau bantuan teknis untuk masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan survei online, guna meningkatkan inklusivitas hasil survei.
3) Meningkatkan Target IKM ke Kategori "SANGAT BAIK"
   Fokus pada perbaikan aspek layanan yang masih mendapat skor rendah dalam survei untuk mencapai target skor yang lebih tinggi pada periode berikutnya.
4) Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Survei
   Terapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan masukan masyarakat digunakan secara efektif dalam merancang kebijakan atau perbaikan layanan.
5) Diversifikasi Metode Evaluasi
   Kombinasikan survei dengan metode lain, seperti wawancara langsung atau observasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepuasan masyarakat.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam mencapai skor IKM di atas target, kategori "BAIK", dan peningkatan metode survei online menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, tantangan seperti inklusivitas survei, tindak lanjut hasil survei, dan perbaikan menuju kategori "SANGAT BAIK" perlu diatasi agar capaian ini berkelanjutan dan lebih merata. Dengan strategi yang tepat, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan sesuai harapan masyarakat.

Secara lengkap jumlah unit kerja mapun skor yang dicapai pada tahun 2019—2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 36
Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2025

No.	Tahun	Jumlah Unit Kerja	Metode Survei		Rata-rata Skor	Kategori
			Manual	Online		
1.	2019	3	-	3	80,71	BAIK
2.	2020	10	6	4	82,40	BAIK
3.	2021	20	14	6	83,06	BAIK
4.	2022	48	40	8	83,08	BAIK
5.	2023	31	14	17	83,13	BAIK
6.	2024	51	21	30	84,50	BAIK
7.	2025	52	-	52	86,77	BAIK

b. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Faktor Keberhasilan:

1) Pencapaian Kategori "Sangat Inovatif"

Kabupaten Grobogan berhasil mencapai kategori "Sangat Inovatif" dengan nilai 74,76 yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan telah memenuhi standar tinggi dalam pengelolaan pemerintah daerah.

2) Tercapainya Capaian 114,17% dari Target

Realisasi nilai IID sebesar 100% menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target yang ditetapkan, menandakan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan dan pembangunan melalui inovasi.

3) Pengakuan Nasional dalam Peringkat Kategori Kabupaten

Meskipun terjadi penurunan peringkat, tetap berada dalam daftar kabupaten dengan kategori "Sangat Inovatif" secara nasional menunjukkan Grobogan masih diakui sebagai daerah dengan kemampuan inovasi yang baik.

4) Dorongan untuk Kompetisi Positif

Penilaian inovasi daerah mendorong kompetisi positif antar kabupaten yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan pembangunan. Hal ini memberikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Kurangnya Terobosan Baru yang Kompetitif

   Penurunan peringkat dapat mengindikasikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak cukup kuat atau kompetitif dibandingkan dengan kabupaten lain yang berhasil menciptakan inovasi lebih signifikan.

2) Ketiadaan Indikasi Peningkatan Kualitas Nilai IID

   Meskipun berada pada kategori "Sangat Inovatif," ada peningkatan kualitas nilai IID (74,76) yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ruang untuk pengembangan lebih lanjut.

3) Kurangnya Fokus pada Differensiasi Inovasi

   Tidak disebutkan diferensiasi inovasi yang menjadi daya saing utama bagi Kabupaten Grobogan. Inovasi yang kurang unik atau kurang menonjol bisa menjadi faktor penyebab penurunan peringkat.

4) Kurangnya Eksplorasi Inovasi Lintas Sektor

   Inovasi yang dilakukan mungkin hanya fokus pada sektor tertentu, sehingga kurang menonjol di tingkat nasional yang mengevaluasi inovasi lintas sektor untuk mendorong dampak yang lebih luas.

Rekomendasi

1) Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Inovasi

   Fokus pada terobosan baru yang lebih inovatif, relevan, dan berdampak luas agar dapat bersaing dengan kabupaten lain di tingkat nasional.

2) Penguatan Kolaborasi dan *Benchmarking*

   Belajar dari kabupaten yang lebih maju dalam inovasi untuk mengadopsi praktik terbaik dan berkolaborasi dalam proyek lintas sektor yang mendorong keunggulan bersama.

3) Evaluasi dan Penyempurnaan Strategi Inovasi

Lakukan evaluasi mendalam terhadap strategi inovasi yang ada dan pastikan bahwa setiap langkah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Promosi Inovasi yang Lebih Progresif

Tingkatkan promosi inovasi di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat citra Kabupaten Grobogan sebagai daerah yang inovatif.

5) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta

Libatkan masyarakat dan sektor swasta dalam proses inovasi untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan:

Keberhasilan Kabupaten Grobogan dalam mencapai kategori "Sangat Inovatif" dengan nilai IID 74,76 dan capaian target 114,17% mencerminkan adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan. Namun, tantangan seperti penurunan peringkat nasional, stagnasi kualitas inovasi, dan kurangnya fokus pada diferensiasi perlu menjadi perhatian utama. Dengan strategi pengembangan yang lebih intensif, inovasi Kabupaten Grobogan dapat kembali bersaing di posisi teratas secara nasional dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

b.2. Sasaran 13

Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 13 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 37
Target dan Realisasi Sasaran 13

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	6. Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,57	100,00	3,50	102,00

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, ditetapkan target 3,5 dan terealisasi sesuai hasil penilaian dari Kementerian PANRB sebesar 3,57, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan sasaran 13 tercapai dengan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 13 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 38
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	962.785.000	953.981.000	915.034.451	95,92
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.574.943.000	1.590.028.000	1.568.532.782	98,65
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	202.832.000	202.032.000	196.848.200	97,43
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	262.200.000	329.077.000	318.256.232	96,71
5.	Program Pengelolaan Arsip	247.602.000	282.057.000	278.403.621	98,70
6.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	95.000.000	95.000.000	94.136.495	99,09
7.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	95.000.000	69.654.000	67.179.991	96,45
	Jumlah	**3.440.362.000**	**3.521.829.000**	**3.438.391.772**	**97,63**

Program yang mendukung sasaran 13 sebanyak 7 (tujuh) program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.438.391.772,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.521.829.000,00 atau realisasi anggaran sebesar 97,63%.

Faktor yang mempengaruhi **keberhasilan sasaran 13 adalah sebagai berikut:**

Faktor Keberhasilan:

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki beberapa keunggulan utama:

1. Layanan Publik Berbasis Elektronik

   Adanya aplikasi atau layanan yang telah dilengkapi dengan fitur interaksi, transaksi, dan kolaborasi menunjukkan kemajuan signifikan. Optimalisasi ini dilakukan dengan menindaklanjuti reviu dan perbaikan tata kelola serta manajemen layanan.
2. Efektivitas dan Efisiensi

   Implementasi tata kelola yang baik di lingkup internal pemerintahan berkontribusi pada pelaksanaan SPBE yang lebih efektif dan efisien.
3. Kinerja Sangat Baik

   Dari hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendapatkan predikat "Sangat Baik" dalam penerapan SPBE, mencerminkan keberhasilan di berbagai aspek.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Perencanaan Strategis yang Terbatas: Pada aspek perencanaan strategis, khususnya terkait Arsitektur SPBE, terdapat kekurangan dalam penyusunan Referensi Arsitektur yang mencakup berbagai domain (layanan, informasi, infrastruktur, dan keamanan).
2. Dokumentasi Tidak Formal: Dokumentasi arsitektur yang ada belum memiliki bukti pengesahan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai dokumen formal yang valid.
3. Kekurangan dalam Pendekatan Strategis: Kelemahan ini dapat menghambat kesinambungan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan SPBE secara keseluruhan.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan SPBE, terutama pada aspek layanan berbasis elektronik. Namun, tantangan signifikan masih terdapat pada perencanaan strategis dan

dokumentasi formal Arsitektur SPBE. Untuk meningkatkan penerapan SPBE yang lebih terintegrasi, pemerintah perlu fokus pada penyusunan dokumen yang valid dan penguatan strategi jangka panjang di setiap domain arsitektur. Hal ini akan memastikan bahwa penerapan *e-government* dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak maksimal.

b.3. Sasaran 14

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Opini BPK. Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 14 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 39
Target dan Realisasi Sasaran 14

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	6.	Nilai SAKIP	Peringkat Nilai	BB 72	B 66,48	92,33	BB 73,50	90,45
		7.	Level Maturitas SPIP	Level Skor	Level 3 3,15	Level 3 2,974	94,41	Level 3 3,15	94,41
		8.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
Rata-rata Capaian							95,58		**94,94**

Sumber: Kementerian PANRB (Setda), BPKP (Inspektorat), BPK (BPPKAD)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sasaran 14 diukur dengan tiga indikator yaitu nilai SAKIP, level maturitas SPIP, dan opini BPK. Dari ketiga indikator tersebut hanya indikator Opini BPK mencapai target realisasi (100%), sehingga rata-rata capaian ketiga indikator sebesar 95,58% dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja nilai SAKIP sebesar 92,33% artinya mempunyai kategori kinerja sangat tinggi namun tidak tercapai.

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 predikat BB dengan nilai 73,5, realisasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 tercapai predikat B dengan nilai 66,48.

Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/603/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **66,48** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu Implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 40
Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2024-2025

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,02	23,25
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,16	19,26
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,65	9,68
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,10	14,29
	Nilai Hasil Evaluasi	**100,00**	**65,93**	**66,48**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Capaian sasaran 14 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 41
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	750.000.000	737.329.000	716.086.780	97,12%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.325.000.000	2.351.854.000	2.292.793.466	97,49%

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000	1.624.997.500	1.574.875.059	96,92%
4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	807.956.000	2.047.960.400	1.643.100.400	80,23%
5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	373,433.000	315.211.000	200.095.000	63,48%
6.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	485.542.828.000	3.496.715.500	2.783.326.255	79,60%
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.110.973.000	1.004.438.000	797.727.901	79,42%
8.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.865.128.000	4.949.581.000	4.478.031.912	90,47%
Jumlah		**498.225.318.800**	**16.528.086.400**	**14.486.036.773**	**87,64**

Program yang mendukung sasaran 14 sebanyak 8 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 14.486.036.773,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 16.528.086,00 atau realisasi anggaran sangat rendah hanya sebesar 87,64%.

b.4. Sasaran 15

Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN diukur dengan Indeks Sistem Merit. Indikator indeks penilaian sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah yang penilaiannya dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 15 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 42
Target dan Realisasi Sasaran 15

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	5. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori III (260,00)	Kategori III (273,00)	100,00	Kategori III 260,00	105,00

Sumber: BKPSDM (capaian Tahun 2023)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator indeks merit sistem tercapai sebesar 100%. Capaian ini dikategorikan kinerja sangat tinggi. Nilai 273 merupakan hasil capaian tahun 2023, dikarenakan tahun 2025 tidak dilakukan penilaian. Nilai dimaksud ditetapkan dalam Keputusan KASN Nomor 42/KEP.KASN/C/VII/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Capaian sasaran 15 meningkatnya kualitas manajemen ASN didukung dengan program-program:

Tabel 3. 43
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Kepegawaian Daerah	1.412.873.000	1.428.270.000	1.339.299.349	93,77
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.254.249.00	1.679.892.000	1.553.900.616	92,50
	Jumlah	**2.667.122.000**	**3.108.162.000**	**2.893.199.965**	**93,08**

Program yang mendukung sasaran 15 sebanyak 2 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.893.199.965,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.108.162.000,00 dengan realisasi sebesar 93,08%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan **pencapaian sasaran 15 adalah sebagai berikut:**

Faktor Keberhasilan:

1. Pengorganisasian dan Perencanaan ASN:

Perencanaan berbasis analisis jabatan (ANJAB), analisis beban kerja (ABK), audit kepegawaian, serta penyesuaian arah kebijakan nasional menunjukkan pendekatan strategis yang terarah.

2. Pengadaan ASN:
   Pelaksanaan penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan, dan non-diskriminatif mencerminkan implementasi prinsip keadilan dalam pengadaan pegawai.
3. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi:
   Proses pengangkatan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada talenta terbaik memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan ASN.
4. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi:
   Promosi dan mutasi dilakukan secara adil dan konsisten, mendukung prinsip meritokrasi dalam pengembangan karier ASN.
5. Manajemen Kinerja Berkelanjutan:
   Implementasi manajemen kinerja berkesinambungan mendorong pengawasan dan pencapaian kinerja secara efektif.
6. Pengembangan Kompetensi Pegawai:
   Pelatihan 20 JP (Jam Pelajaran) per tahun bagi pegawai menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, sekaligus mengurangi kesenjangan kompetensi.
7. Penghargaan untuk Pegawai:
   Penetapan kebijakan penghargaan finansial dan non-finansial memberikan motivasi tambahan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.
8. Pelindungan dan Pelayanan kepada Pegawai:
   Implementasi perlindungan dan pelayanan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pegawai.
9. Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian:

Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian mendukung efisiensi administrasi dan pengelolaan data secara lebih akurat.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Implementasi yang Konsisten:
   Meski banyak kebijakan dan proses telah diterapkan, keberhasilan penuh membutuhkan konsistensi dalam implementasi di semua unit kerja.
2. Kesenjangan Kompetensi:
   Meski pelatihan telah dirancang, pencapaian target kompetensi masih menjadi tantangan karena adanya variasi latar belakang pegawai.
3. Evaluasi dan Monitoring Sistem:
   Sistem informasi kepegawaian perlu terus dievaluasi agar dapat sepenuhnya mendukung kebutuhan organisasi dan fleksibel terhadap perubahan kebijakan.
4. Transparansi Lanjutan:
   Walaupun proses pengadaan dan promosi telah transparan, masih diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak adanya penyimpangan.
5. Penghargaan yang Berkesinambungan:
   Kebijakan penghargaan perlu disesuaikan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan dapat terus meningkatkan motivasi pegawai.

Kesimpulan:

Sistem merit di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan banyak keberhasilan yang mendukung tata kelola ASN yang profesional dan transparan. Namun, beberapa tantangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem merit.

5. Misi 5

Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

a. Tujuan 5

. Tujuan **meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan kerukunan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**, ditetapkan dengan dua indikator tujuan yaitu persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan dan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum. Selengkapnya kinerja tujuan 5 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 44
Target dan Realisasi Tujuan 5

No.	Tujuan		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	6.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	64,92	68,10	104,90	82,94	82,11
		7.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata capaian						102,45		91,05

Sumber: Disporabudpar, Bakesbangpol, Satpol PP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja terealisasi sebesar 102,45%, sehingga kinerja sasaran ini tercapai dan dikategorikan sangat tinggi. Target persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan sebesar 64,92% dan terealisasi sebesar 68,10%, sedangkan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum dari target 100,00% terealisasi sesuai target.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 16

Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah.

Kualitas pemajuan kebudayaan diukur melalui rata-rata obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan kesenian tradisional yang dilestarikan. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari tujuan 5 indikator 9, sehingga pencapaian sasaran 16 (indikator 29) sama dengan tujuan 5 indikator 9. Target dan realisasi sasaran 16 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 45
Target dan Realisasi Sasaran 16

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	6.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	**64,92**	**68,10**	**104,90**	**82,94**	**82,11**

Sumber: Disporabudpar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sebesar 104,90. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan target 64,92% terhadap realisasi 68,10%. Kinerja sasaran 16 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 16 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 46
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	820.000.000	1.033.500.000	1.007.015.180	97,44
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	692.070.000	196.250.000	193.019.900	98,35
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	200.000.000	692.070.000	665.569.103	96,17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
	Jumlah	1.712.070.000	1.921.820.000	1.865.604.183	97,07

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.865.604.183 dari anggaran Rp 1.921.820.000.

Faktor yang **mempengaruhi keberhasilan indikator sasaran 16 adalah sebagai berikut:**

Faktor Keberhasilan:

1. Capaian Kinerja yang Sangat tinggi.

   Pencapaian indikator sasaran sebesar 104,90% dengan kategori kinerja sangat tinggi.
2. Keberlanjutan Program Pelestarian Budaya:

   Penyelenggaraan pagelaran seni tradisional secara berkala menjadi kunci utama dalam menjamin eksistensi warisan leluhur. Dengan menjadikan prosesi Hari Jadi Kabupaten Grobogan sebagai agenda tahunan yang rutin, pemerintah daerah berhasil menciptakan ikon budaya yang mempertegas identitas kolektif masyarakat.
3. Komitmen Pemimpin dan Stakeholders:

   Adanya keselarasan visi antara pimpinan daerah dan para stakeholders mencerminkan dedikasi yang kuat terhadap perlindungan kekayaan lokal. Kebijakan ini berperan strategis dalam merawat keberagaman budaya nasional melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi:

   Belum disebutkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terukur untuk menilai dampak program pemajuan kebudayaan secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

Partisipasi masyarakat dalam program pemajuan kebudayaan masih menjadi tantangan untuk memastikan pelibatan yang lebih luas dan inklusif.

3. Pemanfaatan Teknologi:

   Belum terlihat inovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendigitalisasi dan mendokumentasikan budaya lokal agar lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda.

4. Efisiensi Anggaran yang cukup signifikan:

   Efisiensi anggaran berdampak cukup nyata terhadap upaya pelestarian kebudayaan dan cagar budaya. Perlu dilakukan skema pembiayaan yang tidak bergantu pada APBD untuk Keberlanjutan pembiayaan untuk pelestarian kebudayaan, terutama bagi program-program yang berbasis masyarakat.

5. Perluasan Dampak Kebudayaan dalam Pembangunan:

   Kebudayaan belum sepenuhnya terlihat sebagai elemen strategis lintas sektor dalam pembangunan, seperti dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan.

Kesimpulan:

Kabupaten Grobogan telah berhasil membangun fondasi yang kuat dalam pemajuan kebudayaan, didukung dengan capaian kinerja yang sangat tinggi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih luas, diperlukan perhatian pada aspek monitoring, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, pembiayaan, dan integrasi lintas sektor.

b.2. Sasaran 17

Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum

Penanganan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum diukur dengan dua indikator sasaran yaitu toleransi antar umat beragama dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani. Target dan realisasi sasaran 17 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 47
Target dan Realisasi Sasaran 17

No.	Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	%		
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	6.	Persentase toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00
		7.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian							**100,00**		**100,00**

Sumber: Bakesbangpol dan Satpol PP

Pencapaian kinerja sasaran 17 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%, sehingga tercapai dan termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 17 yaitu tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum didukung dengan program-program:

Tabel 3. 48
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	848.244.000	854.772.000	836.383.350	97,85%
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500.000.000	471.600.000	442.117.130	93,75%
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.209.802.500	2.383.444.500	2.365.002.899	99,23%
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.769.775.000	2.788.025.000	2.528.696.618	90,70%
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	141.000.000	136.500.000	130.534.610	95,63%

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	469.000.000	439.000.000	384.518.110	87,59%
7.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.685.920.000	4.903.185.800	4.193.980.096	85,54%
8.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.683.000	192.612.000	183.399.600	95,22%
Jumlah		**11.673.424.500**	**12.169.139.300**	**11.064.632.413**	**90,92%**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 17 sebesar Rp 12.169.139.300 dari anggaran yang disediakan perubahan sebesar Rp 11.064.632.413 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 90,92%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 17 adalah sebagai berikut:

a. Persentase toleransi antar umat beragama

Keberhasilan

1) Capaian Kinerja yang Optimal:

Pencapaian indikator persentase toleransi antar umat beragama sebesar 100,00% menunjukkan bahwa target ini telah tercapai sepenuhnya.

2) Sosialisasi yang Efektif:

Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan secara konsisten telah membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama.

3) Kegiatan Keagamaan yang Berkelanjutan:

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan secara rutin telah menjadi wadah interaksi positif antar kelompok masyarakat, memperkuat rasa saling menghormati.

4) Dukungan Pemerintah Daerah:

Komitmen pemerintah dalam mendukung program toleransi berkontribusi pada stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Grobogan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

   Belum disebutkan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menilai efektivitas jangka panjang dari program toleransi.

2) Partisipasi Masyarakat yang Lebih Luas:

   Meski capaian sangat tinggi, namun cakupan partisipasi perlu diperluas dengan menggandeng dengan kelompok minoritas maupun kelompok marginal

3) Pencegahan Konflik Potensial:

   Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik antar umat beragama melalui pendekatan yang lebih proaktif.

4) Inovasi dalam Pendekatan Program:

   Pendekatan program toleransi masih bisa lebih inovatif, misalnya dengan memanfaatkan teknologi atau platform digital untuk memperluas jangkauan.

5) Peningkatan Kesadaran Generasi Muda:

   Pelibatan generasi muda sebagai agen toleransi perlu ditingkatkan, misalnya melalui kegiatan edukatif atau kampanye kreatif.

Kesimpulan:

Kabupaten Grobogan telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menjaga persentase toleransi antar umat beragama. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat menumbuhkan kan rasa toleransi dan kerukunan antar warga. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan dampaknya, diperlukan fokus pada inovasi program, partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan penguatan monitoring serta evaluasi.

b. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani

Faktor Keberhasilan:

1) Capaian Kinerja Optimal:

   Indikator persentase gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani tercapai dengan baik (100,00%), mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dan penanganan gangguan ketertiban umum.

2) Peningkatan Karakter Kebangsaan:

   Pendidikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi agenda penting dalam mendidik generasi muda berhasil menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi, mendukung situasi kondusif di masyarakat.

3) Penegakan Peraturan Daerah (Perda):

   Penegakan Perda berjalan secara efektif melalui patroli rutin, yang mampu meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Penguatan Satlinmas hingga Tingkat Kecamatan:

   Pembentukan, pelatihan, dan pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) hingga tingkat kecamatan memberikan cakupan luas serta kecepatan respons dalam menangani gangguan Trantibum Linmas. Ketersediaan sarana dan personel yang memadai meningkatkan kemampuan operasional Satlinmas.

5) Peningkatan *respon time* penanganan kejadian bencana

   Dalam menanggapi pelaporan kejadian bencana baik bencana kebakaran maupun bencana alam lainyya dapat direspon dengan tepat dan cepat sehingga banyak warga yang terbantu.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Monitoring dan Evaluasi Program:

Belum disebutkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur untuk memastikan keberlanjutan efektivitas program penanganan gangguan Trantibum Linmas.

2) Koordinasi Antar Stakeholders:

   Tantangan dalam koordinasi lintas instansi, terutama dalam penegakan Perda yang mungkin memerlukan keterlibatan lebih dari satu pihak, seperti Satpol PP dan institusi hukum lainnya.

3) Pemanfaatan Teknologi:

   Belum terlihat inisiatif untuk memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang mendukung pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban umum.

4) Partisipasi Masyarakat:

   Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pendekatan berbasis komunitas atau program pemberdayaan lokal.

5) Perhatian terhadap Wilayah Khusus:

   Wilayah-wilayah dengan potensi gangguan Trantibum yang lebih tinggi mungkin membutuhkan pendekatan khusus, seperti pemetaan risiko gangguan dan alokasi sumber daya yang lebih besar.

Kesimpulan:

Kabupaten Grobogan berhasil mencatatkan pencapaian sempurna sebesar 100,00% dalam penanganan gangguan Trantibum Linmas. Meskipun hasil ini menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi, kesinambungan program di masa depan perlu diperkuat melalui integrasi teknologi, optimalisasi sistem monitoring, serta penguatan sinergi lintas sektor dan pemberdayaan partisipasi publik.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan persentase capaian kinerja atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika target kinerja tercapai atau capaian kinerja sebesar ≥ 100%, dan persentase capaian atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran lebih besar dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan
2. **Tidak efisien**, jika target kinerja tidak tercapai atau persentase capaian atau rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100%.

Analisis efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 49
Analisis Efisiensi pada Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
MISI I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing										
I	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.**	100	100,58	**100,58%**	308.830.214.595	300.662.049.661	**97,36%**	**3,31%**	9.956.950.625	Efisien
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	100	101,80	**101,80%**	185.071.977.595	183.755.742.885	**99,29%**	**2,53%**	4.645.021.462	Efisien
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100	100,24	**100,24%**	108.484.052.300	102.138.986.957	**94,15%**	**6,47%**	6.604.080.191	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	100	122,60	**122,60%**	15.274.184.700	14.767.319.819	**96,68%**	**26,81%**	3.959.574.162	Efisien
Misi II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana										
II	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.**	100	107,71	**107,71%**	91.164.724.016	88.165.817.143	**96,71%**	**11,37%**	10.025.358.834	Efisien
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	100	103,37	**103,37%**	67.000.971.316	64.822.253.597	**96,75%**	**6,85%**	4.439.378.507	Efisien
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	100	102,36	**102,36%**	11.657.010.100	11.233.552.074	**96,37%**	**6,21%**	698.109.064	Efisien
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	100	100,00	**100,00%**	12.506.742.600	12.110.011.472	**96,83%**	**3,28%**	396.731.128	Efisien
Misi III: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing										
III	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	100	103,00	**103,00%**	74.200.585.400	70.944.705.565	**95,61%**	**7,72%**	5.478.709.091	Efisien
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	100	78,18	**78,18%**	48.806.312.000	46.219.591.062	**94,70%**	**-17,45%**	-8.063.647.009	Tidak Efisien
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	100	141,51	**141,51%**	670.800.000	644.700.500	**96,11%**	**47,23%**	304.520.839	Efisien
9	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	100	108,45	**108,45%**	13.615.353.000	13.114.444.033	**96,32%**	**12,59%**	1.651.502.178	Efisien
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	100,00	**100,00%**	8.584.649.000	8.537.453.719	**99,45%**	**0,55%**	47.195.281	Efisien
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	100	103,41	**103,41%**	2.523.471.400	2.428.516.251	**96,24%**	7,45%	2.609.410.054	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
Misi IV: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
IV	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	100	103,41	**103,41%**	2.523.471.400	2.428.516.251	**96,24%**	103,41	166.676.222.647	Efisien
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	100	107,53	**107,53%**	1.710.152.324.054	1.629.622.680.085	**95,29%**	**12,85%**	209.369.229.543	Efisien
13	Meningkatnya penerapan *e- government* yang terintegrasi	100	100,00	**100,00%**	3.521.829.000	3.438.391.772	**97,63%**	**2,43%**	83.437.228	Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	100	95,58	**95,58%**	16.528.086.400	14.486.036.773	**87,64%**	**9,06%**	1.311.840.519	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	100	100,00	**100,00%**	3.108.162.000	2.893.199.965	**93,08%**	**7,43%**	214.962.035	Efisien
Misi V: Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat										
V	**Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**	100	102,45	**102,45%**	14.090.959.300	12.930.236.596	**91,76%**	**11,65%**	1.505.833.999	Efisien
16	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	100	104,90	**104,90%**	1.921.820.000	1.865.604.183	**97,07%**	**8,06%**	150.353.026	Efisien
17	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	100	100,00	**100,00%**	12.169.139.300	11.064.632.413	**90,92%**	**9,98%**	1.104.506.887	Efisien
Rata-rata tingkat efisiensi level tujuan (5 tujuan)								**8,83%**		
Rata-rata tingkat efisiensi level sasaran (17 sasaran)								**5,69%**		

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efisiensi dilevel tujuan sebesar 8,843 yang meliputi di tujuan 1 sebesar 3,31%, tujuan 2 sebesar 11,37%, tujuan 3 sebesar 7,72%, tujuan 4 sebesar 10,10% dan tujuan 5 sebesar 11,65.

Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi dilevel sasaran sebesar 2,3% Metode pengukuran tingkat efisiensi tidak hanya mengukur persentase realisasi anggaran, tetapi juga persentase capaian kinerja. Apabila semakin tinggi persentase capaian kinerjanya, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya

Tabel 3. 50
Realisasi Anggaran Perubahan per Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Program Per Misi	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
1.	Program Misi 1	439.406.675.600	308.830.214.595	300.662.049.661	97,36%	8.168.164.934	2,64%
2.	Program Misi 2	199.246.377.090	91.164.724.016	88.165.817.143	96,71%	2.998.906.873	3,29%
3.	Program Misi 3	90.635.247.928	74.200.585.400	70.944.705.565	95,61%	3.255.879.835	4,39%
4.	Program Misi 4	2.293.136.613.466	1.733.310.401.454	1.650.440.308.595	95,22%	82.870.092.859	4,78%
5.	Program Misi 5	13.385.494.500	14.090.959.300	12.930.236.596	91,76%	1.160.722.704	8,24%
	Jumlah	**3.035.810.408.584**	**2.221.596.884.765**	**2.123.143.117.560**	**95,57%**	**98.453.767.205**	**4,43%**

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa anggaran tahun 2025 penetapan sebesar Rp. 3.035.810.408.584,. Setelah Perubahan menjadi Rp. 2.221.596.884.765 atau berkurang Rp. 814.213.523.819 dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.123.143.117.560, sehingga sisa anggaran sebesar Rp 98.453.767.205 (3,42%).

E. Inovasi Kabupaten Grobogan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam memberikan pelayanan telah menetapkan budaya "*one agency one inovation*" bagi perangkat daerah dan unit kerja. Adapun inovasi yang telah di Kabupaten Grobogan, diantaranya:

1. **Si Dilan Purna Tugas ASN**
   adalah inovasi yang digunakan untuk memudahkan layanan pengajuan usul pensiun/pemberhentian ASN menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien dengan sistem digital yang terintegrasi.
2. **Aplikasi "Si Eneng"** (Sistem E-learning Grobogan)
   adalah inovasi dari BKPSDM yang digunakan sebagai media pembelajaran secara mandiri, fleksibel, bebas biaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat pengembangan kompetensi ASN..
3. **Aplikasi "Panjat "** (Penilaian Kinerja 360 derajat)
   merupakan inovasi dari BKPSDM yang digunakan sebagai Penilaian Kinerja 360 (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) bertujuan untuk melakukan

penilaian kinerja ASN oleh atasan langsung, bawahan dan rekan kerja untuk saling memberikan penilaian secara objektif.

4. **SIGANA** (Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana)
   adalah inovasi yang memanfaatkan data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis lokasi. Dengan Teknis masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dalam aplikasi SIGANA dan memantau kejadian bencana dari awal hingga dapatnya penanganan bencana secara real time.
5. **MENCARI KEKASIHKU** (Menikah atau Cerai , KK Dan KTP Seketika Itu Kumiliki)
   adalah inovasi terkait penyerahan KK dan KTP status Perkawinanan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.
6. **PASTIPAS**
   adalah Inovasi yang dikembangkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, relawan, serta pemangku kepentingan terkait dalam penanganan fisik pasca bencana di Kabupaten Grobogan. Inovasi ini menekankan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan gotong royong dalam proses pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
7. **SIGAP-TANGGAP**
   yaitu novasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data kinerja secara terintegrasi di lingkungan BPBD Kabupaten Grobogan. Inovasi ini dirancang sebagai pusat pengolahan dan penyajian data kinerja yang menghimpun berbagai informasi dari seluruh bidang dalam satu sistem terpadu.
8. **PANTES GEBER**
   adalah inovasi yang digunakan untuk mendorong percepatan dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan SKPD menuju laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel di Kab. Grobogan.
9. **Integrasi Data Sistem Penggajian dengan data kepegawaian menuju optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN Kab. Grobogan**
   merupakan inovasi yang digunakan untuk integrasi data sistem penggajian dengan data sistem kepegawaian.

10. **STIKER LOVE BUSAMIL**

    adalah inovasi yang bertujuan untuk menekan angka kematian bayi dan menekan angka ibu hamil dengan anemia.

11. **GANJAL MERTUA** (Gerakan Jiwa Raga Yang Membutuhkan Bantuan Kita)

    adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka deteksi dini masalah penyakit jiwa pada masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilankader kesehatan jiwa dalam melakukan skrining dan pendampingan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.

12. **Klinik Koperasi Hybrid System**

    yaitu, inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi melalui pola layanan hybrid (offline–online), memberikan akses layanan yang lebih luas, cepat, dan terjangkau bagi koperasi, terutama yang berada di wilayah terpencil, menghadirkan layanan berbasis kebutuhan nyata koperasi (down-up case system) sebagai penyeimbang kebijakan top-down, memperkuat daya saing koperasi melalui konseling, pelatihan, dan pendampingan yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dan menciptakan tata kelola pembinaan koperasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sesuai kebutuhan pasar.

    .

13. **GEMA RUSA MENUKU** (Gerakan Bersama Guru Bisa Menulis Buku)

    yaitu, inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui literasi menulis, menciptakan guru profesional, literat, dan berdampak, memperkaya sumber belajar dan ekosistem literasi, membangun citra daerah melalui gerakan literasi massal dan menjawab tuntutan era digital.

14. **Si CERDAS (**Sistem Cuti Elektronik Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan)

    merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi cuti melalui pengurangan waktu proses, menurunkan biaya operasional melalui eliminasi dokumen fisik dan

transportasi, meningkatkan transparansi dengan menyediakan sistem tracking real-time bagi pengaju dan pejabat yang berwenang dan peningkatan akurasi data melalui integrasi database kepegawaian, peningkatan aksesibilitas layanan bagi guru di seluruh wilayah kecamatan, serta penguatan tata kelola melalui sistem dokumentasi digital yang terintegrasi dan dapat diaudit.

15. **JELAS BOS** (Juklak dan E-book Pelaporan Sistematis BOSP) merupakan inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi Pengelolaan dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
16. **SI GESIT** (Sistem Infortmasi Dan Pelayanan Terintegrasi Berbasis WEB)

    merupakan inovasi yang digunakan sebagai alat pengendalian dan penjaminan mutu dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) Satuan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
17. **DIGITALISASI ARSIP DOKUMEN KEPENDUDUKAN** merupakan inovasi yang digunakan sebagai upaya penyelamatan informasi untuk masa yang akan datang yaitu untuk menyelamatan arsip akta kelahiran dengan cara membackup arsip secara fisik, menhindari ancaman kerusakan dan kehilangan, dengan demikian arsip menjadi lebih aman dan terlindungi dan mempercepat temu kembali arsip sehingga dapat memanfaatkan waktu kerja pegawai menjadi lebih efektif.
18. **Inovasi Ketan Gober** (Paket Pelayanan Grobogan Berkah , Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP) merupakan inovasi yang bertujuan untuk merubah mekanisme pencetakan akta kematian dan memberikan kepastian kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia, serta perubahan Kartu Keluarga dan perubahan status KTP untuk keluarga yang di tinggalkan.
19. **Inovasi Ketan Goria** (Paket Pelayanan Grobogan Ceria, Pelayanan Surat Pindah terintegrasi KK dan KTP) merupakan inovasi yang bertujuan menyederhanakan dan

mempermudah proses pelayanan sehingga menjadi lebih cepat dan akurat, memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat dan memberikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

20. **Inovasi Ketan Go Senyum** merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama non Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP.
21. **DALANG PERKASA** (Datang Langsung Perekaman Di Desa) merupakan inovasi yang bertujuan untuk melakukan perekaman ktp elektronik bagi semua penduduk Kabupaten Grobogan, sehingga penduduk hanya memiliki satu data tunggal kependudukan.
22. **E-Simpel** (Sistem Informasi Pelayanan secara online) merupakan inovasi Aplikasi pendaftar online E-SIMPEL dapat di akses melalui alamat website https://layanandukcapil.grobogan.go.id/.
23. **CHATBOT WHATSAPP LAYANAN DAN STATUS LAYANAN ADMINDUK**

    merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor Dispendukcapil. Masyarakat dapat mengetahui persyaratan secara lengkap sebelum mengajukan permohonan, sehingga dapat meminimalkan risiko berkas tidak lengkap dan mengurangi frekuensi bolak-balik ke kantor pelayanan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau jauh dari pusat pemerintahan, chatbot membantu menghemat waktu dan biaya transportasi. Di sisi lain, keterbukaan informasi melalui chatbot juga berkontribusi dalam mengurangi praktik percaloan karena masyarakat memperoleh informasi resmi langsung dari sumber yang terpercaya.

24. **BERAMAL** (Berikan Akta Kematian dan Akta Kelahiran) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sampai di tingkat desa sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat, menghapus praktek calo dan pungutan liar dan meningkatkan validitas data kependudukan.
25. **ADM Desa** (Anjungan Dukcapil Mandiri Desa / Kelurahan) inovasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan cetak dokumen adminduk di desa/kelurahan.
26. **POS PAKDE** (Pos Pelayanan administrasi kependudukan Desa / Kelurahan)

    Inovasi POS PAKDE bertujuan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan, jumlah penerbitan dokumen kependudukan khususnya KK, KTP-el, KIA, SKP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, meningkatkan kualitas pelayanan adminduk menuju pelayanan prima, mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan adminduk, mencegah adanya pungutan liar dan calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta mendekatkan pelayananadminduk kepada masyarakat sehingga membatasi mobilitas masyarakat untuk mengurangi risiko terpapar Covid 19, yang tentunya turut mendukung program PPKM Jawa-Bali yang diberlakukan oleh Pemerintah.
27. **SIAPA NONA** (Sistem Informasi Pendataan penduduk non permanen) merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi dan mobilitas penduduk non permanen di wilayah kabupaten grobogan, tersedianya data penduduk non permanen dalam rangkta tertib administrasi kependudukan dan memberikan informasi mengenai tata cara pendataan penduduk non permanen pada stakeholder terkait semua kerjasama lebih lanjut.
28. **Becak Pintar** (Begitu Di Cetak, KTP dan KIA siap diantar) merupakan hasil kerjasama antara Dispendukcapil Kabupaten Grobogan dengan jasa ekspedisi untuk mengantarkan KTP-el atau KIA ke alamat penduduk dengan sistem COD (Cash On Delivery) yaitu pemohon membayar jasa pengiriman dokumen. Inovasi ini bertujuan

untuk meningkatkan capaian penerbitan dokumen KTP-el dan KIA dan memastikan dokumen dapat diterima secara langsung di rumah pemohon.

29. **LENTERA KIA** (Lahir Mendapatkan Akta kelahiran besera KK dan KIA)

    Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan penerbitan akta kelahiran melalui faskes , meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, mempermudah layanan akta kelahiran dan menghapus praktek percaloan.

30. **DIK VICA** (Daftarkan Identitas Kependudukan Digital Via Video Call) adalah proses di mana penduduk melakukan video call melalui nomor admin petugas IKD untuk memperoleh barcode yang digunakan dalam proses registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
31. **SIJAKA JAWARA** (Sistem Integrasi Ijazah dan Kartu Keluarga) merupakan inovasi yang digunakan untuk mewujudkan data kependudukan yang valid / akurat di Kabupaten Grobogan.
32. **CEKATAN** (Cepat Rekam Penduduk Rentan) merupakan inovasi yang digunakan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP-el bagi seluruh penduduk Rentan di Kabupaten Grobogan dan mendekatkan akses layanan
33. **Data Online Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan (Dokar Grobog)**

    merupakan inovasi yang bertujuan untuk menyajikan data wajib uji kendaraan bermotor secara online dalam upaya tranparansi data dan keterbukaan publik kepada masyarakat.

34. **Sistem Informasi Perlintasan Sebidang Kereta Api Sebagai Upaya Mewujudkan Zero Accident di Kabupaten Grobogan**

    merupakan inovasi yang bertujuan untuk menyajikan data perlintasan sebidang kereta api dan data angkutan secara lengkap, valid dan reliabel (dapat dipercaya) serta dapat mendukung perencanaan pengembangan inovasi, peningkataan kualitas infrastruktur, penanganan permasalahan terkait perlintasan sebidang kereta api dan angkutan di Kabupaten Grobogan.

35. **Grobog Berjukir (Grobogan Bebas Juru Parkir Liar)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan perparkiran di Kabupaten Grobogan.
36. **TEMANI PELATIHAN (Sistem Manajemen Informasi Pelatihan)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk keterbukaan data pelatihan untuk masyarakat yang dapat diakses melalui link Temani Pelatihan yang mencakup banyak fitur mulai dari proses TNA (Training Needs Analysis), DPA / POK, Sosialisasi, Pendaftaran, Pelaksanaan Pelatihan, Laporan, hingga tracking kebekerjaan.
37. **SIABANG (Sistem Informasi Aset Tanah dan Bangunan)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pemenuhan data aset tanah dan bangunan diatasnya untuk prioritas perencanaan dan pengamanan aset yang menjadi kewenangan Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terkini dan akurat.
38. **PENDI RTLH (Pelayanan Berbasis Digital dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan RTLH dan mengurangi kemiskinan melalui digitalisasi layanan, serta menyediakan data yang valid dan ter-update secara berkala.
39. **Teman Suka Kurma (Tematik Taman Ir. SUKARNO dan Kuliner Simpanglima)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, pertumbuhan ekonomi lokal, serta kualitas sarana dan prasarana lingkungan melalui penataan kawasan tematik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
40. **Diparis (Digitalisasi Arsip Terintegrasi)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi arsip di Disperindag melalui optimalisasi pengelolaan arsip sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
41. **Jaran Tosa (Jaringan Pemasaran IKM di Toko Swalayan)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk melakukan kurasi produk IKM lokal untuk pasaran global, melalui display produk di toko swalayan.

42. RAT HUNTER

merupakan inovasi yang bertujuan sebagai upaya pengendalian tikus dengan predator burung hantu yang dapat dilakukan oleh petani dan memberikan keuntungan baik dari sisi biaya maupun lingkungan. Inovasi ini telah direplikasi oleh banyak desa di Kabupaten Grobogan.

43. RUMAH KEDELAI GROBOGAN (RKG)

merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (pip), peningkatan luas area tanam, peningkatan produksi dan peningkatan produksi kedelai.

44. TANAM TUAI

merupakan inovasi yang bertujuan untuk efisiensi dengan alsintan, peningkatan produksi dengan tehnologi dan peningkatan pendapatan dengan kemitraan.

45. GROBOGAN AGRO EDUPARK (GROBAG DUPARK)

merupakan inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan tempat pembelajaran bagi petani dalam membudidayakan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Grobogan Agro Edu Park dapat digunakan sebagai percontohan / demplot untuk meningkatkan potensi wisata agro, produktivitas, dan membantu meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan mandiri serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat di sektor pertanian. Grobogan Agro Edu Park memiliki lahan seluas ± 3 ha, dengan berbagai jenis tanaman yang ada antara lain Anggur, Alpukad, Vanili, Salak, Kelengkeng dan Porang. Tanaman tersebut ditanam secara terpisah antara satu tanaman dengan tanaman lain, karena perlu perawatan berbeda-beda. Perawatan pada lahan demplot dilakukan mulai dari pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama penyakit. Dengan perawatan yang baik dan benar, tanaman buah yang belum banyak dikembangkan di Kabupaten Grobogan, ternyata dapat tumbuh dengan baik di lahan demplot Grobogan Agro Edu Park. Dengan adanya Grobogan Agro Edu Park ini dapat membantu petani yang ingin belajar tentang budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi. Petani tidak perlu ke luar daerah dengan biaya yang tinggi untuk mengetahui budidaya tanaman-tanaman bernilai ekonomi tinggi. Selain itu dengan adanya

Grobogan Agro Edu Park ini, petani juga bisa belajar lebih dari satu komoditas. Dengan berkunjung ke lokasi Grobogan Agro Edu Park ini, petani bisa langsung melihat kondisi tanaman dan bisa belajar banyak tentang teknik-teknik budidaya yang baik dan benar. Sehingga petani bisa meniru dan menerapkan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di lokasi wilayah sendiri.

46. **SReG (Sri Rejeki Grobogan)**

    Merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui penggunaan benih kacang hijau varietas lokal bersertifikat “SReG (Sri Rejeki Grobogan).

47. **AKSELERASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (SIPENTA) BERBASIS USULAN KELOMPOK TANI GUNA PENINGKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN** merupakan inovasi yang bertujuan untuk tersusunnya database usulan kelompok tani secara valid dan update di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melalui akselerasi sistem infomarmasi perencanaan pembangunan pertanian (SIPENTA).

48. **KEBO DESO (Kerjasama Kolaboratif dengan Stakeholder)** merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau Grobogan pada umumnya. Kerjasama kolaboratif dan membangun jejaring antar petani dan antar pelaku usaha komoditas tembakau di Kabupaten Grobogan.

49. **INOVASI DIGITAL PADA LAYANAN KONSELING PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT KABUPATEN GROBOGAN** merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kabupaten Grobogan terhadap layanan konseling yang cepat, mudah, dan tepat, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil, melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, mempercepat proses penanganan kasus, serta meningkatkan efisiensi manajemen layanan melalui sistem

pendaftaran dan pengelolaan data yang terintegrasi. Harapan pada inovasi ini yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan mendukung terwujudnya keluarga yang aman, sehat, dan kondusif di Kabupaten Grobogan.

50. **Jempol Bola**

merupakan inovasi Jemput bola layanan perizinan dan non perizinan di ruang publik atau di pasar.

51. **PETIS MANIS (Operasi Yustisi Gabungan Dengan Dinas Terkait Untuk Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat) Di Kabupaten Grobogan**

merupakan inovasi yang bertujuan untuk terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan optimalisasi operasi yustisi dengan dinas terkait di Kabupaten Grobogan.

52. **PENSILMAS (Digitalisasi Proses Pengajuan Bantuan Sosial Anggota Linmas di Kabupaten Grobogan)**

merupakan inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bantuan sosial LINMAS yang cepat, tepat, dan akuntabel melalui digitalisasi pengajuan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja dari 5 (lima) tujuan, semuanya 5 (lima) tujuan **TERCAPAI (100,00%).**

b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%).**

c. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 7 (tujuh) indikator tujuan **TERCAPAI (70,00%)** dan sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (30,00%)**. Tiga indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar 79,89%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 90,08%, dan Angka Kemiskinan sebesar 96,19%.

d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indiaktor berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar (79,89%).

Tabel 4. 1
Capaian Kinerja di level Tujuan Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.**				**100,58**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
1	Indeks Pembanguna Manusia (IPM)	Indeks	72,27	72,94	100,93	Tercapai	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,45	86,65	100,23	Tercapai	Sangat Tinggi
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.**				**107,70**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
3	Tingkat Pembangunan	%	82,97	66,2852	79,89%	Tidak	Tinggi

	Insfrastruktur Daerah					Tercapai	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55	71,66	90,08%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140,00)	Sedang (65,59)	153,15%	Tercapai	Sangat Tinggi
III.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**				**102,99**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
6	**Pertumbuhan Ekonomi**	%	5±1	5,49	109,80	Tercapai	Sangat Tinggi
7	**Angka Kemiskinan**	%	9,76–10,24	10,63	96,19	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**				**104,84**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	A (83,35)	A (87,38)	104,84	Tercapai	Sangat Tinggi
V.	**Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**				**102,45**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
9	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	64,92	68,1	104,90	Tercapai	Sangat Tinggi
10	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan					**103,71**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
Rata-rata Capaian Kinerja Per Indikator Tujuan					**104,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2024 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir							

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

a. Tingkat efisiensi dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN,** dengan **tingkat efisiensi sebesar 8,83% atau senilai Rp.193.643.075.197,-** (Seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)

b. Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, 15 (empat belas) sasaran **TERCAPAI (88,23%),** Tiga sasaran yang tidak tercapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah (78,18), dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta

pengawasan (95,58%) **dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,11%.**

c. Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator **TERCAPAI** (70,96%) dan sebayak 9 (Sembilan) indikator **TIDAK TERCAPAI** (29,04%). Sembilan indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Persentase Infrastruktur Jalan, Drainase, dan Sumber Daya Air Kondisi Baik (89,46%), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang (99,76%), Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni (99,73%), Indeks Kualitas Udara (80,29%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (88,55), Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-16,62%), Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD (75,08%), Nilai SAKIP (92,33%), dan Level Maturitas SPIP (94,41%)

Tabel 4. 2
Capaian Kinerja di level Sasaran Perjanjian Kinerja
Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No		Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	%		
Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing								
1.	**Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan**					**101,80**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	1	Harapan Lama Sekolah	%	12,49	12,58	100,72%	Tercapai	Sangat Tinggi
	2	Rata-rata lama Sekolah	%	7,3	7,51	102,88%	Tercapai	Sangat Tinggi
2.	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**					**100,24**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	3	Usia Harapan hidup	%	75,39	75,57	100,24%	Tercapai	Sangat Tinggi
3.	**Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak**					**122,6**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	4	Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Madya (0,6375 – 0,7724)	0,947	122,60%	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana								
4.	**Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah**					**103,37**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	5	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan	%	88,31	79	89,46%	Tidak Tercapai	Tinggi

No		Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	%		
		sumberdaya air kondisi baik						
	6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,62	92,4	99,76%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	7	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	78	77,79	99,73%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	8	Kinerja Lalu Lintas (V/C *ratio*)	Kategori	B (0,20-0,44)	0,332	124,55%	Tercapai	Sangat Tinggi
5.	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3**					**102,36**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	9	Indeks Kualitas Air	Indeks	54	72,28	133,85%	Tercapai	Sangat Tinggi
	10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91	73,52	80,79%	Tidak Tercapai	Tinggi
	11	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	63,2	67,14	106,23%	Tercapai	Sangat Tinggi
	12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	53	46,93	88,55%	Tidak Tercapai	Tinggi
6.	**Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana**					**100,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	13	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88	0,88	100,00%	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan III:	**Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing**							
7.	**Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah**					**78,18**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	14	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	3,31	-0,55	-16,62%	Tidak Tercapai	Sangat Rendah
	15	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	4,72	5,52	116,95%	Tercapai	Sangat Tinggi
	16	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	5,55	7,62	137,30%	Tercapai	Sangat Tinggi

No		Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	%		
	17	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	3,01	2,26	75,08%	Tidak Tercapai	Tinggi
8.	**Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional**					**141,51**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	18	Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	2.643	3.740	141,51%	Tercapai	Sangat Tinggi
9.	**Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa**					108,45	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	19	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71	0,77	108,45%	Tercapai	Sangat Tinggi
10.	**Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**					**100,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	20	Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,4	1,4	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
11.	**Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja**					**103,41**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,23	3,12	103,41	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan IV:	**Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**							
12.	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni**					**107,53**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	22	Rata-rata nilai IKM	Kategori/ Nilai	86	86,77	100,90%	Tercapai	Sangat Tinggi
	23	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (65,48)	74,76	114,17%	Tercapai	Sangat Tinggi
13.	**Meningkatnya penerapan *e- government* yang terintegrasi**					**100,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,57	3,57	100,00%	Tercapai	Sangat Tinggi
14.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan**					**100,14**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	25	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	72	66,48	92,33%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	26	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,150)	2,974	94,41%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	27	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	Tercapai	Sangat Tinggi
15.	**Meningkatnya kualitas manajemen ASN**					**100,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	28	Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori III (273)	Kategori III (273)	100,00%	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan V:	**Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat**							

No		Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	%		
16.	**Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah**					**104,90**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	29	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	64,92	68,1	104,90%	Tercapai	Sangat Tinggi
17.	**Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum**					**100,00**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
	30	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	31	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja sasaran						**104,11**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran						**100,71**	**Tercapai**	**Sangat Tinggi**
*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2024								

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

a. Tingkat efisiensi dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN,** dengan **tingkat efisiensi sebesar 8,83% atau senilai Rp.193.643.075.197,-** (Seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)

b. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, terdiri dari 15 sasaran **EFISIEN,** dengan **tingkat efisiensi sebesar 10,71%**. Dan 2 sasaran **TIDAK EFISIEN** yaitu Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah dengan tingkat efisiensi –17,45%, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan dengan tingkat efisiensi 9,06%.

Efisiensi Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3
Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tujuan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	Tujuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
I	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	100	100,58	**100,58%**	308.830.214.595	300.662.049.661	**97,36%**	3,31%	9.956.950.625	Efisien
II	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	100	107,71	**107,71%**	91.164.724.016	88.165.817.143	**96,71%**	11,37%	10.025.358.834	Efisien
III	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	100	103,00	**103,00%**	74.200.585.400	70.944.705.565	**95,61%**	7,72%	5.478.709.091	Efisien
IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	104,84	**104,84%**	1.733.310.401.454	1.650.440.308.595	**95,22%**	10,10%	166.676.222.647	Efisien
V	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	100	102,45	**102,45%**	14.090.959.300	12.930.236.596	**91,76%**	11,65%	1.505.833.999	Efisien
EFISIENSI TUJUAN		**100**	**103,71**	103,71%	**2.221.596.884.765**	**2.123.143.117.560**	**95,57%**	**8,83%**	**193.643.075.197**	Efisien

Tabel 4. 4
Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	100	101,80	**101,80%**	185.071.977.595	183.755.742.885	**99,29%**	2,53%	4.645.021.462	Efisien
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100	100,24	**100,24%**	108.484.052.300	102.138.986.957	**94,15%**	6,47%	6.604.080.191	Efisien
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	100	122,60	**122,60%**	15.274.184.700	14.767.319.819	**96,68%**	26,81%	3.959.574.162	Efisien
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	100	103,37	**103,37%**	67.000.971.316	64.822.253.597	**96,75%**	6,85%	4.439.378.507	Efisien
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	100	102,36	**102,36%**	11.657.010.100	11.233.552.074	**96,37%**	6,21%	698.109.064	Efisien
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	100	100,00	**100,00%**	12.506.742.600	12.110.011.472	**96,83%**	3,28%	396.731.128	Efisien
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	100	78,18	**78,18%**	48.806.312.000	46.219.591.062	**94,70%**	-17,45%	-8.063.647.009	Tidak Efisien

8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	100	141,51	**141,51%**	670.800.000	644.700.500	**96,11%**	47,23%	304.520.839	Efisien
9	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	100	108,45	**108,45%**	13.615.353.000	13.114.444.033	**96,32%**	12,59%	1.651.502.178	Efisien
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	100,00	**100,00%**	8.584.649.000	8.537.453.719	**99,45%**	0,55%	47.195.281	Efisien
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	100	103,41	**103,41**	2.523.471.400	2.428.516.251	**96,24%**	7,45%	2.609.410.054	Efisien
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	100	107,53	**107,53%**	1.710.152.324.054	1.629.622.680.085	**95,29%**	12,85%	209.369.229.543	Efisien
13	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	100	100,00	**100,00%**	3.521.829.000	3.438.391.772	**97,63%**	2,43%	83.437.228	Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	100	95,58	**95,58%**	16.528.086.400	14.486.036.773	**87,64%**	9,06%	1.311.840.519	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	100	100,00	**100,00%**	3.108.162.000	2.893.199.965	**93,08%**	7,43%	214.962.035	Efisien
16	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	100	104,90	**104,90%**	1.921.820.000	1.865.604.183	**97,07%**	8,06%	150.353.026	Efisien

17	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	100	100,00	**100,00%**	12.169.139.300	11.064.632.413	**90,92%**	9,98%	1.104.506.887	Efisien
EFISIENSI SASARAN		**100**	**100,96**	**100,90%**	**2.221.596.884.765**	**2.123.143.117.560**	**95,57%**	**8,89%**	**227.097.688.845**	Efisien

PERJANJIAN KINERJA

BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI GROBOGAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 10 Januari 2025

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72,02**	**72,27**
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**86,28**	**87,01**
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1). Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,48	12,49
		2). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,29	7,30
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3). Usia Harapan Hidup	Tahun	75,24	75,39
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4). Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya (0,6375 – 0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah**	**Persen**	**82,97**	**82,97**
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	**Indeks**	**69,21**	**79,55**
		5. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**Sedang (85,91)**	**Sedang (140,00)**
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5). Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	79,97	88,31
		6). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	91,8	92,62

7). Persentase pemenuhan air minum.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
		7). Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	77,13	78
		8). Kinerja lalu lintas (*V/C ratio*)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta limbah B3	9). Indeks kualitas air	Indeks	52,58	54
		10). Indeks kualitas udara	Indeks	90,8	91
		11). Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	57,84	63,20
		12). Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	52,55	53
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13). Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,87	0,88
Misi Ketiga:	**Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing**				
II.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	**6. Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,41**	**5±1**
		7. Angka Kemiskinan	**Persen**	**11,43**	**9,76–10,24**
	7. Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14). Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	3,31	3,31
		15). Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	4,72	4,72

16). Pertumbuhan PDRB Sektor Industri .....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
		16). Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	5,55	5,55
		17). Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	3,01	3,01
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18). Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	2.643	2.643
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19). Indeks desa	Indeks	N/A	0,71
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20). Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21). Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,23	3,23
Misi Keempat:Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**8. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**A (82,35)**	**A (83,35)**
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22). Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (84,50)	B (86)
		23). Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (65,48)	Sangat Inovatif (65,48)
	13. Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi	24). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,57	3,57

25). Nilai SAKIP.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
	14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25). Nilai SAKIP	Nilai	B (65,93)	BB (72,00)
		26). Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,139)	Level 3 (3,150)
		27). Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28). Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (273)	Kategori III (273)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	**Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**Persen**	93,23	93,23
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	**Persen**	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29). Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	93,23	93,23
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30). Persentase Toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31). Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Keterangan:
*) Realisasi tahun 2023

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
Program Pembangunan Misi Pertama		**Rp**	**463.117.690.075**	**Rp**	**439.406.675.600**	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	284.398.268.568	Rp	237.027.968.000	
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	130.000.000	Rp	-	
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	335.464.500	Rp	1.235.253.000	
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	132.997.388.007	Rp	170.883.209.500	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.596.350.000	Rp	189.965.500	
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	515.831.000	Rp	502.131.000	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.527.472.800	Rp	1.419.180.000	
8.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	430.000.000	Rp	125.000.000	
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	22.258.025.000	Rp	6.405.000.000	
10.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.300.000.000	Rp	1.300.000.000	
11.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	514.404.200	Rp	504.404.200	
12.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	5.673.352.100	Rp	6.012.055.800	

13. Program Pemberdayaan dan .....

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
13.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	7.678.792.000	Rp	7.652.055.000	
14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	30.000.000	Rp	350.530.000	
15.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.584.760.000	Rp	4.514.145.100	
16.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	60.000.000	Rp	38.002.900	
17.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	70.000.000	Rp	60.000.000	
18.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	591.588.200	Rp	693.405.800	
19.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	-	Rp	10.200.000	
20.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	92.101.000	Rp	63.713.400	
21.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	37.000.000	Rp	46.685.000	
22.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	296.892.700	Rp	373.771.400	
Program Pembangunan Misi Kedua		**Rp**	**198.716.585.119**	**Rp**	**199.246.377.090**	
23.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	41.677.179.140	Rp	43.827.580.451	

24. Program Pengelolaan .....

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	7.272.490.000	Rp	6.064.516.000	
25.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	-	Rp	6.012.960.250	
26.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	12.534.404.368	Rp	12.685.179.000	
27.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	6.849.910.710	Rp	5.829.981.580	
28.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	636.200.000	Rp	4.400.393.050	
29.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	78.230.013.700	Rp	74.429.033.559	
30.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	325.195.250	Rp	498.510.000	
31.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	805.338.000	Rp	1.200.689.000	
32.	Program Penatagunaan Tanah	Rp	2.376.722.700	Rp	447.552.000	
33.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	784.472.000	Rp	278.208.000	
34.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	8.966.785.000	Rp	5.077.478.400	
35.	Program Kawasan Permukiman	Rp	-	Rp	1.900.000.000	

36. Program Peningkatan .....

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
36.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	11.327.720.450	Rp	9.594.939.000	
37.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	3.740.701.301	Rp	5.104.232.200	
38.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	200.000.000	Rp	150.000.000	
39.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	760.000.000	Rp	840.000.000	
40.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.534.475.000	Rp	2.000.000.000	
41.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	
42.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	40.000.000	Rp	75.000.000	
43.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	6.790.000.000	Rp	340.000.000	

44. Program Penanganan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2024		2025	
44.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	20.000.000	Rp	30.000.000	
45.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	881.117.100	Rp	7.815.000.000	
46.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	7.890.311.300	Rp	8.526.024.600	
47.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	3.998.549.100	Rp	2.044.100.000	
Program Pembangunan Misi Ketiga		**Rp**	**109.459.640.931**	**Rp**	**90.635.247.928**	
48.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	116.400.000	Rp	89.997.000	
49.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.250.010.300	Rp	140.000.000	
50.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	174.497.000	Rp	175.000.000	
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	26.298.404.800	Rp	23.601.481.000	
52.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	32.596.026.400	Rp	33.855.094.000	
53.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.385.074.500	Rp	2.049.613.000	
54.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	200.000.000	Rp	3.134.296.000	

55. Program Penyuluhan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2024		2025	
55.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	2.397.183.200	Rp	5.164.440.000	
56.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	5.436.556.548	Rp	1.795.451.528	
57.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	665.000.000	Rp	670.000.000	
58.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	15.000.000	Rp	25.000.000	
59.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	250.000.000	Rp	200.000.000	
60.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.189.126.000	Rp	569.939.000	
61.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	-	Rp	25.000.000	
62.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	104.356.000	Rp	700.000.000	
63.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	-	Rp	450.000.000	
64.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	585.400.000	Rp	150.000.000	
65.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.000.000	Rp	200.500.000	

66. Program Penilaian .....

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
66.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	49.500.000	
67.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	46.000.000	Rp	150.000.000	
68.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	204.000.000	Rp	250.000.000	
69.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	29.000.000	Rp	11.610.000	
70.	Program Pengembangan UMKM	Rp	966.000.000	Rp	1.006.390.000	
71.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	52.700.000	Rp	117.500.000	
72.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	74.550.000	Rp	273.500.000	
73.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	72.310.000	Rp	136.400.000	
74.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	583.883.000	Rp	195.380.000	
75.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	
76.	Program Penataan Desa	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	
77.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	4.395.400.000	Rp	4.150.000.000	
78.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.009.940.000	Rp	4.069.420.000	

79. Program Pemberdayaan .....

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
79.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.899.700.000	Rp	1.385.656.000	
80.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	950.787.800	Rp	511.439.000	
81.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.839.570.500	Rp	2.386.618.000	
82.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	110.930.000	Rp	205.000.000	
83.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	1.006.530.000	Rp	354.587.000	
84.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	7.644.071.000	Rp	594.000.000	
85.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	-	Rp	4.841.000	
86.	Program Penanganan Bencana	Rp	163.924.000	Rp	130.000.000	
87.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	30.000.000	Rp	21.571.000	
88.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	105.974.532	Rp	-	
89.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	10.158.628.361	Rp	809.918.000	
90.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	555.688.990	Rp	525.640.000	
91.	Program Hubungan Industrial	Rp	400.000.000	Rp	200.000.400	
92.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	177.018.000	Rp	30.466.000	

Program Pembangunan Misi.....

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
Program Pembangunan Misi Keempat		**Rp**	**2.195.877.086.264**	**Rp**	**2.293.136.613.466**	
93.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.666.610.264.964	Rp	1.759.307.958.666	
94.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	16.029.696.700	Rp	15.487.043.800	
95.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.744.252.700	Rp	2.264.572.500	
96.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	13.076.250.700	Rp	11.167.770.700	
97.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	136.138.500	Rp	158.878.000	
98.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	94.935.000	Rp	62.275.000	
99.	Program Pencatatan Sipil	Rp	1.700.162.200	Rp	92.290.000	
100.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	35.013.300	Rp	231.322.000	
101.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	30.033.500	Rp	31.700.000	
102.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	737.406.000	Rp	750.000.000	
103.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.421.902.400	Rp	962.785.000	
104.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.310.034.450	Rp	1.574.943.000	
105.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	85.518.400	Rp	202.832.000	

106. Program Penyelenggaraan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2024		2025	
106.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	75.000.000	Rp	262.200.000	
107.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	262.158.000	Rp	247.602.000	
108.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	95.000.000	Rp	95.000.000	
109.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	85.000.000	Rp	95.000.000	
110.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.360.000.000	Rp	2.325.000.000	
111.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.450.000.000	Rp	1.450.000.000	
112.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	324.383.000	Rp	807.956.000	
113.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	75.125.000	Rp	373.433.000	
114.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	478.373.485.150	Rp	485.542.828.800	
115.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.046.738.000	Rp	1.110.973.000	
116.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.738.769.000	Rp	5.865.128.000	
117.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.828.787.900	Rp	1.412.873.000	
118.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.151.031.400	Rp	1.254.249.000	

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
Program Pembangunan Misi Kelima		**Rp**	**56.211.835.990**	**Rp**	**13.385.494.500**	
119.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.212.600.000	Rp	820.000.000	
120.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	Rp	692.070.000	
121.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	-	Rp	200.000.000	
122.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	780.853.600	Rp	848.244.000	
123.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	635.000.000	Rp	500.000.000	
124.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	2.445.880.800	Rp	2.209.802.500	
125.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	40.250.200.000	Rp	2.769.775.000	
126.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	60.000.000	Rp	141.000.000	
127.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	469.000.000	Rp	469.000.000	

128. Program Peningkatan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
128.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	9.597.255.490	Rp	4.685.920.000	
129.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	61.046.100	Rp	49.683.000	
	Jumlah	**Rp**	**3.023.382.838.379**	**Rp**	**3.035.810.408.584**	

Keterangan

1. Indikator Sasaran ke-4, target Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2025 lebih rendah dari target RPJMD dikarenakan adanya revitalisasi pengarusutamaan gender dari Kementerian PPA dimana capaian Indeks IPG, IDG dan IKG menjadi faktor pengungkit dalam penilaian APE, sedangkan capaian IPG dan IDG Kabupaten Grobogan selama 3 tahun terakhir kenaikannya rata – rata hanya ± 0,06 – 0,2 sehingga untuk target RPJMD yang semula Predikat Utama, dirasionalisasikan menjadi Madya.
2. Indikator Sasaran ke-9, target Indeks kualitas air tahun 2025 lebih rendah dari target RPJMD dikarenakan capaian kinerja fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 dari 51,05 menjadi 52,58 atau naik 1,53, sehingga target RPJMD tahun 2025 sebesar 80,51, dirasionalisasi menjadi 54
3. Indikator Sasaran ke-19, Indeks Desa Membangun (IDM) diubah menjadi Indeks Desa (ID). Hal ini mendasari ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa untuk mengukur sasaran "Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa", dengan formulasi ID dihasilkan dari total indeks Dimensi Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa.

Purwodadi, 10 Januari 2025

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

PERJANJIAN KINERJA

BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYO HADI
Jabatan : BUPATI GROBOGAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 21 Februari 2025

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72,02**	**72,27**
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**86,28**	**87,01**
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1). Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,48	12,49
		2). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,29	7,30
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3). Usia Harapan Hidup	Tahun	75,24	75,39
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4). Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya (0,6375 – 0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah**	**Persen**	**82,97**	**82,97**
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	**Indeks**	**69,21**	**79,55**
		5. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**Sedang (85,91)**	**Sedang (140,00)**
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5). Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	79,97	88,31
		6). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	91,8	92,62

7). Persentase pemenuhan air minum.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
		7). Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	77,13	78
		8). Kinerja lalu lintas (*V/C ratio*)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta limbah B3	9). Indeks kualitas air	Indeks	52,58	54
		10). Indeks kualitas udara	Indeks	90,8	91
		11). Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	57,84	63,20
		12). Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	52,55	53
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13). Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,87	0,88
Misi Ketiga:	**Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing**				
II.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	**6. Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,41**	**5±1**
		7. Angka Kemiskinan	**Persen**	**11,43**	**9,76–10,24**
	7. Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14). Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	3,31	3,31
		15). Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	4,72	4,72

16). Pertumbuhan PDRB Sektor Industri .....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
		16). Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	5,55	5,55
		17). Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	3,01	3,01
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18). Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	2.643	2.643
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19). Indeks desa	Indeks	N/A	0,71
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20). Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21). Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,23	3,23
Misi Keempat:Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**8. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**A (82,35)**	**A (83,35)**
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22). Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (84,50)	B (86)
		23). Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (65,48)	Sangat Inovatif (65,48)
	13. Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi	24). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,57	3,57

25). Nilai SAKIP.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
	14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25). Nilai SAKIP	Nilai	B (65,93)	BB (72,00)
		26). Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,139)	Level 3 (3,150)
		27). Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28). Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (273)	Kategori III (273)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	**Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**Persen**	93,23	93,23
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	**Persen**	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29). Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	93,23	93,23
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30). Persentase Toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31). Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Keterangan:
*) Realisasi tahun 2023

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
Program Pembangunan Misi Pertama		**Rp**	**463.117.690.075**	**Rp**	**439.406.675.600**	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	284.398.268.568	Rp	237.027.968.000	
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	130.000.000	Rp	-	
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	335.464.500	Rp	1.235.253.000	
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	132.997.388.007	Rp	170.883.209.500	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.596.350.000	Rp	189.965.500	
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	515.831.000	Rp	502.131.000	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.527.472.800	Rp	1.419.180.000	
8.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	430.000.000	Rp	125.000.000	
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	22.258.025.000	Rp	6.405.000.000	
10.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.300.000.000	Rp	1.300.000.000	
11.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	514.404.200	Rp	504.404.200	
12.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	5.673.352.100	Rp	6.012.055.800	

13. Program Pemberdayaan dan .....

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
13.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	7.678.792.000	Rp	7.652.055.000	
14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	30.000.000	Rp	350.530.000	
15.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.584.760.000	Rp	4.514.145.100	
16.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	60.000.000	Rp	38.002.900	
17.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	70.000.000	Rp	60.000.000	
18.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	591.588.200	Rp	693.405.800	
19.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	-	Rp	10.200.000	
20.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	92.101.000	Rp	63.713.400	
21.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	37.000.000	Rp	46.685.000	
22.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	296.892.700	Rp	373.771.400	
Program Pembangunan Misi Kedua		**Rp**	**198.716.585.119**	**Rp**	**199.246.377.090**	
23.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	41.677.179.140	Rp	43.827.580.451	

24. Program Pengelolaan .....

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	7.272.490.000	Rp	6.064.516.000	
25.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	-	Rp	6.012.960.250	
26.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	12.534.404.368	Rp	12.685.179.000	
27.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	6.849.910.710	Rp	5.829.981.580	
28.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	636.200.000	Rp	4.400.393.050	
29.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	78.230.013.700	Rp	74.429.033.559	
30.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	325.195.250	Rp	498.510.000	
31.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	805.338.000	Rp	1.200.689.000	
32.	Program Penatagunaan Tanah	Rp	2.376.722.700	Rp	447.552.000	
33.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	784.472.000	Rp	278.208.000	
34.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	8.966.785.000	Rp	5.077.478.400	
35.	Program Kawasan Permukiman	Rp	-	Rp	1.900.000.000	

36. Program Peningkatan .....

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
36.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	11.327.720.450	Rp	9.594.939.000	
37.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	3.740.701.301	Rp	5.104.232.200	
38.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	200.000.000	Rp	150.000.000	
39.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	760.000.000	Rp	840.000.000	
40.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.534.475.000	Rp	2.000.000.000	
41.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	
42.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	40.000.000	Rp	75.000.000	
43.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	6.790.000.000	Rp	340.000.000	

44. Program Penanganan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2024		2025	
44.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	20.000.000	Rp	30.000.000	
45.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	881.117.100	Rp	7.815.000.000	
46.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	7.890.311.300	Rp	8.526.024.600	
47.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	3.998.549.100	Rp	2.044.100.000	
Program Pembangunan Misi Ketiga		**Rp**	**109.459.640.931**	**Rp**	**90.635.247.928**	
48.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	116.400.000	Rp	89.997.000	
49.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.250.010.300	Rp	140.000.000	
50.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	174.497.000	Rp	175.000.000	
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	26.298.404.800	Rp	23.601.481.000	
52.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	32.596.026.400	Rp	33.855.094.000	
53.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.385.074.500	Rp	2.049.613.000	
54.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	200.000.000	Rp	3.134.296.000	

55. Program Penyuluhan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2024		2025	
55.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	2.397.183.200	Rp	5.164.440.000	
56.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	5.436.556.548	Rp	1.795.451.528	
57.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	665.000.000	Rp	670.000.000	
58.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	15.000.000	Rp	25.000.000	
59.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	250.000.000	Rp	200.000.000	
60.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.189.126.000	Rp	569.939.000	
61.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	-	Rp	25.000.000	
62.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	104.356.000	Rp	700.000.000	
63.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	-	Rp	450.000.000	
64.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	585.400.000	Rp	150.000.000	
65.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.000.000	Rp	200.500.000	

66. Program Penilaian .....

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
66.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	49.500.000	
67.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	46.000.000	Rp	150.000.000	
68.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	204.000.000	Rp	250.000.000	
69.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	29.000.000	Rp	11.610.000	
70.	Program Pengembangan UMKM	Rp	966.000.000	Rp	1.006.390.000	
71.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	52.700.000	Rp	117.500.000	
72.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	74.550.000	Rp	273.500.000	
73.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	72.310.000	Rp	136.400.000	
74.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	583.883.000	Rp	195.380.000	
75.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	
76.	Program Penataan Desa	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	
77.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	4.395.400.000	Rp	4.150.000.000	
78.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.009.940.000	Rp	4.069.420.000	

79. Program Pemberdayaan .....

	Program	Anggaran Tahun 2024		Anggaran Tahun 2025		Keterangan
79.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.899.700.000	Rp	1.385.656.000	
80.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	950.787.800	Rp	511.439.000	
81.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.839.570.500	Rp	2.386.618.000	
82.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	110.930.000	Rp	205.000.000	
83.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	1.006.530.000	Rp	354.587.000	
84.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	7.644.071.000	Rp	594.000.000	
85.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	-	Rp	4.841.000	
86.	Program Penanganan Bencana	Rp	163.924.000	Rp	130.000.000	
87.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	30.000.000	Rp	21.571.000	
88.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	105.974.532	Rp	-	
89.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	10.158.628.361	Rp	809.918.000	
90.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	555.688.990	Rp	525.640.000	
91.	Program Hubungan Industrial	Rp	400.000.000	Rp	200.000.400	
92.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	177.018.000	Rp	30.466.000	

Program Pembangunan Misi.....

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
Program Pembangunan Misi Keempat		**Rp**	**2.195.877.086.264**	**Rp**	**2.293.136.613.466**	
93.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.666.610.264.964	Rp	1.759.307.958.666	
94.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	16.029.696.700	Rp	15.487.043.800	
95.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.744.252.700	Rp	2.264.572.500	
96.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	13.076.250.700	Rp	11.167.770.700	
97.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	136.138.500	Rp	158.878.000	
98.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	94.935.000	Rp	62.275.000	
99.	Program Pencatatan Sipil	Rp	1.700.162.200	Rp	92.290.000	
100.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	35.013.300	Rp	231.322.000	
101.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	30.033.500	Rp	31.700.000	
102.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	737.406.000	Rp	750.000.000	
103.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.421.902.400	Rp	962.785.000	
104.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.310.034.450	Rp	1.574.943.000	
105.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	85.518.400	Rp	202.832.000	

106. Program Penyelenggaraan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2024		2025	
106.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	75.000.000	Rp	262.200.000	
107.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	262.158.000	Rp	247.602.000	
108.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	95.000.000	Rp	95.000.000	
109.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	85.000.000	Rp	95.000.000	
110.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.360.000.000	Rp	2.325.000.000	
111.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.450.000.000	Rp	1.450.000.000	
112.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	324.383.000	Rp	807.956.000	
113.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	75.125.000	Rp	373.433.000	
114.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	478.373.485.150	Rp	485.542.828.800	
115.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.046.738.000	Rp	1.110.973.000	
116.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.738.769.000	Rp	5.865.128.000	
117.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.828.787.900	Rp	1.412.873.000	
118.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.151.031.400	Rp	1.254.249.000	

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
Program Pembangunan Misi Kelima		**Rp**	**56.211.835.990**	**Rp**	**13.385.494.500**	
119.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.212.600.000	Rp	820.000.000	
120.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	Rp	692.070.000	
121.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	-	Rp	200.000.000	
122.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	780.853.600	Rp	848.244.000	
123.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	635.000.000	Rp	500.000.000	
124.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	2.445.880.800	Rp	2.209.802.500	
125.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	40.250.200.000	Rp	2.769.775.000	
126.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	60.000.000	Rp	141.000.000	
127.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	469.000.000	Rp	469.000.000	

128. Program Peningkatan .....

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2024		2025		
128.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	9.597.255.490	Rp	4.685.920.000	
129.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	61.046.100	Rp	49.683.000	
	Jumlah	**Rp**	**3.023.382.838.379**	**Rp**	**3.035.810.408.584**	

Keterangan

1. Indikator Sasaran ke-4, target Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2025 lebih rendah dari target RPJMD dikarenakan adanya revitalisasi pengarusutamaan gender dari Kementerian PPA dimana capaian Indeks IPG, IDG dan IKG menjadi faktor pengungkit dalam penilaian APE, sedangkan capaian IPG dan IDG Kabupaten Grobogan selama 3 tahun terakhir kenaikannya rata – rata hanya ± 0,06 – 0,2 sehingga untuk target RPJMD yang semula Predikat Utama, dirasionalisasikan menjadi Madya.
2. Indikator Sasaran ke-9, target Indeks kualitas air tahun 2025 lebih rendah dari target RPJMD dikarenakan capaian kinerja fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 dari 51,05 menjadi 52,58 atau naik 1,53, sehingga target RPJMD tahun 2025 sebesar 80,51, dirasionalisasi menjadi 54
3. Indikator Sasaran ke-19, Indeks Desa Membangun (IDM) diubah menjadi Indeks Desa (ID). Hal ini mendasari ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa untuk mengukur sasaran "Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa", dengan formulasi ID dihasilkan dari total indeks Dimensi Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa.

Purwodadi, 21 Februari 2025

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYO HADI

Jabatan : BUPATI GROBOGAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, September 2025

BUPATI GROBOGAN,

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI.

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	**Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72,27**	**72,27**
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**87,01**	**86,45**
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1). Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,49	12,49
		2). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,30	7,30
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3). Usia Harapan Hidup	Tahun	75,39	75,39
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4). Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya (0,6375 – 0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	**Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah**	**Persen**	**82,97**	**82,97**
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	**Indeks**	**79,55**	**79,55**
		5. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**Sedang (140,00)**	**Sedang (140,00)**
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5). Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	88,31	88,31
		6). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,62	92,62

7). Persentase pemenuhan air minum.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan
		7). Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	78	78
		8). Kinerja lalu lintas (*V/C ratio*)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta limbah B3	9). Indeks kualitas air	Indeks	54	54
		10). Indeks kualitas udara	Indeks	91	91
		11). Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	63,20	63,20
		12). Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	53	53
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13). Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88	0,88
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
II.	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**	**6. Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5±1**	**5±1**
		7. Angka Kemiskinan	**Persen**	**9,76–10,24**	**9,76–10,24**
	7. Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14). Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	3,31	3,31
		15). Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	4,72	4,72

16). Pertumbuhan PDRB Sektor Industri .....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan
		16). Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	5,55	5,55
		17). Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	3,01	3,01
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18). Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	2.643	2.643
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19). Indeks desa	Indeks	0,71	0,71
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20). Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21). Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,23	3,23
Misi Keempat:Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**8. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**A (83,35)**	**A (83,35)**
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22). Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (86)	B (86)
		23). Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (65,48)	Sangat Inovatif (65,48)
	13. Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi	24). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,57	3,57

25). Nilai SAKIP.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan
	14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25). Nilai SAKIP	Nilai	BB (72,00)	BB (72,00)
		26). Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,150)
		27). Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28). Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (273)	Kategori III (273)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	**Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat**	**9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**Persen**	93,23	64 ,92
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	**Persen**	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29). Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	93,23	64 ,92
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30). Persentase Toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31). Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2025		KETERANGAN
		PENETAPAN	PERUBAHAN	
Program Pembangunan Misi Pertama		**Rp 439.406.675.600**	**Rp 463.770.508.816**	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 237.027.968.000	Rp 249.246.068.441	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp -	Rp 133.000.000	
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.235.253.000	Rp 1.122.583.000	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 170.883.209.500	Rp 178.097.732.375	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 189.965.500	Rp 1.121.099.700	
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 502.131.000	Rp 305.732.000	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.419.180.000	Rp 308.966.600	
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 125.000.000	Rp 350.400.000	
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 6.405.000.000	Rp 11.636.000.000	
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1.300.000.000	Rp 1.300.000.000	
11	Program Pengendalian Penduduk	Rp 504.404.200	Rp 504.404.200	
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 6.012.055.800	Rp 5.851.688.400	
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 7.652.055.000	Rp 7.841.949.000	
14	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 350.530.000	Rp 380.530.000	
15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 4.514.145.100	Rp 4.514.145.100	
16	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 38.002.900	Rp 38.002.900	
17	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	

18	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	693.405.800	Rp	515.653.200
19	Program Perlindungan Perempuan	Rp	10.200.000	Rp	10.200.000
20	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	63.713.400	Rp	100.513.400
21	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	46.685.000	Rp	40.052.000
22	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	373.771.400	Rp	291.788.500
Program Pembangunan Misi Kedua		**Rp**	**199.246.377.090**	**Rp**	**223.217.115.997**
23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	43.827.580.451	Rp	38.908.441.150
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	6.064.516.000	Rp	2.981.329.000
25	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	6.012.960.250	Rp	6.118.862.250
26	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	12.685.179.000	Rp	11.160.280.678
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	5.829.981.580	Rp	11.110.141.580
28	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	4.400.393.050	Rp	4.977.323.050
29	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	74.429.033.559	Rp	74.166.388.132
30	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	498.510.000	Rp	246.827.000
31	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.200.689.000	Rp	834.880.000
32	Program Penatagunaan Tanah	Rp	447.552.000	Rp	647.552.000
33	Program Pengembangan Perumahan	Rp	278.208.000	Rp	664.808.000
34	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	5.077.478.400	Rp	9.735.790.400
35	Program Kawasan Permukiman	Rp	1.900.000.000	Rp	7.947.240.250
36	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	9.594.939.000	Rp	11.179.889.000

37	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	5.104.232.200	Rp	16.581.431.307
38	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	150.000.000	Rp	143.082.000
39	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	840.000.000	Rp	898.218.600
40	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.000.000.000	Rp	3.750.000.000
41	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000	Rp	63.750.000
42	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000
43	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	340.000.000	Rp	340.000.000
44	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
45	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	7.815.000.000	Rp	7.811.440.000
46	Program Penanggulangan Bencana	Rp	8.526.024.600	Rp	10.597.691.600
47	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.044.100.000	Rp	2.246.750.000
Program Pembangunan Misi Ketiga		**Rp**	**90.635.247.928**	**Rp**	**80.963.069.328**
48	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	89.997.000	Rp	89.997.000
49	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	140.000.000	Rp	335.000.000
50	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	175.000.000	Rp	275.000.000
51	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	23.601.481.000	Rp	12.569.880.000

52	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	33.855.094.000	Rp	18.557.151.500
53	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	2.049.613.000	Rp	2.647.896.000
54	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	3.134.296.000	Rp	2.847.639.500
55	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	5.164.440.000	Rp	6.957.001.000
56	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.795.451.528	Rp	3.734.143.928
57	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	670.000.000	Rp	667.000.000
58	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	25.000.000	Rp	22.750.000
59	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000
60	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	569.939.000	Rp	635.000.000
61	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000
62	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	700.000.000	Rp	1.625.120.000
63	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	450.000.000	Rp	570.200.000
64	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	150.000.000	Rp	350.000.000
65	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.500.000	Rp	95.780.000
66	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	49.500.000	Rp	49.500.000
67	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	150.000.000	Rp	500.000.000
68	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	250.000.000	Rp	214.314.000
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	11.610.000	Rp	11.610.000
70	Program Pengembangan UMKM	Rp	1.006.390.000	Rp	1.088.390.000

71	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	117.500.000	Rp	142.500.000
72	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	273.500.000	Rp	257.500.000
73	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	136.400.000	Rp	136.400.000
74	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	195.380.000	Rp	149.800.000
75	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	30.000.000	Rp	22.000.000
76	Program Penataan Desa	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000
77	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	4.150.000.000	Rp	5.059.650.000
78	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.069.420.000	Rp	4.069.420.000
79	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.385.656.000	Rp	1.787.217.000
80	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	511.439.000	Rp	1.471.531.000
81	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.386.618.000	Rp	2.382.305.000
82	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	205.000.000	Rp	230.000.000
83	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	354.587.000	Rp	604.587.000
84	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	594.000.000	Rp	7.244.000.000
85	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	4.841.000	Rp	4.841.000
86	Program Penanganan Bencana	Rp	130.000.000	Rp	330.000.000
87	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	21.571.000	Rp	171.571.000
88	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	-	Rp	-
89	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	809.918.000	Rp	2.055.828.000
90	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	525.640.000	Rp	525.640.000
91	Program Hubungan Industrial	Rp	200.000.400	Rp	179.440.400

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

92	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	30.466.000	Rp	30.466.000
Program Pembangunan Misi Keempat		**Rp**	**2.293.136.613.466**	**Rp**	**2.318.909.107.103**
93	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.759.307.958.666	Rp	1.779.557.558.203
94	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	15.487.043.800	Rp	16.995.190.800
95	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.264.572.500	Rp	1.843.460.000
96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	11.167.770.700	Rp	11.034.715.700
97	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	158.878.000	Rp	130.715.000
98	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	62.275.000	Rp	62.275.000
99	Program Pencatatan Sipil	Rp	92.290.000	Rp	92.290.000
100	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	231.322.000	Rp	180.831.000
101	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	31.700.000	Rp	31.700.000
102	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	750.000.000	Rp	737.329.000
103	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	962.785.000	Rp	983.108.000
104	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	1.574.943.000	Rp	1.676.903.000
105	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	202.832.000	Rp	202.832.000
106	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	262.200.000	Rp	379.239.000
107	Program Pengelolaan Arsip	Rp	247.602.000	Rp	282.057.000
108	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	95.000.000	Rp	95.000.000
109	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	95.000.000	Rp	78.410.000
110	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.325.000.000	Rp	2.374.174.000

111	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.450.000.000	Rp	1.624.997.500
112	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	807.956.000	Rp	2.047.960.400
113	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	373.433.000	Rp	315.211.000
114	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	485.542.828.800	Rp	488.513.231.500
115	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.110.973.000	Rp	1.004.438.000
116	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	5.865.128.000	Rp	5.557.319.000
117	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.412.873.000	Rp	1.428.270.000
118	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.254.249.000	Rp	1.679.892.000
Program Pembangunan Misi Kelima		**Rp**	**13.385.494.500**	**Rp**	**14.164.791.300**
119	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	820.000.000	Rp	1.033.500.000
120	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	692.070.000	Rp	867.070.000
121	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	200.000.000	Rp	196.250.000
122	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	848.244.000	Rp	854.772.000
123	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	500.000.000	Rp	471.600.000
124	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	2.209.802.500	Rp	2.383.444.500
125	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	2.769.775.000	Rp	2.788.025.000
126	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	141.000.000	Rp	136.500.000

127	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	469.000.000	Rp	439.000.000
128	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	4.685.920.000	Rp	4.802.017.800
129	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	49.683.000	Rp	192.612.000

Purwodadi, September 2025

BUPATI GROBOGAN,

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Kabupaten Grobogan



www.grobogan.go.id

Jl. Gatot Subroto No. 6, Purwodadi,
Grobogan, Jawa Tengah